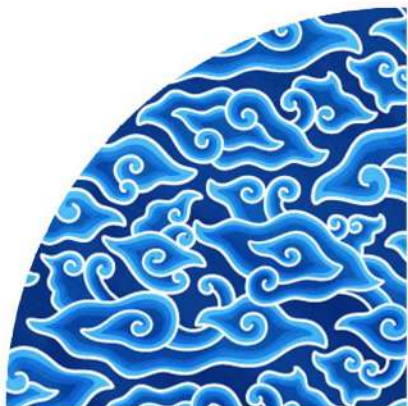


LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG



**TRIWULAN III
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan III Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, BBPOM di Bandung telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada triwulan III tahun 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan III Tahun 2022 ini.

LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan III Tahun 2022 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung. Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan III Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada masa yang akan datang.

Bandung, Oktober 2022

Kepala Balai Besar POM di Bandung



Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v

Bab 1 Pendahuluan	1.1	LATAR BELAKANG	1
	1.2	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
	1.3	STRUKTUR ORGANISASI	4
	1.4	ISU STRATEGIS	4
Bab 2 Perencanaan Kinerja	2.1	REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020- 2024	17
	2.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	24
	2.3	PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022	26
	2.4	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022	28
	2.5	METODE PENGUKURAN	30
Bab 3 Perencanaan Kinerja	3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
	3.2	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	173
Bab 4 Perencanaan Kinerja	4.1	KESIMPULAN	185
	4.2	SARAN	187
LAMPIRAN			188



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan III Tahun 2022 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama triwulan III tahun 2022. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama triwulan III tahun 2022 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan.

Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 dan Perjanjian



LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN III TAHUN 2022

Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 yang telah ditetapkan tanggal 16 Desember 2021. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 yang telah dilakukan reviu dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun Bandung Tahun 2020-2024.

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan, Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan indikator) indikator sasaran kegiatan. Dengan hasil sebagai berikut: terdapat tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria memenuhi ekspektasi, tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, dan dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, serta tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun.

Pada triwulan III tahun 2022, BBPOM di Bandung, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator secara kumulatif masuk ke dalam kategori kategori Efisien dengan TE 0,42 dengan Capaian TE 92%. BBPOM di Bandung melaksanakan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) dengan nilai TE 0,25 dengan capaian TE sebesar 95%. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (TE=2.84), nilai TE terendah adalah Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (TE=-0,00), Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (TE=-0,00), dan Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (TE=-0,00). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada triwulan III terlaksana secara efisien (TE=0,25,) dengan capaian TE 95%.

Sedangkan anggaran Balai Besar POM di Bandung tahun 2022 sebesar Rp. 61.356.815.000,- dengan rincian: (1) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.761.070.000,- dan (2) Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26,595,745,000,-. Selisih anggaran sebesar Rp. 1.532.040.000,- dari anggaran semula yaitu sebesar Rp. 57.361.818.000,- untuk penambahan pelaksanaan titik KIE berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.03.03.21.212.05.22.190 tanggal 30 Mei 2022 tentang Realokasi Anggaran dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Pada Triwulan III, anggaran BBPOM di Bandung meningkat menjadi Rp.



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

63.916.221.000,-. Penambahan anggaran tersebut antara lain : (1) Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: B-PR.03.03.21.212 05.22.190 tanggal 30 Mei 2022 perihal Realokasi Anggaran dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, disampaikan BBPOM di Bandung mendapatkan tambahan pelaksanaan KIE sebanyak 17 titik dengan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp. 1.532.040.000,-; (2) Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 04 Agustus 2022 perihal Penginputan Kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2022, disampaikan revisi kekurangan belanja pegawai; (3) Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor : B-PR.03.03.2.21.09.22.675 tanggal 13 September 2022 perihal Realokasi dan Optimalisasi Anggaran dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program KIE Obat dan Makanan, disampaikan Hasil Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman, maka Balai Besar POM di Bandung ditambahkan sebanyak 7 titik KIE dengan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp. 591.990.000,-. Pada triwulan III tahun 2022 berdasarkan OMSPAN, realisasi anggaran sebesar Rp. 40.295.581.767,- (63,04%).

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai Besar POM di Bandung untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, Oktober 2022

Kepala Balai Besar POM di Bandung



Sukriadi Darma, S.Si., Apt., S.H



LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG



**TRIWULAN III
TAHUN 2022**



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 ISU STRATEGIS



1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan III Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama triwulan III Tahun 2022 dan tahun kedua dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan,



perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 13 (tiga belas); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 39 (tiga puluh sembilan).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;



- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**TABEL 1.1
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi 13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 7 September 2020.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI BANDUNG



1.4 ISU STRATEGIS

Sering dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2021 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.



Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium



terus dilakukan. Pada tahun 2019, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

Laboratorium BSL-2

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung merupakan salah satu Balai yang ditunjuk untuk melakukan pengujian spesimen Covid-19 oleh Badan POM. Untuk itu, dilakukan pembangunan BSL2 pada tahun 2021 dan dilanjutkan dengan pemasangan AHU pada tahun 2022. Pada TW 2, proses pemasangan AHU masih berjalan, direncanakan selesai pada bulan Juli 2022.

Kendala yang dihadapi Laboratorium BSL2 sampai dengan TW 2 tahun 2022 adalah terkait perijinan sebagai Laboratorium Pemeriksa Covid-19. Telah dilakukan visitasi oleh tim pemeriksa dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada bulan Juli 2021. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK 01.07/Menkes/4642/2021 tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan Corona virus disease 2019 (Covid) 19, Laboratorium BSL2 BBPOM di Bandung masih belum memenuhi persyaratan untuk spesifikasi penanggung jawab (Dokter penanggung jawab dokter patologi klinik).

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam Region 3 dengan Koordinator BBPOM di DKI Jakarta, dan anggota terdiri dari BBPOM di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Serang. Manfaat dari system manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.



ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Sebagaimana tertuang dalam PP no.72 Tahun 2012 tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market* Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung, yaitu melalui :

- a) Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar mulai dari pengawasan, pelaksanaan regulasi, pembinaan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta;
- b) Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Fokus sistem kesehatan nasional tahun 2021 dengan berkaca pada terjadinya Pandemi covid-19 menurut Bappenas akan menjadi salah satu *major project* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun fokus penguatan Sistem Kesehatan Nasional di 2021 antara lain penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penguatan ketahanan kesehatan dan penguatan sumber daya melalui pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan. Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM memegang peranan penting di ketiga fokus penguatan ini, diantaranya dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan dengan penguatan kapasitas dan jejaring



laboratorium serta pengawalan dalam pemenuhan vaksin dan obat, termasuk vaksin covid-19

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai Besar POM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

Implementasi JKN dalam menghadapi Pandemi covid-19 pada tahun 2020 juga memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada pengawasan Obat dan Makanan. Meningkatnya kapasitas produksi industri farmasi maupun obat tradisional yang menghasilkan Vitamin, Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional, juga industri kosmetik yang menggunakan fasilitas produksinya bersamaan dengan produksi hand sanitizer menyebabkan dampak langsung pada Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM. Sementara dampak tidak langsungnya ke masyarakat membuat Balai Besar POM di Bandung harus lebih giat dalam memberikan



KIE mengenai cara konsumsi vitamin, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang benar; karena pastinya konsumsi produk ini akibat pandemi meningkat cukup signifikan.

Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019 terdapat 88 industri farmasi, 54 industri Obat Tradisional, 24.291 industri PKRT, 187 industri kosmetik, 1802 industri suplemen makanan, 104 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 141 industri alat kesehatan dan 926 Industri Pangan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha.

Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan . Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan tahun 2014 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 76,97%. Sedangkan pemenuhan SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 hanya sebesar 44,48 %. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Pandemi covid-19 yang kemudian mendatangkan vaksin dari Tiongkok juga merupakan bukti bahwa Badan POM terlibat dalam komitmen internasional, yang akhirnya menantang UPT-nya termasuk Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan



kapasitas dan kompetensi SDM-nya terutama dalam hal pengawalan distribusi vaksin dan pengujian sampel swab antigen dan RT-PCR.

Berdasarkan hal ini, Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal, dan juga menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, Balai Besar POM di Bandung memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan SNI ISO/IEC 17025: 2017.

Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) di sektor kesehatan yaitu diantaranya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya. Untuk mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut, dan ini semakin nyata dengan terjadinya Pandemi covid-19 sejak 2020 yang lalu.



Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni pendapatan per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penduduk terbesar. Terdiri atas laki-laki sebanyak 24,51 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,76 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik - Jawa Barat dalam Angka 2020), menjadi tantangan bagi BBPOM di Bandung dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat



dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen serta media informasi baik offline maupun online yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Pasar Aman dsari Bahan Berbahaya, Program Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi peluang, khususnya bagi Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat



dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang lengkap mulai dari metode analisa, baku pembanding, reagensia sampai kepada peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa kemampuan dan kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Bandung, belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan produk dan metode analisis.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit



dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Jejaring Kerja

Balai Besar POM di Bandung menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Bandung mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)*, Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), *Indonesia Criminal Justice System (ICJS)*, dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF)*, *World Health Organization (WHO)*, *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN References Laboratories (AFL)*, *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)*, dan *International Crime Police Organization Interpol*.

Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bersama tokoh masyarakat serta Iklan Layanan Masyarakat.



Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Transisi Pandemi Covid-19 ke Endemik

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat, Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakhiri pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan Juni 2020 dan mulai menerapkan tatanan new normal, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat alami peningkatan yang cukup tajam. Selama masa pandemik tersebut menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Bandung dapat turut berkontribusi dalam percepatan penanganan covid-19 dan menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan dalam masa pandemik-Covid-19 dengan membuat berbagai inovasi seperti layanan publik berbasis digital.

Namun pada awal tahun 2022, banyaknya tren indikator pengendalian pandemi yang terus menunjukkan ke hal yang positif, sehingga Indonesia sudah mulai bersiap-siap membuat langkah menuju ke arah endemik. Transisi endemik merupakan suatu proses dimana periode dari pandemik menuju ke arah endemik dengan sejumlah indikator, antara lain laju penularan harus kurang dari 1, angka *positivity rate* harus kurang dari 5%, kemudian tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari 5%, angka *fatality rate* harus kurang dari 3%, dan level PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Kondisi – kondisi ini harus terjadi dalam rentang waktu tertentu misalnya 6 bulan. Proses transisi itu sejalan dengan kebijakan pelonggaran-pelonggaran yang diputuskan pemerintah. Pelonggaran tersebut dilakukan antara lain dengan menurunkan level PPKM menjadi level 2, menghapuskan antigen dan PCR sebagai syarat melakukan perjalanan domestik menggunakan transportasi laut, darat maupun udara bagi masyarakat yang sudah vaksin hingga dosis ke-2. Dengan adanya transisi endemik, tugas pengawasan Obat dan Makanan akan lebih optimal, namun inovasi yang telah dibuat harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, banyak respon positif dari lintas sektor dan masyarakat terhadap inovasi khususnya layanan publik berbasis digital yang telah dilakukan di masa pandemik Covid 19. Hal ini, menjadi peluang



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

sekaligus tantangan bagi BBPOM di Bandung untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.



LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG



**TRIWULAN III
TAHUN 2022**



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

**2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN
2022**

2.5 METODE PENGUKURAN



2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024. Selain itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Berdasarkan hasil reviu ***Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024***, karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM. Visi, Misi dan Tujuan BPOM masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

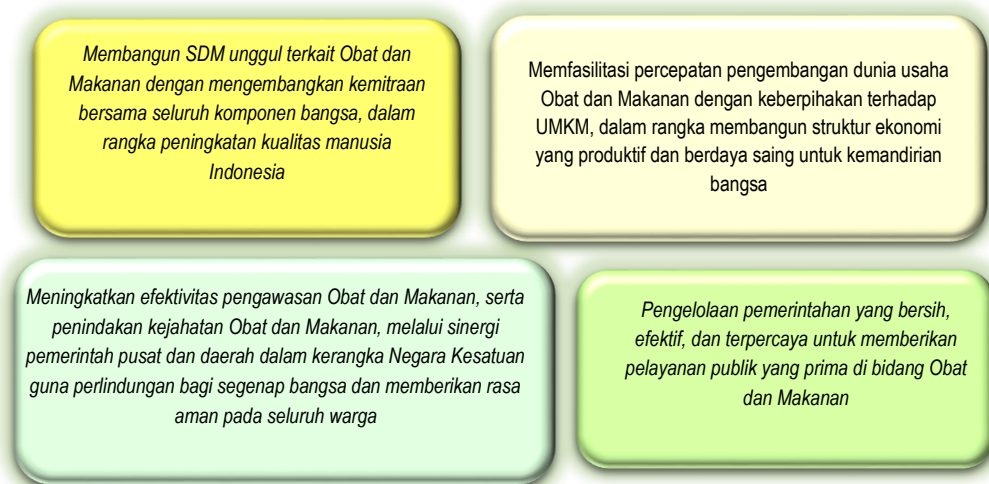


MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Bandung sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan i

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut:



Gambar 2.1 Misi Balai Besar POM di Bandung 2020-2024



SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Bandung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Bandung yang berdasarkan hasil reviu dirubah menjadu sebagai berikut



Gambar 2.2 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Bandung

Sumber: Konsensus BPOM



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1
Perubahan
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Bandung
Tahun 2020-2024**

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97	97.5	98	98.5
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	82	84	86
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	95	95.5	96	94
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70	72	74	76
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat						70	72	74	76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	71	74	77	80
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	91.1	92.3	93.4	94.6
8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	77.83	80.22	82.62	85.01
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92	89,50	90,50	91,00	92,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	96	97	98	99
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85	64	71	78	85
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	88	91	94	97



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	57	61	66	70
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	74	76	78	80
15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar						-	77	79	81
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	92	93.8	95.7	97.6
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	42	76	112	150
19. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	19	28	37	47
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	100	100	100	100
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	100	100	100	100
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	65	67	69	71
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal									
24. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	82.8	83.8	84.8	85.8
25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	83	85.5	88	90.5
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	79	80	81	82
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	79	84	89	94
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2.25	2.5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95.1	95.3	95.6	95.9
30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	-	-	-



2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandung Nomor. HK.02.02.103.1031.06.20.1060B tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Bandung
Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat		97.5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		95.5
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		72
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		72
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		74
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		92.3
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		80.22
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung		90.50
4.	Meningkatnya efektivitas	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana		97

**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	produksi dan distribusi yang dilaksanakan		
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		71
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		91
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		61
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		76
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung		4,45
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik		77
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		93.8
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		76
		19. Jumlah desa pangan aman		28
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		13
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		67
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung		83.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung		85.5
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung		80
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		84
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal		2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung		95.3
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung		-



2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2022, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan RKT Tahun 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 59.824.775.000.

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandung
Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76

**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(5)
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4.45
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		19. Jumlah desa pangan aman	28
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	83.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.5
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.3
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	-

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Anggaran (Menjadi)

Rp. 59.824.775.000,-



2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Tahun 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	727.971.420,-
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%	82%	82%	82%	82%	82%	436.247.500,-
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	375.015.580,-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%	72%	72%	72%	72%	72%	234.902.500,-
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				72%	72%	72%	80.526.000,-
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu					74	45.712.000,-	
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					92.3	204.200.000,-	
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan					80.22	30.720.000,-	
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung					90.50	25.202.500,-	
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97%	97%	97%	97%	97%	97%	267.880.000,-
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71%	71%	71%	71%	71%	71%	390.262.000,-
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91%	91%	91%	91%	91%	91%	988.636.000,-
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	61%	61%	61%	61%	61%	61%	745.414.000,-



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		memenuhi ketentuan							
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76%	76%	76%	76%	76%	76%	1.236.470.000,-
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung						4,45	25.202.500,-
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	30	36.67	63.33	70	93.33	77	624.875.000,-
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	8.549.580.000,-
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	20%	44%	70%	82%	76	977.871.000,-
		19. Jumlah desa pangan aman	25%	65%	85%	95%	100%	28	1.190.726.000,-
		20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas	20%	40%	90%	90%	90%	13	359.627.000,-
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	80%	90%	100%	618.228.000,-
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	80%	90%	100%	204.009.000,-
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	28%	41%	58%	61%	64%	67%	1.455.307.000,-
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di bandung						83,8	4.322.083.000,-
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung						85.5	340.780.000,-
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung						80	25.028.978.000,-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP						84	9.624.790.000,-
		28. Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	398.285.000,-
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	23.7	47.4	71.1	79	86.9	95.3	315.274.000,-
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung							



2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM** % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.



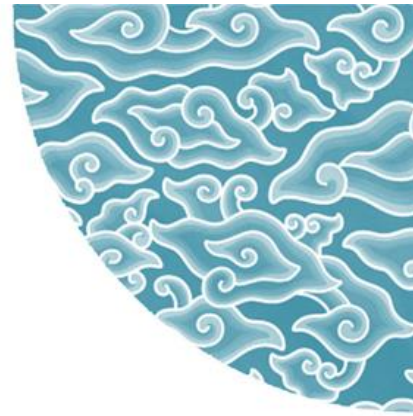
**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.5
KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

KRITERIA	CAPAIAN	KETERANGAN	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$X < 80\%$	Merah	Tidak Efektif





LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG

**TRIWULAN III
TAHUN 2022**

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA







- 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- 3.2 REALISASI ANGGARAN**

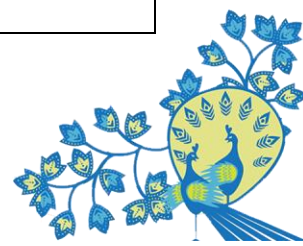




3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2022 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada triwulan III tahun 2022 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	103.69	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF
2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	101.92	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	87.31	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	 KURANG EFEKTIF
5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	99.01	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	 KURANG EFEKTIF
6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	99.54	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	 KURANG EFEKTIF
7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	128.55	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	

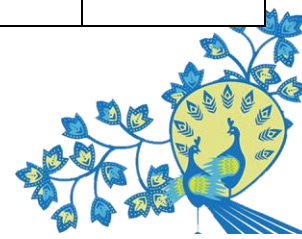


SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	128.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	104.13	MEMENUHI EKSPEKTASI	 EFEKTIF

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

**TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW III	KRITERIA CAPAIAN	EFEKTIVITAS
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	97.50%	97.50%	88.19%	90.45%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00%	82.00%	87.77%	107.03%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50%	95.50%	86.99%	91.09%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00%	72.00%	82.27%	114.26%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00%	72.00%	83.23%	115.59%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN						103.69%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu	6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan	74,00	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	



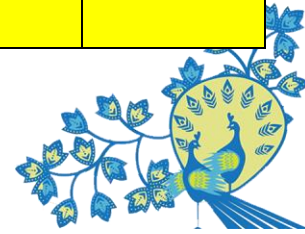
**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW III	KRITERIA CAPAIAN	EFEKTIVITAS
	Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	aman dan bermutu						
NILAI PENCAPAIAN SASARAN						-		
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
		9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	90.50	90.50	92.24	101.92%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN						101.92%
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	97.00%	97.00%	46.57%	48.01%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00%	71.00%	33.12%	46.65%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00%	91.00%	76.68%	84.26%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	61.00%	61.00%	54.98%	90.14%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW III	KRITERIA CAPAIAN	EFEKTIVITAS
		memenuhi ketentuan						
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00%	76.00%	82.67%	108.77%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.45	4.45	4.67	104.94%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00%	63.33%	81.33	128.43%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				87.31%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.80	93.50	99.68%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76	Progress 44.00%	Progress 71.31%	162.07%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
		19. Jumlah desa pangan aman	28	Progress 85.00%	Progress 61.22%	72.02%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
		20. Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	13	Progress 90.00%	Progress 56.04%	62.27%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				99.01%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	70.00%	72.50%	103.56%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	70.00%	66.86%	95.52%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW III	KRITERIA CAPAIAN	EFEKTIVITAS
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				99.54%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,00%	58,00%	74.56%	128.55%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				128.55%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	83.80	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.50	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-		
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80.00	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-		
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00%	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25	2.25	2.88	128.00%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				128.00%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.30	71.10	74.03	104.13%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				104.13%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Pada triwulan III tahun 2022, terdapat tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria memenuhi ekspektasi, tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, dan dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria



tidak dapat disimpulkan, serta tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Bandung pada triwulan III Tahun 2022 berdasarkan *Perspective Balance Score Card* sebesar 77, dengan rincian Nilai Kinerja *Stakeholder Perspective* (69); Nilai Kinerja *Internal Process Perspective* (104) dan Nilai Kinerja *Learning and Growth Perspective* (58), secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut:

TABEL 3.3
NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD
TRIWULAN III TAHUN 2022

PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	NILAI PENCAPAIAN PERSPECTIVE
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>	1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	103.69	69
	2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	
	3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	101.92	
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>	4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	87.31	104
	5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	99.01	
	6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	99.54	
	7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	128.55	
<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>	8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	-	58
	9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	-	
	10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	128.00	
	11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	104.13	
NILAI KINERJA ORGANISASI			77

Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini



**SASARAN
KEGIATAN
KE-1**

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG
MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM
DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **103,69%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

**TABEL 3.4
KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.50%	88.19%	90.45%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82.00%	87.77%	107.03%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	95.50%	86.99%	91.09%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	72.00%	82.27%	114.26%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00%	83.23%	115.59%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			103.69%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2022. Kriteria Obat Tidak

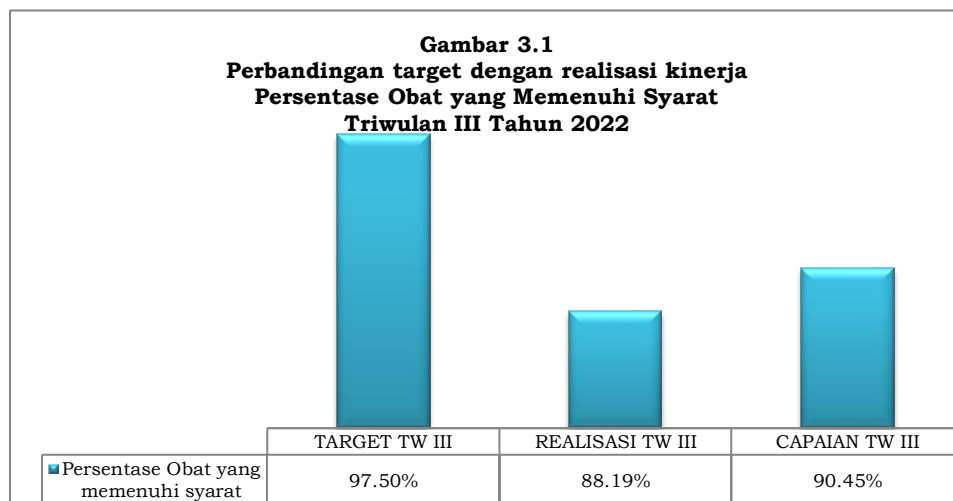


Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

**TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.50%	88.19%	90.45%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

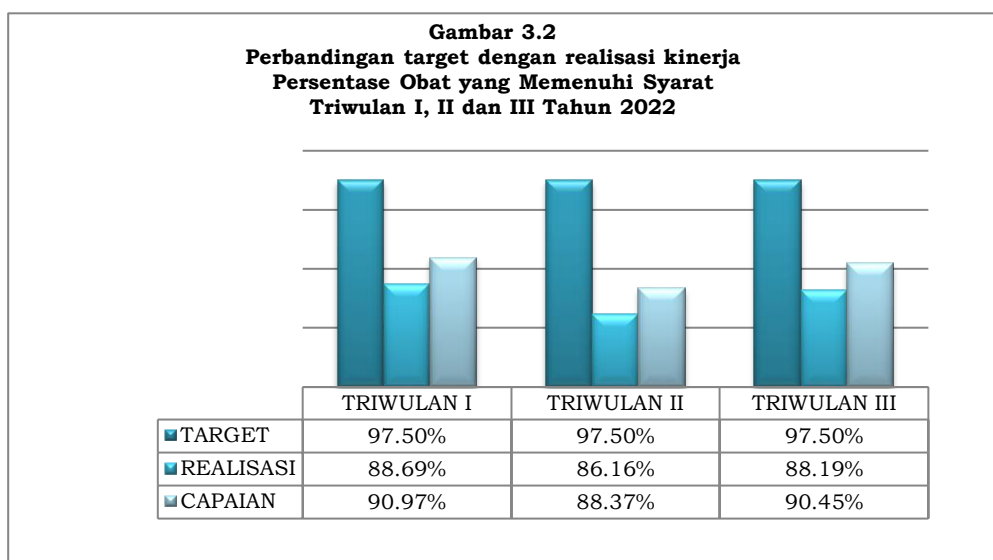


Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 97,50%. Sebanyak 1389 sampel acak telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 1225 sampel memenuhi syarat, 164 sampel yang tidak memenuhi syarat. Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 88,19%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **90,45%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 97,50% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 sebesar 88,69% (triwulan I), 86,16% (triwulan II) dan 88,19% (triwulan III). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (90,97%), triwulan II (88,37%), dan triwulan III (90,45%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan III meningkat sebanyak 2,08% dibandingkan pada triwulan II. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.2.



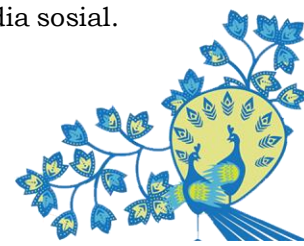
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 97,50%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 90,45%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Peningkatan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan III tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☛ Kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan dengan hasil sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III tahun 2022, capaian kerjanya sebesar 90,14%.
- ☛ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial.



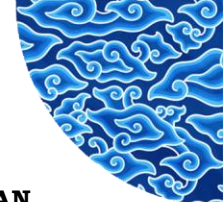
KIE dilaksanakan melalui media sosial berupa infografis tentang Obat dan, media elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat tentang Obat dan Makanan. Disamping itu juga KIE juga dilakukan melalui media transportasi.

- ☪ Sampai Triwulan III hasil pengujian Obat yang TMS sebanyak 164 sampel, yang terdiri dari 149 sampel TMK Penandaan dan 15 sampel TMS Mutu Pengujian. TMK Penandaan terdiri dari 86 sampel kosmetika, 11 sampel suplemen kesehatan, 51 sampel obat tradisional, dan 1 sampel kuasi. TMS Mutu pengujian terdiri dari 11 sampel obat tradisional dengan parameter uji identifikasi BKO (Efedrin dan Pseudoefedrin), kadar air, mikrobiologi (ALT dan AKK); 2 sampel kosmetik dengan parameter uji PK Metanol dan parameter uji mikrobiologi (ALT), 1 sampel Suplemen Kesehatan dengan parameter uji kadar etanol dan 1 sampel obat dengan parameter uji pemerian. Sampel Obat Tradisional yang Tanpa Izin Edar sebanyak 5 sampel dan tidak dilakukan pengujian.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain:

- ☪ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat, Dana Alokasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, Narasumber dan pengawasan bersama.
- ☪ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat, *Publik Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram dan twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan radio. Melaksanakan KIE Bersama lintas sektor (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat).
- ☪ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, masyarakat tentang Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pembinaan juga dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai cek klik.
- ☪ Melakukan patroli Siber terhadap peredaran Obat, Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar/ tidak memenuhi standar yang beredar di wilayah BBPOM di Bandung. Tindak lanjut patroli siber berupa penelusuran terhadap alamat dari akun di market place dan melakukan take down terhadap akun di market place yang menjual Obat, Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar/ tidak memenuhi standar.





E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

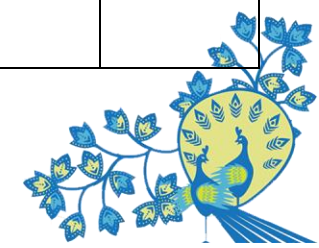
- ☰ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian. Pemeriksaan
- ☰ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Sampai dengan triwulan III tahun 2022 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 311 sarana.
- ☰ Pada triwulan III, produk obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang dilakukan pengambilan sampel sebanyak 253 sampel, dari jumlah tersebut sebanyak 81 sampel dengan hasil evaluasi penandaan TMK. Dengan rincian sampel dengan TMK penandaan sebagai berikut, obat tradisional sebanyak 19 sampel, kosmetik sebanyak 55 sampel dan suplemen kesehatan sebanyak 7 sampel.
- ☰ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung dan daring maupun melalui media elektronik dan media sosial.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

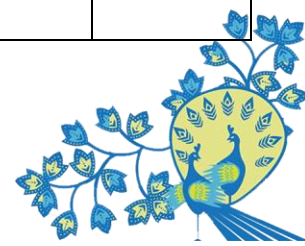
Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.6
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan III
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”**

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB. Dengan kondisi pandemi yang sudah menurun dengan tetap menjaga proses pencapaian target produksi selama triwulan IV dapat		Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan secara luring dan daring	Desember 2022



Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
	dioptimalkan dengan pemeriksaan secara luring			
b	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, diantaranya dengan pemantauan rutin CAPA yang masuk dan yang telah dievaluasi.	Dilakukan monitoring dan evaluasi CAPA yang masuk dan dilaporkan secara berkala. Telah dilakukan bimtek dan desk CAPA tanggal 26 Agustus 2022 untuk sarana puskesmas	Melaksanaan bimtek dan desk CAPA untuk sarana distribusi pangan dan kosmetik pada bulan Oktober dan untuk sarana produksi pangan pada bulan November 2022	Desember 2022
c	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.		Melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka	Desember 2022
d	Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Publik Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakan setiap bulan.		Melakukan penyebaran informasi terkait peraturan bagi pelaku usaha dan masyarakat, publik warning melalui subsite, media sosial, media luar ruang dan KIE melalui Program Warta POPA bulanan	Desember 2022
e	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.		Melakukan monev tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang disampaikan kepada instansi terkait	Desember 2022
f	Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.		Melakukan pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi administratif atau pidana terhadap sarana produksi atau distribusi yang memproduksi/mendistribusikan obat tanpa izin edar (TIE) melalui media sosial atau media elektronik	Desember 2022



G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PRESENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

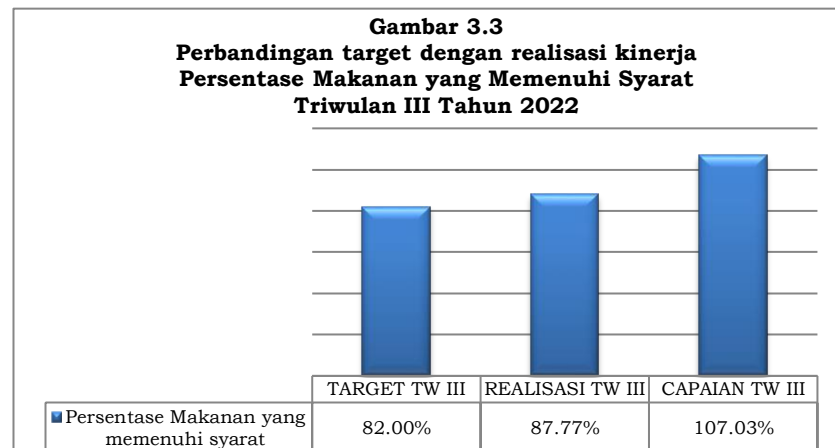
Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2022 dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6.

TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82,00%	87,77%	107,03%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

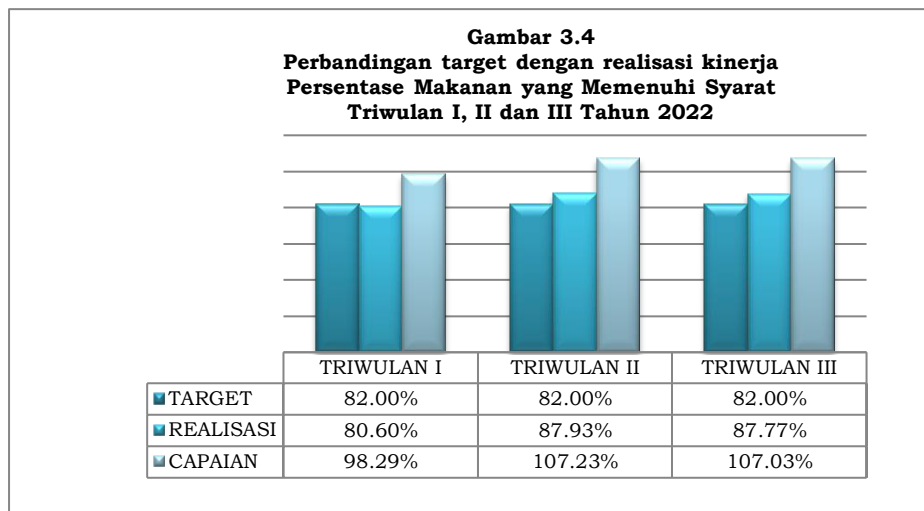


Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 82,00%. Realisasi pada triwulan III tahun 2022 sebesar 87,77%, dengan rincian 452 sampel memenuhi syarat dan 63 sampel tidak memenuhi syarat. Total sampel acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 515 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **107,03%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 82,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 sebesar 80.60% (triwulan I), 87,93% (triwulan II) dan 87,77% (triwulan III). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (98.29%), triwulan II (107,23%) dan triwulan III (107,03%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan III meningkat sebanyak 0,2% dibandingkan pada triwulan II. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.4.





C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 107,03%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kebahagiaan capaian kinerja indikator ini pada triwulan III tahun 2022 ini disebabkan oleh:

- ☰ Pada triwulan III produk pangan yang dilakukan pengambilan sampel sebanyak 515 sampel, dari jumlah tersebut sebanyak 65 sampel dengan hasil evaluasi penandaan TMK.
- ☰ Sampel acak yang telah disampling sampai Triwulan III adalah sebanyak 515 sampel.
- ☰ Sampai dengan triwulan III terdapat 63 sampel TMS hasil pengujian, dimana sebagian besar berasal dari sampel yang melebihi persyaratan parameter uji kimia dengan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi persyaratan, Kafein, HMF dan Enzim Diastase.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain:

- ☰ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui KIE yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial berupa infografis dan IG Live Kelom Geulis maupun elektronik berupa Iklan Layanan



Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan Radio serta SMS Blast tentang Obat dan Makanan.

- ☪ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☪ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☪ Penerapan sanksi pidana terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan makanan Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Sanksi ini berkaitan dengan pelanggaran Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar antara lain melalui kegiatan Operasi Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat prioritasnya.
- ☪ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Publik Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram dan Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan radio. Bekerjasama dengan stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat).

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

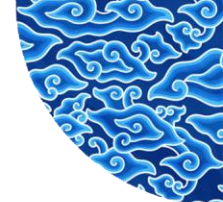
Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☪ Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh Balai Besar POM di Bandung meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD, Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sampai dengan triwulan III tahun 2022, jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 191 sarana.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:





TABEL 3.8
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”

Rekomendasi		Tindaklanjuti		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Publik Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan radio.		1) Melaksanakan 2 program talkshow mengenai Pengawasan Obat dan Makanan bersama Radio 2) Talkshow melalui Instagram live "Kelom Geulis"	Desember 2022
b	Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.		1) Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan saat pemeriksaan rutin atau verifikasi CAPA 2) Melakukan bimbingan teknis dan desk CAPA terhadap sarana produksi pangan olahan terkait pemenuhan CPPOB	Desember 2022
c	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.		1) Melakukan pengawasan sarana distribusi pangan pada kegiatan inspeksi rutin, intensifikasi pangan dan penelusuran kasus/ pengaduan 2) Melakukan bimbingan teknis dan desk CAPA terhadap sarana distribusi pangan olahan terkait pemenuhan CPerPOB	Desember 2022
d	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.	Kolaborasi dengan Ditwas Peredaran Pangan Olahan melaksanakan Desk Penilaian Mandiri Dinas Kesehatan Kabupaten Kota pada tanggal 3-4 Oktober 2022.	Hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Pangan yang disampaikan kepada instansi terkait	Desember 2022

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

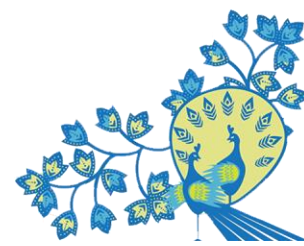


3. PRESENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

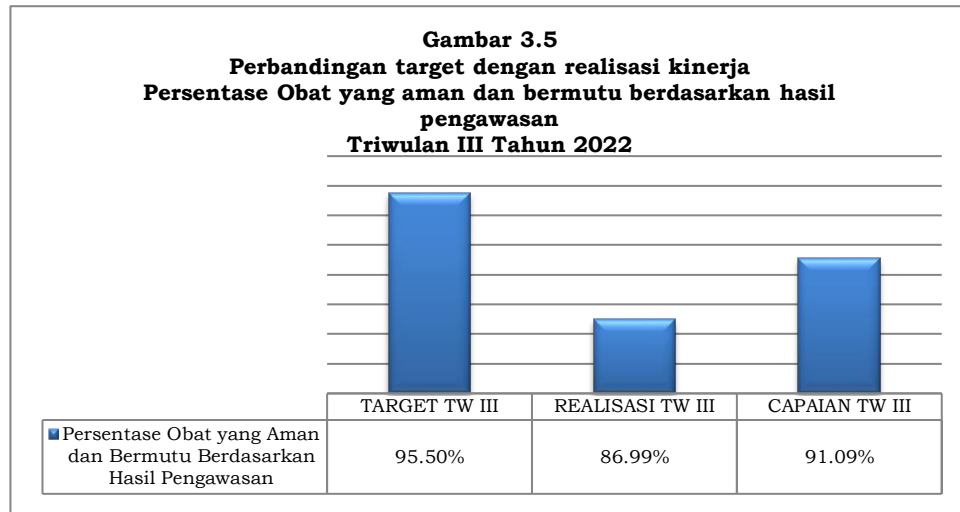
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji tahun 2022. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2022. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka., Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.9.

TABEL 3.9
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PRESENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50%	86.99%	91.09%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

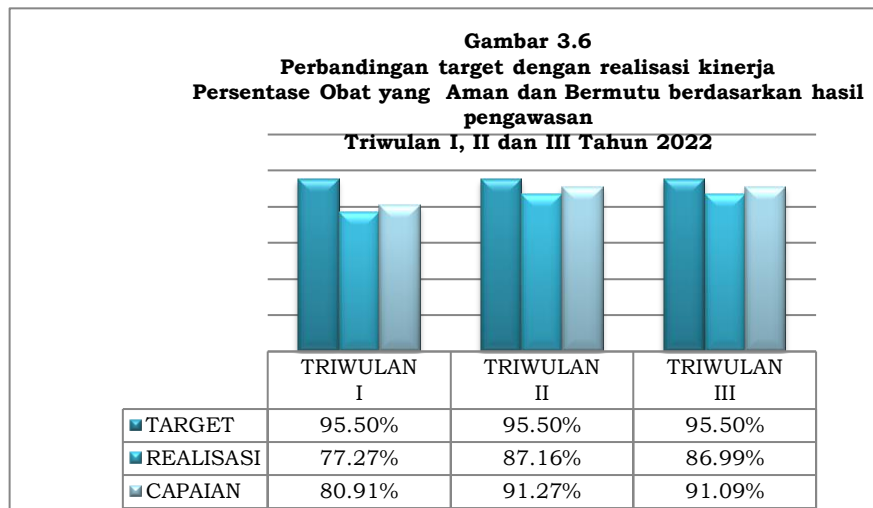


Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 95.50%. Sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 492 sampel dengan rincian sebanyak 428 sampel memenuhi syarat dan 64 sampel tidak memenuhi syarat, sehingga persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh sebesar 86.99%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **91.09%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95,50% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 sebesar 77.27% (triwulan I), 87,16% (triwulan II) dan 86.99% (triwulan III). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (80.91%), triwulan II (91,27%) dan triwulan III (91,09%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan III menurun sebesar 0,18% dibandingkan pada triwulan II. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.6.





C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 95,50%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 91,09%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan III tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☛ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling.
- ☛ Sampai Triwulan III dari 492 sampel yang diperiksa dan diuji terdapat 49 sampel yang TMK Penandaan, yang berasal dari 30 sampel kosmetika, 14 sampel Obat Tradisional, 2 sampel Suplemen Kesehatan, dan 3 sampel kuasi. Sampel Obat yang tidak memenuhi syarat dari hasil pengujian sebanyak 15 sampel yang berasal dari 2 sampel Obat, 11 sampel Obat Tradisional dan 2 sampel Kosmetika.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain:

- ☛ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Publik Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.



- ✎ Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ✎ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE)/ tidak memenuhi standar yang dilarang beredar. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

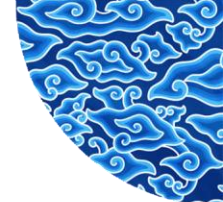
Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ✎ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, dilakukan sesuai perencanaan pada triwulan III. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- ✎ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Sampai dengan triwulan III tahun 2022 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 120 sarana.
- ✎ Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Sampai dengan triwulan III tahun 2022 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 1077 sarana.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

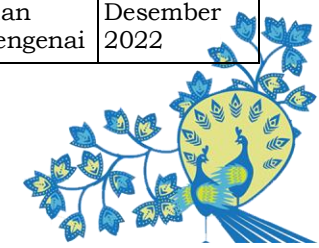
Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:





TABEL 3.10
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB. Dengan kondisi pandemi yang sudah menurun dengan tetap menjaga proses pencapaian target produksi selama triwulan IV dapat dioptimalkan dengan pemeriksaan secara luring		Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan secara luring dan daring	Desember 2022
b	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, diantaranya dengan pemantauan rutin CAPA yang masuk dan yang telah dievaluasi.		Laporan Monitoring dan Evaluasi CAPA secara berkala mingguan dan bulanan	Desember 2022
c	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.		Melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat, pemberian layanan informasi secara daring dan tatap muka	Desember 2022
d	Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Publik Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakan setiap bulan.		Melakukan penyebaran informasi terkait peraturan bagi pelaku usaha dan masyarakat, publik warning melalui subsite, media sosial, media luar ruang dan KIE melalui Program Warta POPA bulanan	Desember 2022
e	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.		1) Hasil pemeriksaan dan Evaluasi CAPA sarana produksi dan distribusi Obat disampaikan kepada instansi terkait 2) Koordinasi lebih intensif terkait kasus-kasus tertentu. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan sarana bersama	Desember 2022
f	Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau		Melakukan pembinaan dan penyebaran informasi mengenai	Desember 2022



Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.		penerapan sanksi administratif atau pidana terhadap sarana produksi atau distribusi yang memproduksi/mendistribusikan obat tanpa izin edar (TIE) melalui media sosial atau media elektronik	

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. PRESENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

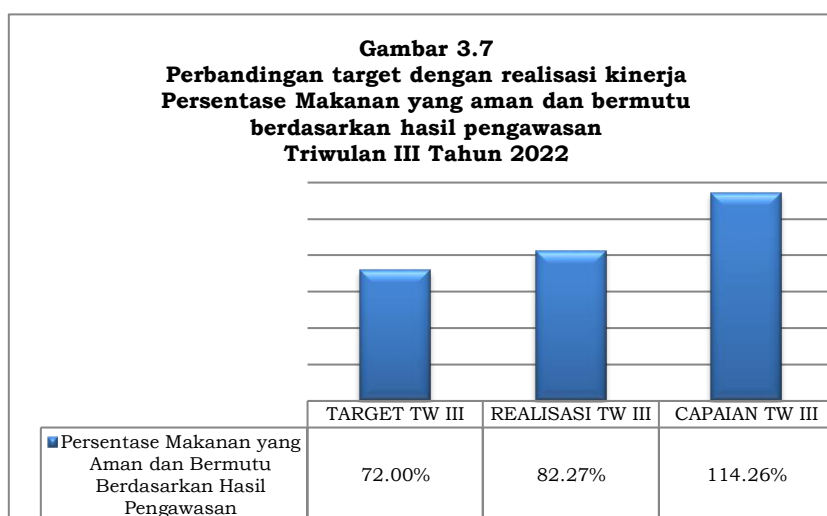
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.11.



TABEL 3.11.
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	72,00%	82,27%	114,26%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022



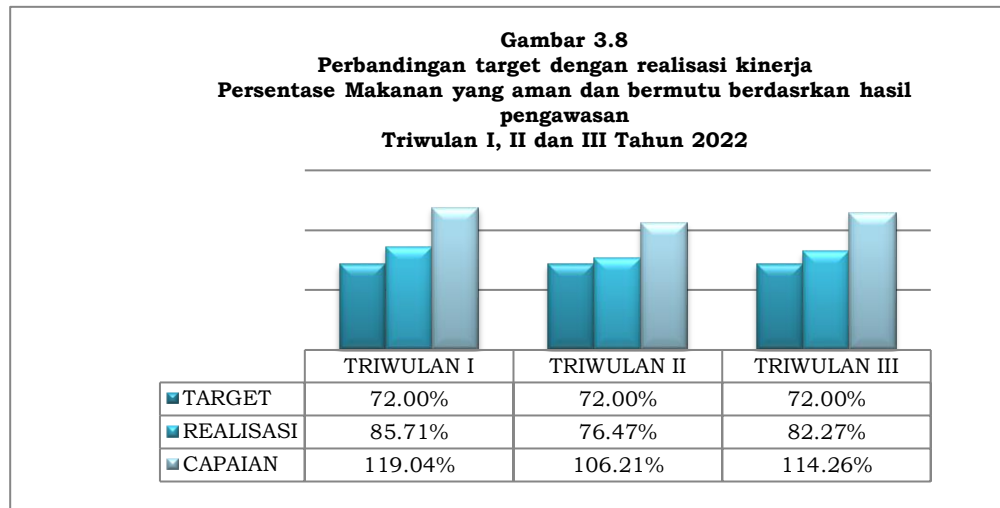
Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 72,00%. Persentase Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III tahun 2022 sebesar 82,27%, dengan rincian sebanyak 116 sampel targeted memenuhi syarat dan 25 sampel targeted tidak memenuhi syarat dari total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 141 sampel targeted. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **114,26%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 72,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 sebesar 85.71% (triwulan I), 76,47% (triwulan II) dan 82,27% (triwulan III). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap



target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (119.05%), triwulan II (106,21%) dan triwulan III (114,26%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan III meningkat sebanyak 8,05% dibandingkan pada triwulan II. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.7.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 72,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 114,26%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan III tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☰ Sampel targeted yang telah disampling sampai Triwulan III adalah sebanyak 141 sampel yang meliputi sampel PJAS, sampel kemasan, sampel kasus pemeriksaan, DNA porcine dan sampel UMKM.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain:

- ☰ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Publik Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui



media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

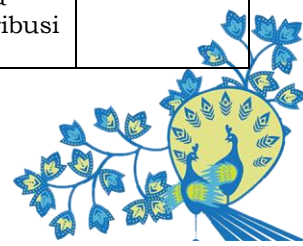
- ☛ Sampel targeted yang telah disampling sampai Triwulan III adalah sebanyak 141 sampel yang meliputi sampel PJAS, sampel kemasan, sampel kasus pemeriksaan, DNA porcine dan sampel UMKM.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.12
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”**

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung atau melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter adan Youtube. KIE melalui Webinar warta POPA dan Sosialisasi dalam rangka KIE Film Pendek bekerjasama dengan Pramuka.		1) Melaksanakan 2 program talkshow mengenai Pengawasan Obat dan Makanan bersama Radio, 2) Talkshow melalui Instagram live "Kelom Geulis"	Desember 2022
b	Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.		1) Pembinaan terkait syarat pemenuhan CPPOB dilakukan saat pemeriksaan rutin dan verifikasi CAPA 2) Pembinaan pada pelaku usaha produksi pangan berupa bimbingan teknis. Pelaksanaan bimtek direncanakan pada bulan November 2022	Desember 2022
c	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.		1) Pembinaan terkait syarat pemenuhan CPerPOB dilakukan saat pemeriksaan rutin dan verifikasi CAPA 2) Pembinaan pada pelaku usaha distribusi pangan berupa	Desember 2022



Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
		bimbingan teknis. Pelaksanaan bimtek direncanakan pada bulan Oktober 2022	
d	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.	1) Kerjasama dengan lintas sektor lebih intens terkait hasil pengawasan sarana produksi khususnya produk PIRT dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota penerima DAK maupun non DAK. 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan ditembuskan kepada pemerintah daerah sesuai dengan perizinan yang diterbitkan	Desember 2022

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

5. PRESENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

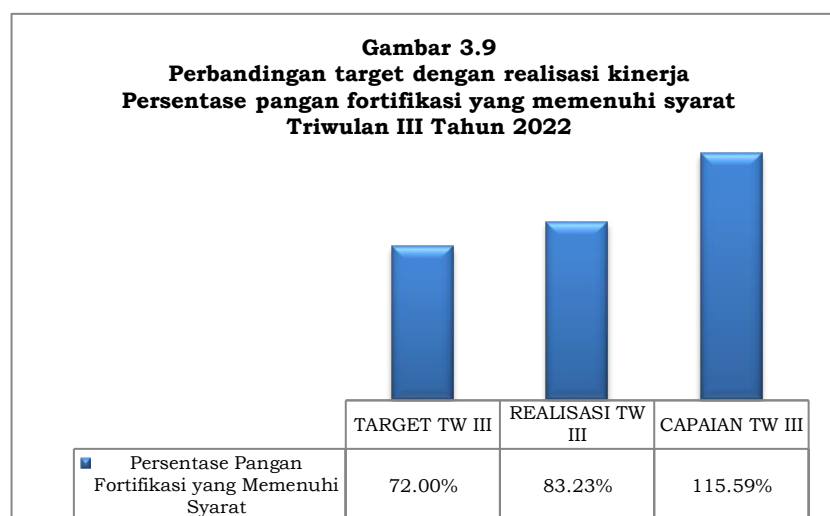
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.13.



TABEL 3.13.
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	72,00%	83,23%	115,59%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

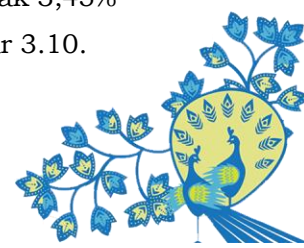
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

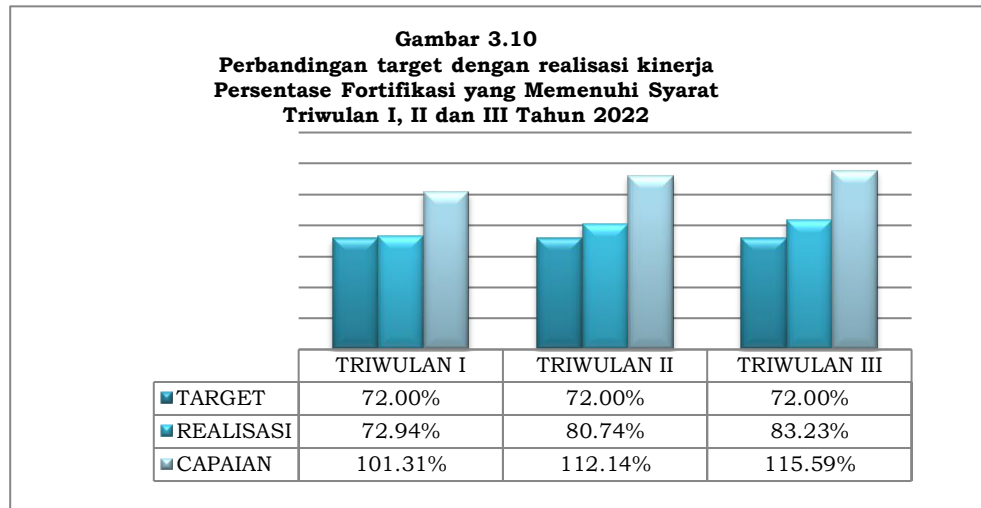


Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 72,00%. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 sebesar 83,23%, dengan rincian sebanyak 129 sampel pangan fortifikasi memenuhi syarat dan 26 sampel fortifikasi tidak memenuhi syarat dari total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 155 sampel pangan fortifikasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **115,59%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 72,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 sebesar 72,94% (triwulan I), 80,74% (triwulan II), dan 83,23% (triwulan III). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (101,31%), triwulan II (112,14%), dan triwulan III (115,59%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan III meningkat sebanyak 3,45% dibandingkan pada triwulan II. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.10.





C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 72,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 115,59%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebahagiaan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan II tahun 2022 disebabkan antara lain :

- ☛ Pada triwulan III tahun 2022 hasil pengujian sampel makanan yang TMS sebagian besar berasal dari sampel fortifikasi garam beryodium, yaitu sebanyak 23 sampel mengandung KIO₃ yang substandard. Akan tetapi sampel fortifikasi secara keseluruhan yaitu sampel tepung terigu dan minyak goreng sawit terjadi peningkatan sampel memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penambahan fortifikan yang memenuhi standar.
- ☛ Belum terpenuhinya GMP sarana produksi garam, dimana sebagian besar sarana produksi garam masih merupakan UMKM.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain:

- ☛ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan, terutama sarana produksi garam terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.



- ☰ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Publik Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

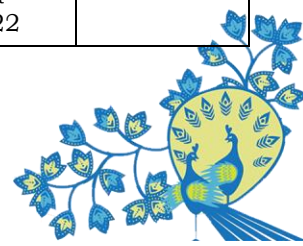
- ☰ Meningkatnya pemahaman dari pelaku usaha tentang aspek CPPOB serta kesadaran untuk mempertahankan pemenuhan aspek CPPOB tidak hanya pada saat di inspeksi namun sudah menjadi kebijakan yang harus ditaati sarana produksi.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.14
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“PERSENTASE FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”**

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.		Pembinaan pada produsen pangan yang memproduksi pangan fortifikasi dilakukan saat pemeriksaan sarana baik rutin maupun verifikasi CAPA. Pembinaan dan pendampingan untuk pemenuhan CPPOB dilakukan secara bertahap	Desember 2022
b	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.	Pembinaan kepada distributor minyak goreng fortifikasi di pasar tradisional pada bulan April 2022	Pembinaan pelaku usaha distribusi pangan untuk menerapkan CPerPOB. Pembinaan berupa bimbingan teknis kepada sarana distribusi pangan olahan untuk menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) direncanakan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2022	Desember 2022



Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
c	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.	Kolaborasi dengan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan, Dinas Perikanan dan Koperasi Garam dalam pembinaan pelaku usaha garam di Karawang, Kota Cirebon dan Indramayu pada Bulan Juni 2022	Terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan pembinaan sarana produksi dan distribusi pangan fortifikasi	Desember 2022
a	Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.		Pembinaan pada produsen pangan yang memproduksi pangan fortifikasi dilakukan saat pemeriksaan sarana baik rutin maupun verifikasi CAPA. Pembinaan dan pendampingan untuk pemenuhan CPPOB dilakukan secara bertahap	Desember 2022
b	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.	Pembinaan kepada distributor minyak goreng fortifikasi di pasar tradisional pada bulan April 2022	Pembinaan pelaku usaha distribusi pangan untuk menerapkan CPerPOB. Pembinaan berupa bimbingan teknis kepada sarana distribusi pangan olahan untuk menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) direncanakan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2022	Desember 2022
c	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.	Kolaborasi dengan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan, Dinas Perikanan dan Koperasi Garam dalam pembinaan pelaku usaha garam di Karawang, Kota Cirebon dan Indramayu pada Bulan Juni 2022	Terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan pembinaan sarana produksi dan distribusi pangan fortifikasi	Desember 2022

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN
KEGIATAN
KE-2**

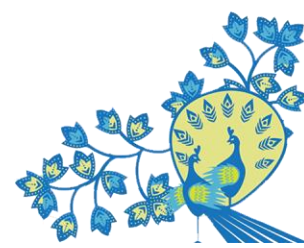
**MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT
TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN
MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: (1) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; (2) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan; dan (3) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Interpretasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

TABEL 3.15
KATEGORI INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX)
TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

SKOR	INTERPRESTASI
≤ 45,00	TIDAK BAIK
45,01 - 60,00	KURANG BAIK
60,01 - 75,00	CUKUP BAIK
75,01 - 90,00	BAIK
≥ 90,01	SANGAT BAIK



**SASARAN
KEGIATAN
KE-3**

**MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI
BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan Inspektorat Utama Badan POM. Pada triwulan II, hanya 1 (satu) indikator yang telah dilakukan pengukuran yaitu : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 101,92% dengan kriteria Baik. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.16.

**TABEL 3.16
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-3
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	90.50	92,24	101,92%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			101,92%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:



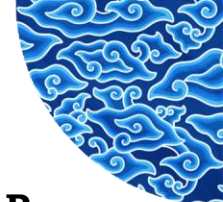
1. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: (1). Aspek bimbingan dan pembinaan; (2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; (3). Aspek penanganan saran dan masukan; (4). Aspek manfaat; (5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; dan (6). Aspek pengetahuan dan pemahaman.

2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: (1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*); dan (2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.





3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut:

TABEL 3.17
NILAI KONVERSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

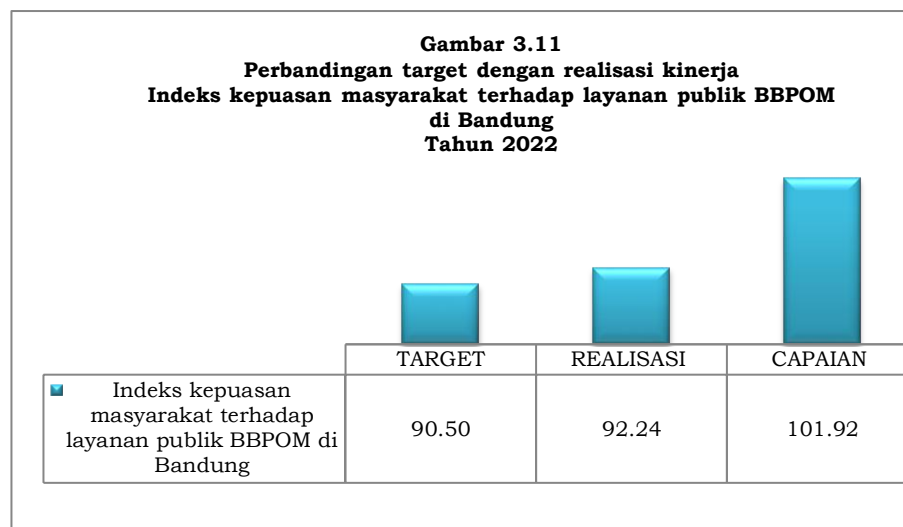
Berdasarkan Surat Inspektorat Utama Badan POM Nomor B-PI.06.07.7.71.06.22.87 TANGGAL 29 Juni 2022 perihal Permintaan Pemutakhiran Data Perkembangan Tindaklanjut Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 dan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022, diperoleh Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Balai Besar POM di Bandung sebesar 92,24. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.12.

TABEL 3.18
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK
BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	90.50	92,24	101,92%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022



Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,50. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung sebesar 92,24. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 101,92% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebahagiaan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☰ Seluruh kegiatan pelayanan publik BBPOM di Bandung mengacu pada peraturan yang berlaku, selain itu dilakukan upaya peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik.
- ☰ Berbagai inovasi pelayanan publik telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik BBPOM di Bandung.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☰ Focus Grup Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan setiap tahun.
- ☰ Berbagai inovasi pelayanan publik.
- ☰ Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik BBPOM di Bandung

D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:



TABEL 3.19
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM”

	Rekomendasi	Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	Telah disusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
b	Melaksanakan seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.	Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Desember 2022
c	Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.		Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Desember 2022

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

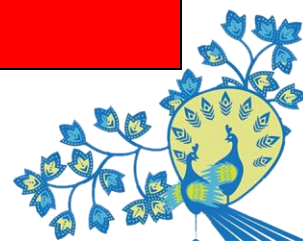
**SASARAN
KEGIATAN
KE-4**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN
PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 7 (tujuh) indikator yang seluruhnya Merupakan indikator kinerja utama (IKU). Namun, terdapat 1 (satu) indikator yang akan diukur pada akhir tahun. Dari perhitungan keenam indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **87,31%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.14.

TABEL 3.14
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-4
TRIWULAN III TAHUN 2022

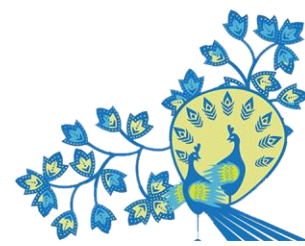
INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	97.00%	46.57%	48.01%	TIDAK MEMENUHI EKSPETASI	TIDAK EFEKTIF



INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00%	33.12%	46.65%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00%	76.68%	84.26%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00%	54.98%	90.14%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00%	82.67%	108.77%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.45	4.67	104.94%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	63.33%	81.33	128.43%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			87.31%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

1. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

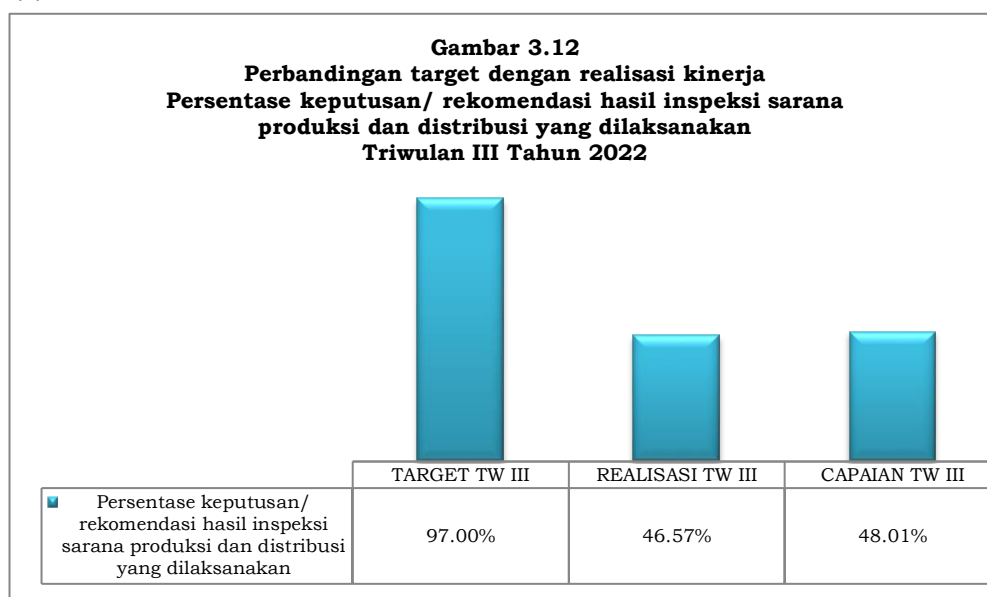
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n.



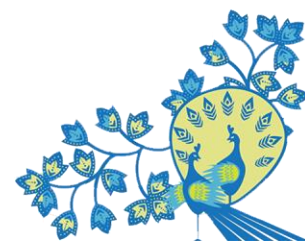
TABEL 3.20
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”
TRIWULAN III TAHUN 2022

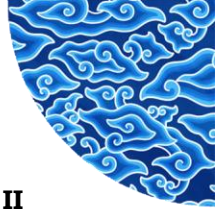
INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	97.00%	46.57%	48.01%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022



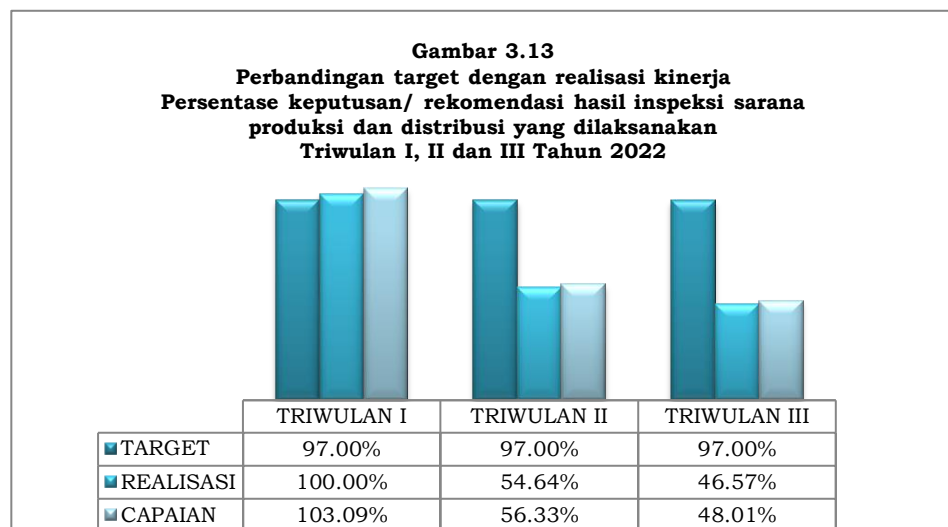
Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 97,00%. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2022 sebesar 46,57%. Dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 57,81%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 15,38%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebesar 30,09%; dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 82,98%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **48,01%** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.





B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN II TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 97,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 sebesar 100,00% (triwulan I), 54,64% (triwulan II), 46,57 (triwulan III). Jika capaian pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian pada triwulan I (103,09%), triwulan II (56,33%) dan 48,01% (triwulan III). Capaian pada triwulan III menurun sebanyak 55,08% dibandingkan pada triwulan I. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.13.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 97,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 48,01% dengan kriteria Tidak memenuhi ekspektasi.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan III tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☛ Respon dari stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan menurun



- ☸ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan mengalami kendala terkait ketertelusuran dokumen
- ☸ Pemeriksaan terkait sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika belum ada respon terkait tindak lanjut kesarana seperti IOT sebanyak 8 sarana dari 18 sarana, Kosmetik sebanyak 6 sarana dari 31 sarana, Suplemen Kesehatan 4 sarana dari 8 sarana, Importir/BUPN Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tidak ada respon dari 55 sarana

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☸ Pengumpulan dan pengolahan data agar dibuat sebuah sistem agar dapat menjamin integritas data
- ☸ Rekonsiliasi data oleh Petugas setiap awal bulan.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- ☸ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☸ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

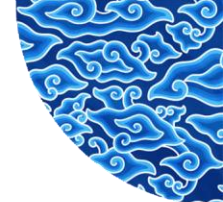
Berikut adalah kegiatan yang menyebabkan penurunan pencapaian kinerja:

- ☸ Terdapat data yang belum diinput ke dalam aplikasi SIPT diantaranya adalah pemeriksaan sarana produksi dan distribusi bersama dengan pusat
- ☸ Frekuensi pemantauan tindak lanjut dari pemangku kepentingan dilakukan sebulan sekali dengan konsisten

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:





TABEL 3.21
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”

	Rekomendasi	Tindaklanjuti		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.		1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana ditembuskan kepada Pemerintah Daerah 2) Pemeriksaan sarana bersama pemerintah daerah untuk kasus-kasus tertentu	Desember 2022
b	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.		Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi secara berkala setiap bulan	Desember 2022

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

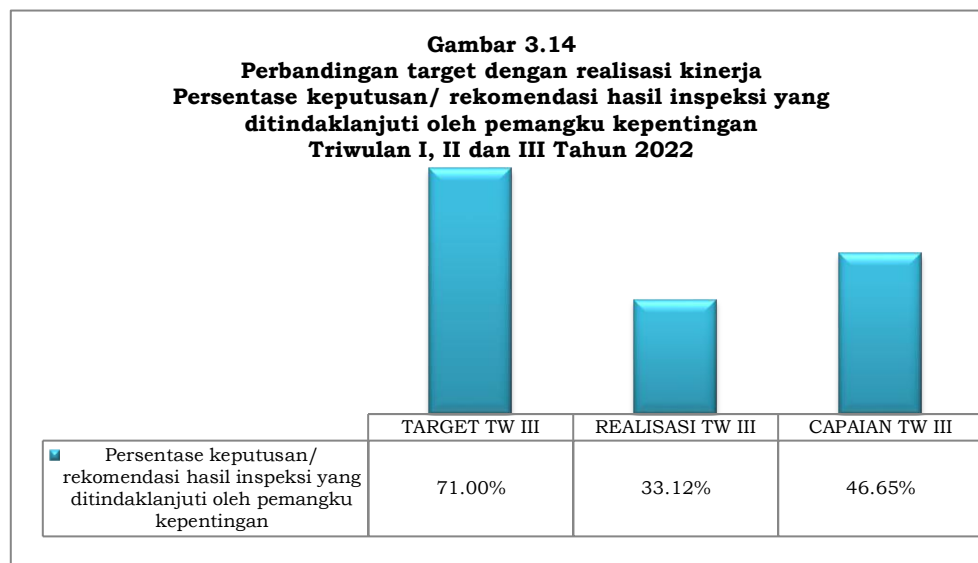
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d tahun berjalan.

TABEL 3.22
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00%	33.12%	46.65%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF



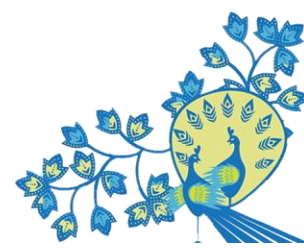
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

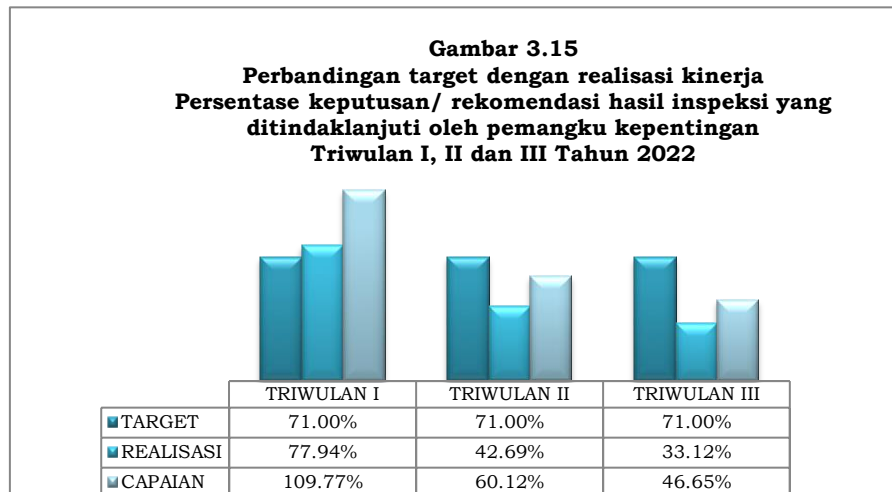


Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 71,00%. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan III sebesar 46,65%. Dengan rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 51,96% dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 14,29 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **46,65%** dengan kriteria **Tidak memenuhi ekspektasi (Tidak Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 97,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 sebesar 77,94% (triwulan I), 42,69% (triwulan II) dan 33,12% (triwulan III). Jika capaian pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian pada triwulan I (109,77%), triwulan II (60,12%) dan triwulan III (46,65%). Capaian pada triwulan II menurun sebanyak 49,65% dibandingkan pada triwulan I. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.15.





C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2021

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran tersebut adalah sebesar 71,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 46,65% dengan kriteria **Tidak memenuhi ekspektasi.**

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

KetidaKEBERHASILAN capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan III tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☰ Respon dari stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan meningkat
- ☰ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan belum maksimal.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☰ Pengumpulan dan pengolahan data sudah difasilitasi oleh Aplikasi Digital Monitoring Hasil Pemeriksaan (DMP), namun masih perlu disempurnakan kembali.
- ☰ Rekonsiliasi data oleh Petugas setiap awal bulan.



Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- ☰ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.
- ☰ Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung
- ☰ Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III sebagai berikut:

- ☰ Frekuensi pemantauan tindak lanjut dari pemangku kepentingan dilakukan sebulan sekali dengan konsisten
- ☰ Sangkuriang : Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada tanggal 26 Agustus 2022



Gambar 3.16. Kegiatan Sangkuriang

- ☰ Advokasi Pengawasan Pangan Fortifikasi ke Pemda Wilayah Sentra Pangan Fortifikasi dan Wilayah Prioritas Penurunan Stunting di Wilayah Jawa Barat tanggal 9 September 2022





Gambar 3.17. Advokasi Pengawasan Pangan

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.23
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”**

Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
a	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha		Melaksanakan pembinaan pada pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi sanksi administrasi. Pembinaan berupa bimbingan teknis kepada importir dan BUPN Kosmetik rencana dilaksanakan pada bulan Oktober 2022	Desember 2022
b	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.		Monitoring dan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan secara berkala	Desember 2022
c	Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.		Melakukan pertemuan dengan lintas sektor terkait untuk menyampaikan dan mengevaluasi hasil pengawasan Obat dan Makanan. Pertemuan dalam bentuk FGD terkait penyalahgunaan OOT dengan organisasi profesi direncanakan pada bulan Desember 2022	Desember 2022
d	Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung		Melakukan pembinaan saat pemeriksaan dan verifikasi atas CAPA yang disampaikan	Desember 2022



Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
e Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha		Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha	Desember 2022

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

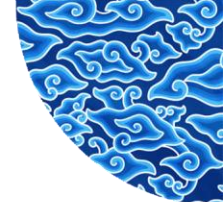
3. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Rekomendasi/keputusan/Izin penerapan CPPOB pendaftaran produk pangan pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; (5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (6). Rekomendasi Importir Kosmetik/Badan Usaha Pemberi Kontrak Kosmetik sebagai Pemohon Notifikasi; (7). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; (8). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; dan (9) Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

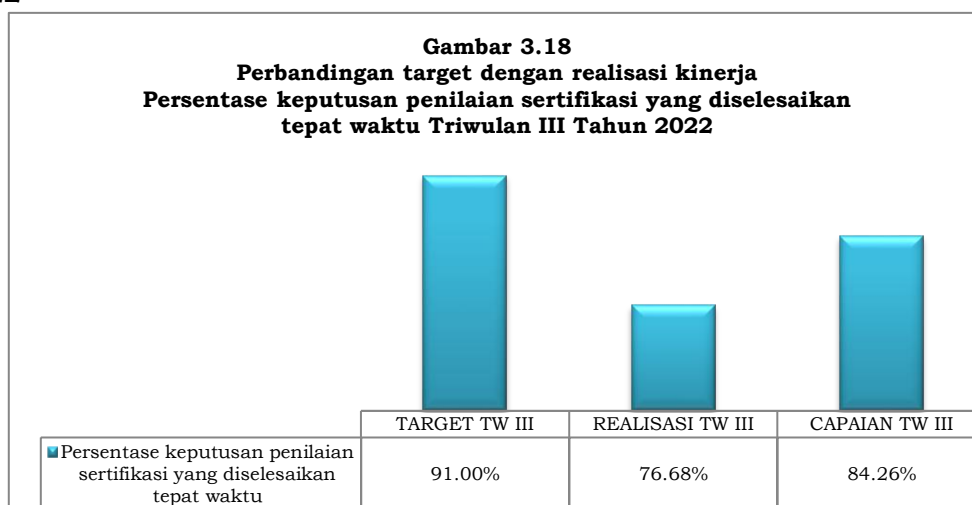
**TABEL 3.24
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00%	76.68%	84.26%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF





A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA `TRIWULAN III TAHUN 2022



Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 91%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III tahun 2022 sebesar 76,68%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 1177 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 1535 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **84,26 %** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

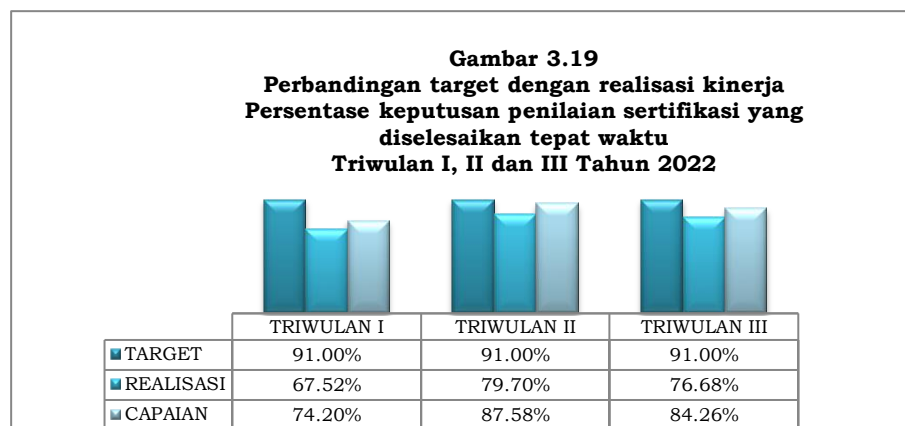
TABEL 3.25
HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI
SD TRIWULAN III TAHUN 2022

No.	Rekomendasi	Satuan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah permohonan	% Sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	504	514	98,05%
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	188	531	35,41%
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	485	490	101,03%
TOTAL			1177	1535	76,68%



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 sebesar 67,52% (triwulan I), 79,70% (triwulan II), dan 76,68% (triwulan III). Jika capaian pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian pada triwulan I (74,20%), triwulan II (87,58%) dan triwulan III (84,26%). Capaian pada triwulan II meningkat sebanyak 13,38% dibandingkan pada triwulan I, dan pada triwulan III menurun sebanyak 3,32%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.20.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III sebesar 76,68% dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 84,26%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan III tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- ☛ Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memudahkan pelaku usaha khususnya di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi persyaratan administrasi dalam rangka sertifikasi terkait perizinan usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga Online Single



Submission (OSS) berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Import (API).

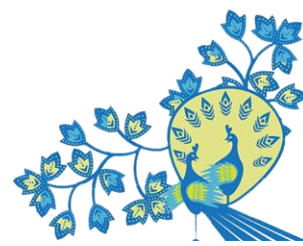
- ✎ Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang tahapan proses perizinan berusaha, termasuk proses perizinan yang berlaku di Badan POM. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam hal tata cara dan prosedur perizinan yang sebelumnya dilakukan secara manual, di tahun 2022 ini beralih ke sistem elektronik yang berlaku untuk semua komoditi baik obat tradisional, kosmetik maupun pangan.
- ✎ Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, mempercepat waktu pemenuhan (time line) dikeluarkannya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika. Terkait pelaksanaannya, permohonan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik ini berubah dari manual ke sistem elektronik melalui PB-UMKU di sistem/aplikasi OSS.
- ✎ Adanya kebijakan Badan POM dalam penerapan CPOTB bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB. Dalam hal pengajuan permohonannya pun kini berubah dari yang sebelumnya diajukan langsung di e-sertifikasi, saat ini masih di e-sertifikasi namun pendaftaran masuk melalui PB-UMKU di sistem/aplikasi OSS yang selanjutnya akan terhubung ke sistem/aplikasi e-esertifikasi.
- ✎ Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi izin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Badan POM No. 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik maka terdapat perubahan mekanisme dalam rangka pendaftaran pangan, yang sebelumnya pengajuan permohonan rekomendasi PSB melalui email ke UPT menjadi permohonan izin Penerapan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id sehingga diperlukan sosialisasi lebih detail kepada pelaku usaha terkait prosedur baru tersebut. Berdasarkan peraturan ini, rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan secara online dibagi berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko dari produk yang akan didaftarkan.



Pemeriksaan sarana yang sebelumnya merupakan syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mendapatkan rekomendasi, saat ini hal tersebut sudah tidak diberlakukan. Sesuai dengan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021, pemeriksaan sarana yang dilakukan di awal, hanya berlaku untuk perusahaan dengan skala menengah dan besar, sedangkan untuk perusahaan dengan skala usaha mikro dan kecil maka penilaian dilakukan melalui evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana dilakukan maksimal 1 (satu) tahun setelah terbit izin penerapan CPPOB. Perubahan tersebut menyebabkan makin tingginya pengajuan ijin penerapan CPPOB yang berasal dari skala usaha mikro kecil (70% dari total pengajuan yang masuk). Namun tingginya pengajuan tidak berkorelasi dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan, karena adanya gap kemampuan dari pelaku usaha mikro kecil untuk pemenuhan persyaratan ijin penerapan CPPOB ini, sehingga persentase capaian sertifikat yang diterbitkan tepat waktu masih rendah.

- ☪ Tidak seperti yang berlaku sebelumnya pada saat PSB, pemeriksaan terhadap sarana Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan (industri pangan dengan skala usaha menengah dan besar) ini dilakukan setelah dokumen panduan mutu yang disubmit di sistem/aplikasi e-sertifikasi dinyatakan lengkap terlebih dahulu, setelah itu petugas/evaluator dapat menjadwalkan pemeriksaan sarana.
- ☪ Pemahaman pelaku usaha terhadap dokumen yang harus disiapkan dan diupload di sistem/aplikasi e-sertifikasi sangat mempengaruhi proses penerbitan rekomendasi/izin penerapan CPOTB/CPKB/CPPOB. Dari hasil evaluasi dokumen yang telah dilakukan, sebagian besar dokumen yang disubmit masih belum lengkap sehingga para pelaku usaha tersebut membutuhkan waktu untuk melengkapi dokumen panduan mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan tersebut.
- ☪ Terbitnya PerBPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran sehingga mengubah pengajuan permohonan rekomendasi sarana distribusi untuk importir pangan yang sebelumnya diajukan ke UPT Balai Besar POM Di Bandung kini diajukan ke Badan POM melalui Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
- ☪ Terjadinya rotasi personel di lingkungan BBPOM di Bandung, sehingga perlu dilakukan pendampingan terlebih dahulu kepada personel baru yang rotasi ke Sub Poksi Sertifikasi. Hal ini berakibat pada penurunan kecepatan dalam melakukan pemeriksaan dokumen/sarana.

Dalam hal penerbitan rekomendasi Surat Keterangan Ekspor, capaiannya telah memenuhi target yang ditetapkan, karena didukung oleh hal-hal sebagai berikut:



- ☸ Keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi seluruh pelaku usaha khususnya terkait persyaratan dan prosedur sertifikasi baik melalui media elektronik dan nonelektronik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung.
- ☸ Adanya aplikasi e-bpom yang memfasilitasi layanan proses perizinan eksportasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung semakin stabil, selain itu kompetensi dan komitmen SDM evaluator yang tinggi sehingga dapat melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan dan memenuhi timeline yang telah ditetapkan.
- ☸ Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
- ☸ Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM Balai Besar POM di Bandung dalam kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah SDM sangat kurang dibandingkan dengan beban kerjanya.

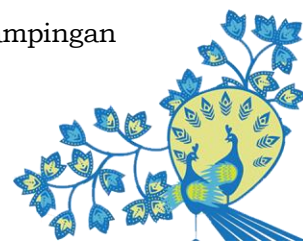
Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain:

- ☸ Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pendampingan oleh personel senior, pelatihan/*workshop*/bimtek/diseminasi/webinar mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ☸ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- ☸ Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- ☸ Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

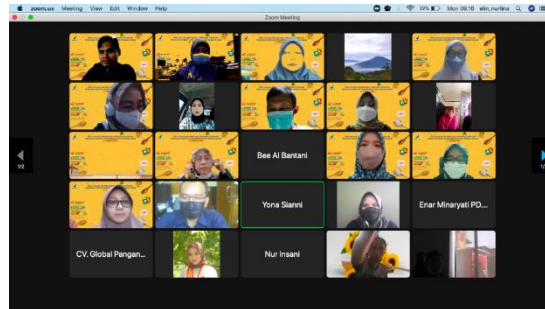
E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- ☸ Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan dengan cara membuat tabel monitoring surat masuk beserta progresnya.
- ☸ Pada tanggal 17 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan



UMK Pangan Olahan merupakan kegiatan yang ditujukan bagi pelaku usaha pangan yang sedang berproses dalam permohonan Izin Penerapan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id. Penyelenggaraan kegiatan Desk CAPA secara rutin sehingga kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CAPA-nya lebih diminimalisir hal ini berdampak pada pencapaian jumlah rekomendasi yang dikeluarkan semakin meningkat.



Gambar 3.20 Kegiatan Desk CAPA

- Pada tanggal 25-26 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA merupakan kelanjutan dari kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 17 Januari 2022. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan materi terkait Penerapan Prinsip CPPOB pada Industri/UMKM Pangan Olahan, Pendaftaran Akun dan Dokumen Panduan Mutu, Pemaparan Materi Panduan Mutu Butir 1 -10, Alur Proses Produksi dan Pengendalian Proses, kemudian dilanjutkan dengan Desk Akun E-Sertifikasi dan Desk Penyusunan SOP antara pelaku usaha dengan Evaluator.



Gambar 3.21 Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA

- Pada tanggal 15-16 Maret 2022 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang diikuti oleh 48 pelaku usaha yang telah diaudit PSB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan secara online oleh



petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 18 nomor izin edar (NIE) dan 10 akun perusahaan.



Gambar 3.22 Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

- Pada tanggal 19-20 April 2022 dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang diselenggarakan secara luring untuk 5 UMKM obat tradisional dan 5 UMKM kosmetik. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPOTB/CPKB dan persyaratan pendaftaran OT/Kos, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.



Gambar 3.23 Pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dalam acara Bimtek Pendampingan UMKM OT dan Kosmetik

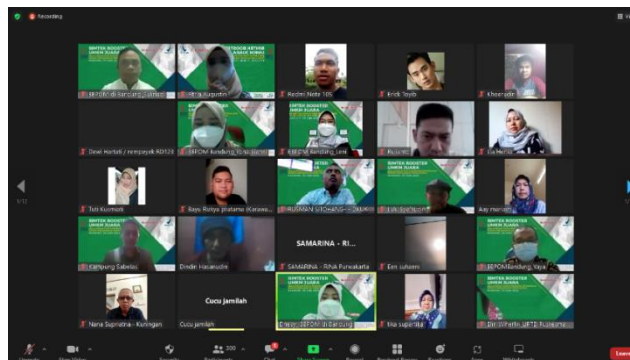


- Pada tanggal 18-19 Mei 2022 dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pangan Olahan yang diselenggarakan secara luring untuk 25 UMKM pangan olahan. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.



Gambar 3.24 Pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimtek Pendampingan UMKM Pangan Olahan

- Pada tanggal 2 Juni 2022, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat mengadakan Bimbingan Teknis Booster UMKM Juara yang merupakan tahap awal dari rangkaian Program Booster UMKM Juara yang merupakan kolaborasi BBPOM di Bandung dengan Pemda Propinsi Jawa Barat yaitu dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat.



Gambar 3.25 Bimtek Booster UMKM Juara

- Pada tanggal 5 Agustus 2022, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi Program Booster UMKM Juara secara daring. Pada kegiatan ini para UMK binaan diberikan materi terkait dokumen panduan mutu yang diperlukan dalam pemenuhan Cara Produk Pangan Olahan Yang Baik dan dijelaskan pula bagaimana cara penyusunan dokumen mutu tersebut.





Gambar 3.26 Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

- Pada tanggal 5 Agustus 2022 diadakan kegiatan Desk CAPA bagi para pelaku usaha yang sedang berproses untuk mendapatkan Izin Penerapan CPPOB.



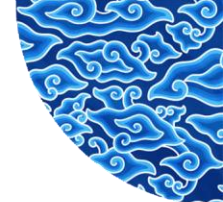
Gambar 3.27 Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

- Pendampingan/fasilitasi registrasi melalui online dengan fasilitator/petugas sertifikasi.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:





**TABEL 3.26
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”**

Rekomendasi	Tindaklanjuti			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
a	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha.	Dilakukan Desk CAPA kepada para pelaku usaha yang sedang berproses secara online atau onsite sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta untuk mempercepat waktu penyelesaian CAPA	Telah dilakukan sosialisasi izin penerapan CPPOB pada tanggal 2 Juni 2022 dan 5 Agustus 2022 secara daring Desk capa online dilakukan tanggal 5 Agustus 2022	Desember 2022
b	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Membuat tools untuk memudahkan monitoring dan evaluasi CAPA sehingga pemantauan evaluasi CAPA oleh petugas menjadi lebih terkendali	Melengkapi data yang harus diinput pada tools yang telah disediakan. Petugas melakukan monitoring CAPA secara mandiri dan menginput hasil monitoring pada tools yang telah disediakan	Desember 2022
c	Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun	Sudah dilakukan Monev sampai Triwulan III. Melakukan penginputan realisasi kinerja yang dimonitoring setiap bulan	Monev TW 4, melanjutkan rencana yang telah berjalan, dan melengkapi data yang harus diinput di link yang telah disediakan	Desember 2022

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

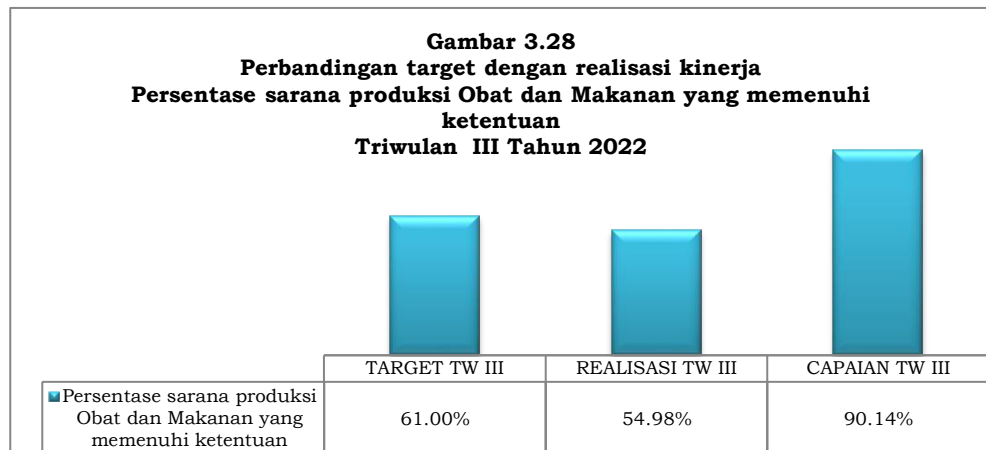
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun n dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun n.

**TABEL 3.27
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00%	54.98%	90.14%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

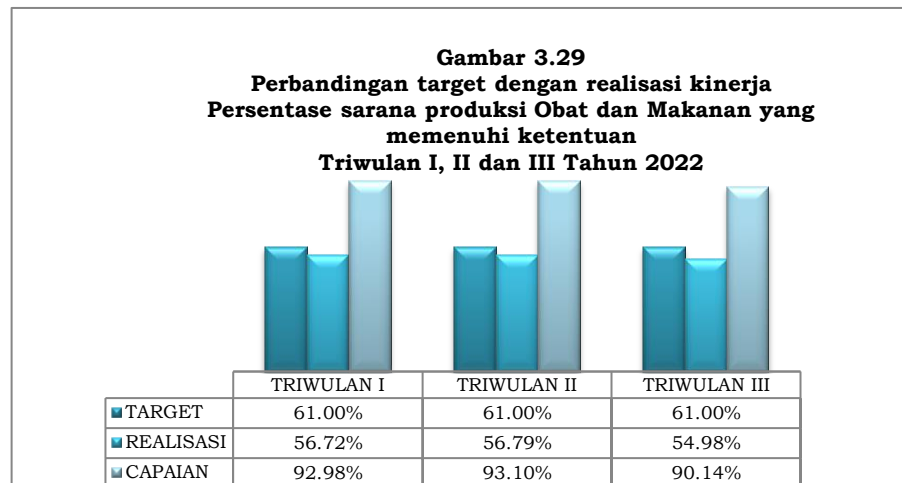


Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 61%. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 sebesar 54,98%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **90,14%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 171 sarana dan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa sebanyak 311 sarana.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN II TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 61,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 sebesar 56,72% (triwulan I), 56,79% (triwulan II) dan 54,98% (triwulan III). Jika capaian pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian pada triwulan I (92,98%), triwulan II (93,10%) dan triwulan III (90,14%). Capaian pada triwulan II menurun sebanyak 2,95% dibandingkan pada triwulan II. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.28.





C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 61,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 90,14% dengan kriteria **Belum memenuhi ekspektasi (Kurang Efektif)**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

KetidaKEBERHASILAN capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan III tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☛ Pemenuhan kepatuhan GMP sarana produksi obat dan makanan masih kurang.
- ☛ Pelaksanaan jadwal pemeriksaan sarana belum sesuai dengan perencanaan
- ☛ Intervensi untuk memperkecil GAP pengetahuan terkait GMP belum optimal dilaksanakan
- ☛ Pelaksanaan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi belum maksimal.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☛ Meningkatkan kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandung dengan mengikuti pelatihan,
- ☛ Mengadakan desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut



Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- ✎ Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ✎ Upaya peningkatkan kompetensi evaluator SKE belum dilaksanakan karena belum adanya kegiatan dari BPOM terkait updating informasi maupun regulasi tentang SKE yang melibatkan BBPOM Di Bandung.
- ✎ Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam hal regulasi ekspor melalui pemberian informasi kepada pelaku usaha terkait regulasi ekspor

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- ✎ Membuat perencanaan prioritas pemeriksaan sarana produksi berdasarkan analisis resiko.
- ✎ Membuat perencanaan jadwal dinas pemeriksaan sarana secara bulanan.
- ✎ Melakukan monitoring terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana setiap minggu melalui google drive koordinasi jadwal dinas
- ✎ Peningkatan Kompetensi Inspektur CPKB Senior yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 15 Juli 2022



Gambar 3.30 Peningkatan Kompetensi Inspektur CPKB

- ✎ Persamaan persepsi terhadap formulir pemeriksaan CPPOB (form 68) tanggal 19 Agustus 2022





Gambar 3.31 Persamaan Persepsi Terhadap Formulir Pemeriksaan CPPOB (Form 68)

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.28
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan III
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”**

Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
a	Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.	Telah dilakukan pelatihan inspektur CPOB tingkat Junior, inspektur CPKB Senior, Pelatihan Pemeriksaan Sarana Distribusi Tingkat Kesulitan II dan III. CPOTB dan CPPOB	Mengikuti Pelatihan, Bimtek, workshop yang diadakan oleh pusat, UPT lain atau diseminasi internal untuk peningkatan kompetensi petugas.	Desember 2022
b	Upaya peningkatan kompetensi evaluator SKE belum dilaksanakan karena belum adanya kegiatan dari BPOM terkait updating informasi maupun regulasi tentang SKE yang melibatkan BBPOM Di Bandung.		Koordinasi dengan BPOM terkait peningkatan kompetensi evaluator SKE	Desember 2022
c	Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam hal regulasi ekspor melalui pemberian informasi kepada pelaku usaha terkait regulasi ekspor		Koordinasi dengan BPOM terkait Bimtek untuk pelaku usaha terkait regulasi ekspor	Desember 2022

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



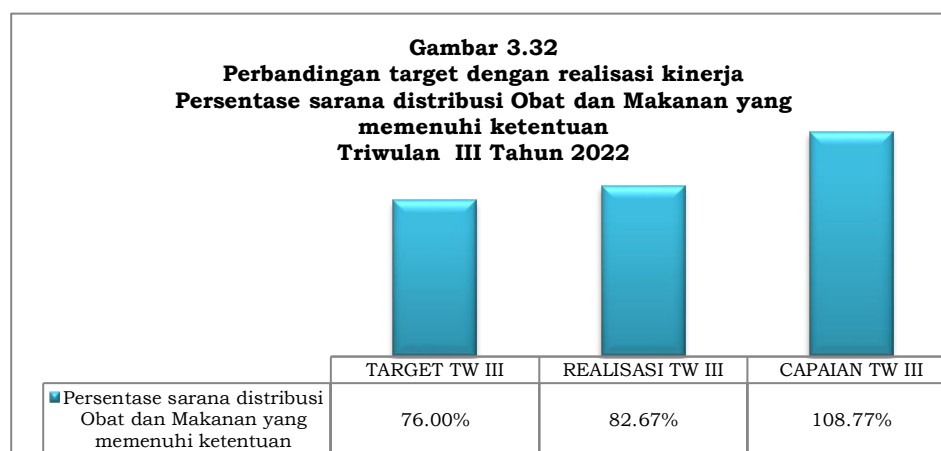
5. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun n dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun n.

TABEL 3.29
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TRIWULAN III TAHUN 2022

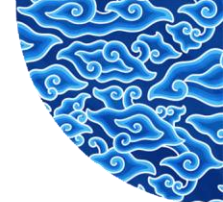
INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00%	82.67%	108.77%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022



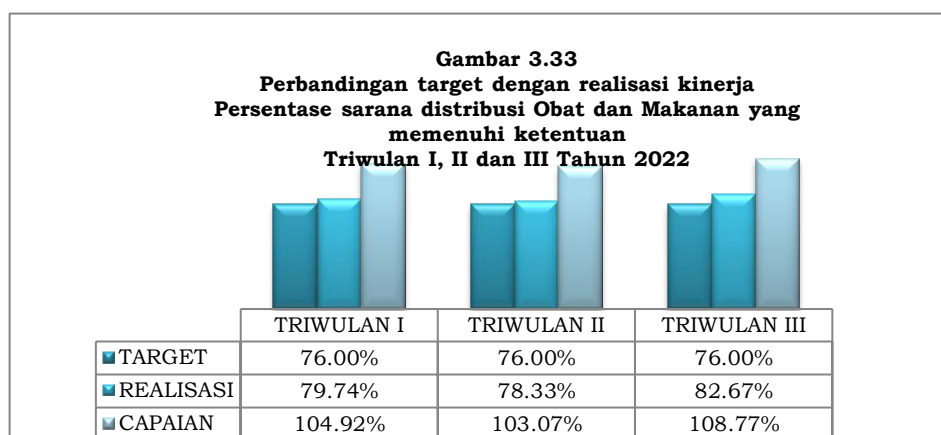
Target Triwulan III tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 76%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 sebesar 82,67%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **108,77%** dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi (Efektif)**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 1116 sarana dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa sebanyak 1350 sarana.





B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 76,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 sebesar 79,74% (triwulan I), 78,33% (triwulan II) dan 82,67% (triwulan III). Jika capaian pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian pada triwulan I (104,92%), triwulan II (103,07%) dan triwulan III (108,77%). Capaian pada triwulan III meningkat sebanyak 5,7% dibandingkan pada triwulan I. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.33.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III DENGAN TARGET TAHUN 2021

Target tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 76,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan II dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan II sebesar 108,77% (Memenuhi Ekspektasi).

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan III tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☛ Pemenuhan kepatuhan GDP sarana distribusi obat dan makanan cukup baik.
- ☛ Pelaksanaan jadwal pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan



- ✎ Pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi cukup memadai.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ✎ Meningkatkan kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandung dengan mengikuti pelatihan.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- ✎ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- ✎ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ✎ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan serta kemudahan dalam penyampaian CAPA melalui email kantor.
- ✎ Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III sebagai berikut:

- ✎ Membuat perencanaan prioritas pemeriksaan sarana produksi berdasarkan analisis resiko.
- ✎ Membuat perencanaan jadwal dinas pemeriksaan sarana secara bulanan.
- ✎ Melakukan monitoring terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana setiap minggu melalui google drive koordinasi jadwal dinas.
- ✎ Mengadakan bimtek dan desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
- ✎ Melakukan kegiatan Aksi Pasar Kosmetika Ilegal pada tanggal 3 Juli 2022





Gambar 3.33 Kegiatan Aksi Pasar Kosmetika Ilegal

🏰 Press Release Penertiban Produk Ilegal yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022



Gambar 3.34 Press Release Penerbitan Produk Ilegal

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.30
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan III
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”**

Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
a	Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.	Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) secara hybrid bersama tenaga farmasi dan tenaga kesehatan Puskesmas di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut berupa kegiatan Bimbingan Teknis dan desk CAPA pada tanggal 26 Agustus 2022	Pembinaan kepada pelaku usaha ditribusi pangan berupa bimbingan teknis SMKPO dan CPerPOB dan bimbingan teknis untuk importir dan BUPN Kosmetik direncanakan dilaksanakan bulan Oktober 2022	Desember 2022



Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
b	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.	Dilakukan monitoring dan evaluasi CAPA yang masuk dan dilaporkan secara berkala. Telah dilakukan bimtek dan desk CAPA tanggal 26 Agustus 2022 untuk sarana puskesmas	Melaksanakan bimtek dan desk CAPA untuk sarana distribusi pangan dan kosmetik pada bulan Oktober dan untuk sarana produksi pangan pada bulan November 2022	Desember 2022
c	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan serta kemudahan dalam penyampaian CAPA melalui email kantor.		Monitoring dan evaluasi penyampaian CAPA yang disampaikan melalui email corporate dan email tertentu secara berkala	Desember 2022
d	Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.		Koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi dan asosiasi berupa FGD terkait penyalahgunaan OOT di apotek dan PBF direncanakan pada bulan Desember 2022	Desember 2022

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

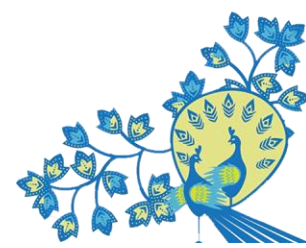
Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

6. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); (2) Profesionalitas SDM (18%); (3) Sarana Prasarana (15%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); (6) Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Dengan Kategori nilai sebagai berikut:

Tabel 3.31
Kategori Penilaian Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C -	Cukup (Dengan Catatan)

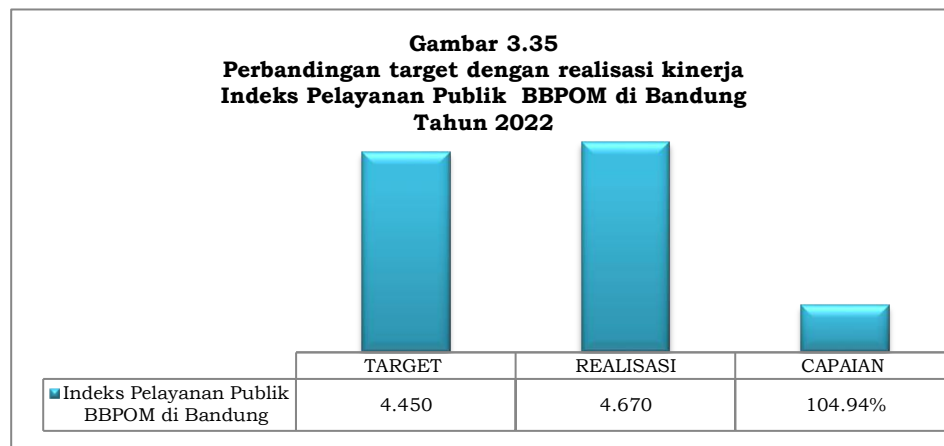


Range Nilai	Kategori	Makna
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B -	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A -	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

TABEL 3.32
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS PELAYANAN PUBLIK”
TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.45	4.67	104.94%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar 4,45, dengan realisasi sebesar 4,67. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **104,94%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan III tahun 2022 disebabkan antara lain:



- ☰ Pemenuhan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik.
- ☰ Peningkatan kompetensi SDM yang terkait pelayanan publik BBPOM di Bandung.

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik BBPOM di Bandung ke depan, yaitu:

- ☰ Secara konsisten melaksanakan maklumat pelayanan dan maklumat kebijakan standar pelayanan publik dan penerapan inovasi pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Bandung, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- ☰ Mengembangkan inovasi lainnya untuk peningkatan kinerja pelayanan publik BBPOM di Bandung.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

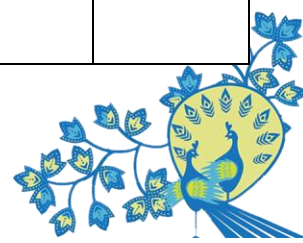
- ☰ Peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan Publik BBPOM di Bandung.
- ☰ Adanya maklumat pelayanan dan maklumat kebijakan standar pelayanan public dan penerapan inovasi pelayanan public di lingkungan BBPOM di Bandung.
- ☰ Berbagai inovasi pelayanan publik BBPOM di Bandung.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

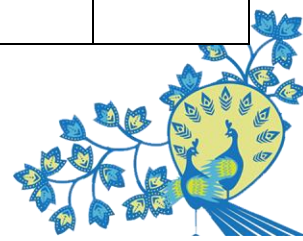
Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.33
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan III
"INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG"**

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Kebijakan Pelayanan : Penyusunan SP mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi antara lain: (1) tokoh masyarakat (2) akademisi, (3) dunia usaha, dan (4) lembaga swadaya masyarakat. Serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat; Agar ditambahkan data dukung publikasi katalog di area ruang pelayanan; SP yang ditetapkan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah disosialisasikan, dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, serta melakukan monev	Sudah dilakukan penilaian UPP, dengan hasil 4,67 dengan kategori Pelayanan Prima		



Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
berkelanjutan; Informasi tentang SP dapat diakses dengan bertanya kepada petugas secara tatap muka, membaca di lokasi tempat layanan, melalui media sms/telepon, email, website/media sosial. Agar ditambahkan data dukung akses melalui SMS; Agar ditambahkan data dukung SP yang ditetapkan; Agar dilengkapi data dukung leaflet yang mencantumkan maklumat pelayanan. Pengisian Kuesioner oleh seluruh pengguna layanan baik secara langsung dan/atau online, baik yang permohonannya disetujui maupun ditolak. Dilengkapi data dukung yang sesuai (rekap data); Informasi SKM tersedia dan dipublikasi di berbagai tempat dan media informasi (tersedia di area ruang pelayanan, media sosial, website, baliho/ banner, leaflet/pamflet/brosur, buku saku/katalog, poster dan media cetak); Hasil SKM seluruh jenis pelayanan dalam bentuk saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan penyelenggara; Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya sebelum laporan SKM diterbitkan. Agar dilengkapi data dukung yang menunjukkan bahwa hasil SKM telah ditindaklanjuti (dapat berupa money).			
<p>Profesionalisme SDM : Ketersediaan pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan, >80% dari nomenklatur ditetapkan. Agar dilengkapi data dukung jumlah kebutuhan pelaksana layanan, kompetensi, dan gap yang terjadi; Disampaikan data dukung yang menyatakan bahwa layanan dapat diakses pada waktu ekstra; Pelayanan agar dapat diberikan sangat cepat (tidak membiarkan pengguna layanan menunggu untuk dilayani); Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan meliputi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan penghargaan; Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai setiap 1 (satu) bulan; Pelaksana layanan mengenakan pakaian seragam khusus, Identitas Nama, PIN/Atribut/logo unit pelayanan, mempraktekkan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberikan Solusi). Data dukung atribut unit pelayanan agar dilengkapi.</p>	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi		
Sarana Prasarana: Sarana ruang tunggu dilengkapi fasilitas televisi, bahan bacaan, monitor antrian, AC/sirkulasi udara, air minum, dan fasilitas penunjang (hotspot/ wifi, area merokok terisolasi, serta tersedia ruang ibadah baik menyatu ataupun terpisah); Toilet disediakan terpisah antara pria dan wanita serta ada pilihan kloset duduk maupun jongkok dilengkapi wastafel dan toiletres.	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi		
b Sistem Informasi Pelayanan Publik : Sistem informasi pelayanan publik telah online dan	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi		



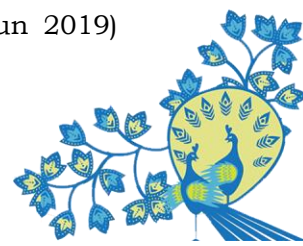
Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
telah memenuhi unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja Lembaga; Pemutakhiran informasi pelayanan publik dilakukan secara terus menerus setiap hari, agar dilengkapi data dukung yang sesuai (misal SOP pemutakhiran data); Informasi nonelektronik berupa poster/ spanduk/leaflet/ buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan, ruang publik (contoh alun-alun, perempatan jalan dll), perpustakaan daerah, kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke stakeholder.			
c Konsultasi dan Pengaduan : Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya agar dilengkapi data dukung yang sesuai; Arsip proses/hasil pengaduan terdokumentasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya.	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi		
d Inovasi : Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan memberi manfaat pada masyarakat, berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi serta sudah diikuti sertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik/sudah mendapat penghargaan (nasional/internasional).	Sudah ada inovasi yang dilaksanakan dan ada yang sudah dalam proses kompetisi ICPA, sudah replikasi inovasi a. 1 SIPETA, SIMANGGA oleh Balai lain		

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

7. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan jumlah UMKM yang memenuhi standar dengan jumlah UMKM yang sedang didampingi pada tahun berjalan. UMKM yang didampingi mencakup UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional. Adapun ruang lingkup UMKM-nya adalah sebagai berikut : (1) UMKM pangan mencakup skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin edar atau PIRT yang akan naik kelas ke MD; (2) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019)

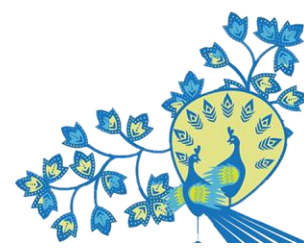


namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor; dan (3) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) dan yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

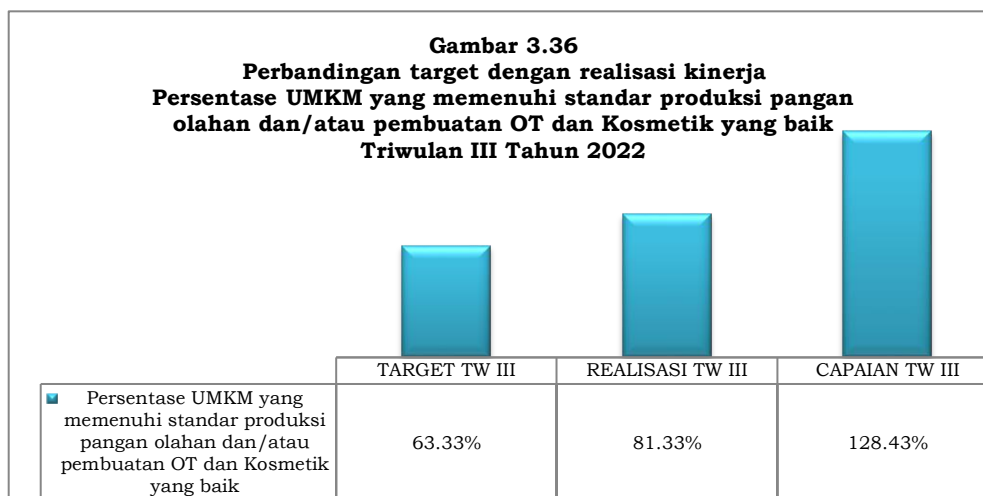
Sedangkan kriteria UMKM yang memenuhi standar adalah: 1) UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ; 2) UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

**TABEL 3.34
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN
OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK”
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	63.33%	81.33%	128.43%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	



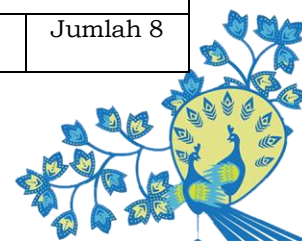
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022



Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 77% untuk jumlah UMKM yang memenuhi standar. Sedangkan penilaian terhadap capaian triwulan adalah untuk tahapan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan. Pada TW 1 di tahun 2022, target untuk TW 1 adalah sebesar 30% untuk tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM pada TW 1 adalah 16,67%, pada TW 2 adalah 55,83%, sedangkan pada TW 3 tergetnya adalah 63,33% dan pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKMNya terealisasi 81,33%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi dan pelaksanaan bimtek UMKM pangan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 128.43 % dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

TABEL 3.35
TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN, KOSMETIK DAN OT

Komoditi		TAHAPAN	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelaksanaan	
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	Jumlah 5
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April	
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober	
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan	
Total Progress						
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari	Jumlah 8



		didampingi dari setiap UPT				
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November	
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November	
Total Progres						
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	Jumlah 25
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September	
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November	
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember	

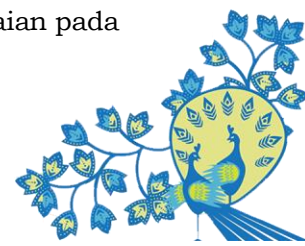
**TABEL 3.36
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN, OT DAN KOSMETIK
SD TRIWULAN III TAHUN 2022**

No.	Komoditi	Jumlah UMKM Yang Didampingi	Penetapan UMKM	Bimtek UMKM	Pelaksanaan Fasilitasi	Sertifikasi	Pelaporan	% tahapan kegiatan pendampingan
1	Pangan	25	10%	20%	28%	7%	7%	72%
2	OT	5	10%	20%	35%	16%	8%	89%
3	Kosmetik	8	10%	40%	25%	-	8%	83%
TOTAL								81,33%

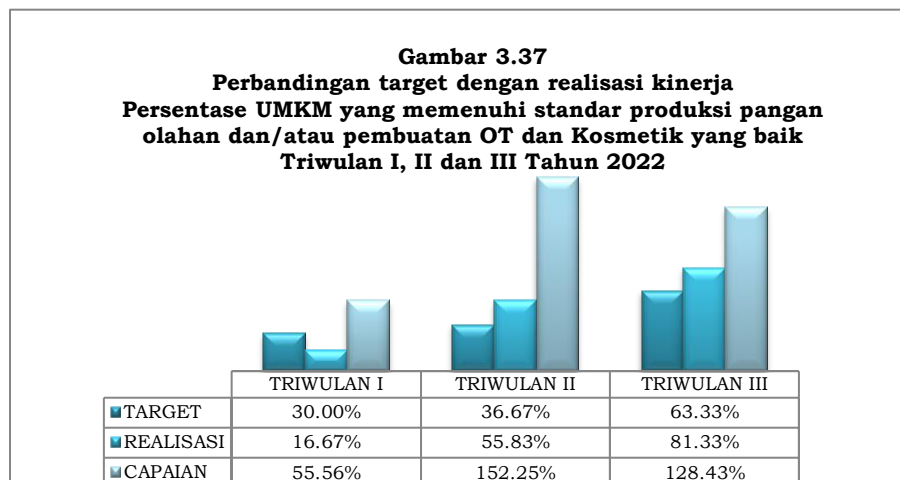
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada tahun 2022, target untuk TW III adalah sebesar 63,33% untuk tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM pada TW III tercapai sebesar 81,33%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi dan pelaksanaan bimtek UMKM pangan, Kosmetik dan obat tradisional, Fasilitasi/pelaksanaan pendampingan dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPPOB, SPA CPKB/rekomendasi BUPN dan CPOTB dan pelaporan ke Badan POM. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar **128,43% %**.

Persentase Tahapan Kegiatan Pendampingan UMKM tahun 2022 sebesar 16,67% (triwulan I), 55,83% (triwulan II) dan 81,33 (triwulan III). Jika capaian pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka persentase capaian pada



triwulan I (55,56%), triwulan II (152,25%) dan triwulan III (128,43%). Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.37.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 77,00%. Untuk target akhir (UMKM yang memenuhi standar), pada TW III ini telah diterbitkan 7 izin penerapan CPOOB, 4 rekomendasi sertifikasi CPOTB Tahap 1, 2 LAHP, 1 industri kosmetik yang terbit notifikasi, 1 sarana BUPN yang terbit notifikasi dan 1 persetujuan denah bangunan, sehingga realisasi di TW 3 adalah 39,47%. Sedangkan untuk tahapan kegiatannya, pada TW 3 telah dilaksanakan 81,33%, jika realisasi kinerja pada triwulan III sebesar 63,33% dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan II sebesar 128,43%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar pada triwulan III tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan hal-hal berikut ini:

- ☛ Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan di tahun 2022, dan di TW III ini kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai agenda yang ditetapkan.
- ☛ Sosialisasi kegiatan pendampingan UMKM yang secara masif dilakukan oleh BBPOM Bandung, meningkatkan animo/minat para pelaku usaha UMKM dalam terlibat aktif dalam program pendampingan ini.



- ☸ Komitmen para pelaku usaha untuk segera berproses dalam kegiatan pendampingan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan lebih cepat dibandingkan dengan perencanaan.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut ke depan antara lain:

- ☸ Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM. BBPOM Bandung berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan usulan dan masukan pelaku usaha mana yang akan difasilitasi, diantaranya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan inkubator-inkubator UMKM dari perguruan tinggi. Di awal proses ini lintas sektor tersebut akan mencari UMKM binaannya dan menyeleksi UMKM yang akan dicalonkan sebagai UMKM yang akan difasilitasi.
- ☸ Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan pendampingan UMKM sebagai fasilitator.
- ☸ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- ☸ Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.
- ☸ Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

- ☸ Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang tahapan proses perizinan berusaha, termasuk proses perizinan yang berlaku di Badan POM. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam hal tata cara dan prosedur perizinan yang bertujuan untuk memberikan adanya kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha.
- ☸ Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur tentang seluruh tahapan proses perizinan termasuk yang berada di bawah kewenangan Badan POM dan dikelompokkan berdasarkan tingkat risikonya.
- ☸ Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang kemudahan untuk UMKM.
- ☸ Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan

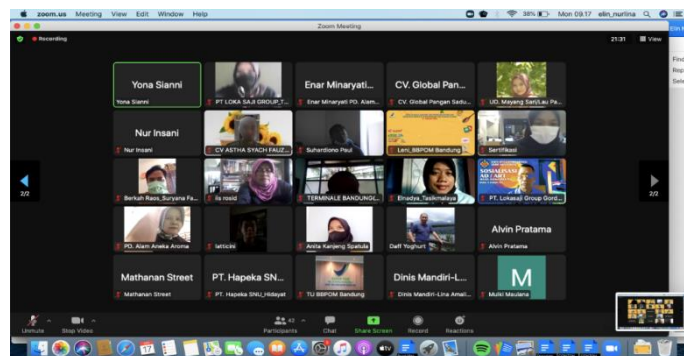


perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi ijin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan.

- Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, mempercepat waktu pemenuhan (time line) dikeluarkannya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika.
- Adanya kebijakan Badan POM dalam penerapan CPOTB bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB.
- Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- Pada tanggal 17 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang merupakan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan adanya kegiatan pendampingan bagi UMKM yang dilakukan oleh BBPOM.



Gambar 3.38 Kegiatan Desk CAPA

- Pada tanggal 25-26 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA merupakan kelanjutan dari kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan



UMK Pangan Olahan yang telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 17 Januari 2022. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan materi terkait Penerapan Prinsip CPPOB pada Industri/UMKM Pangan Olahan, Pendaftaran Akun dan Dokumen Panduan Mutu, Pemaparan Materi Panduan Mutu Butir 1 -10, Alur Proses Produksi dan Pengendalian Proses, kemudian dilanjutkan dengan Desk Akun E-Sertifikasi dan Desk Penyusunan SOP antara pelaku usaha dengan Evaluator. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu para pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen panduan mutu yang dipersyaratkan pada saat mengajukan permohonan ijin penerapan CPPOB sehingga mereka dapat mengupload dokumen tersebut dan mulai berproses di sistem/aplikasi e-sertifikasi.



Gambar 3.39 Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA

- ✎ Pada tanggal 19-20 April 2022 dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang diselenggarakan secara luring untuk 5 UMKM obat tradisional dan 5 UMKM kosmetik. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPOTB/CPKB dan persyaratan pendaftaran OT/Kos, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.





Gambar 3.40 Pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dalam acara Bimtek Pendampingan UMKM OT dan Kosmetik

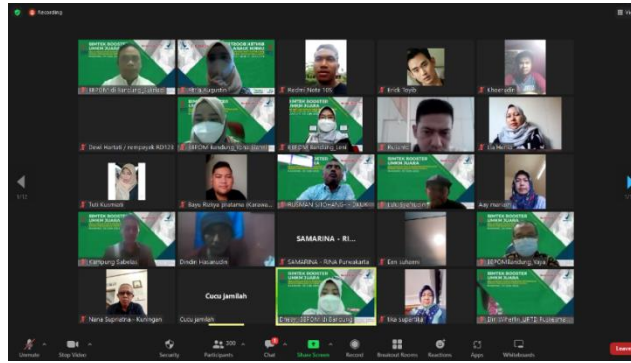
- Pada tanggal 18-19 Mei 2022 dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pangan Olahan yang diselenggarakan secara luring untuk 25 UMKM pangan olahan. Pada hari pertama para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan, dilanjutkan desk dokumen panduan mutu pada hari kedua.



Gambar 3.41 Pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan dalam acara Bimtek Pendampingan UMKM Pangan Olahan

- Pada tanggal 2 Juni 2022, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat mengadakan Bimbingan Teknis Booster UMKM Juara yang merupakan tahap awal dari rangkaian Program Booster UMKM Juara yang merupakan kolaborasi BBPOM di Bandung dengan Pemda Propinsi Jawa Barat yaitu dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat.





Gambar 3.42 Bimtek Booster UMKM Juara

🕌 Pada tanggal 5 Agustus 2022, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pendampingan Propinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi Program Booster UMKM Juara secara daring. Pada kegiatan ini para UMK binaan diberikan materi terkait dokumen panduan mutu yang diperlukan dalam pemenuhan Cara Produk Pangan Olahan Yang Baik dan dijelaskan pula bagaimana cara penyusunan dokumen mutu tersebut.

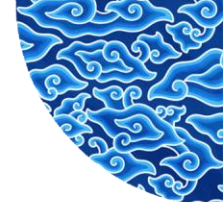


Gambar 3.43 Rapat Koordinasi Booster UMKM Juara

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

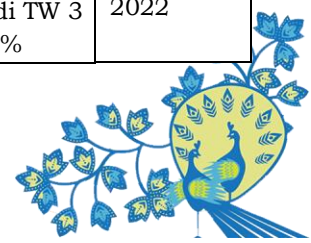
Tindakan lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:





TABEL 3.37
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN
OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK”

Rekomendasi		Tindaklanjuti		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
		Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM Pangan, Kosmetik dan Obat Tradisional	Telah dilakukan penjadwalan pembinaan pendampingan kepada para pelaku UMKM untuk mengawal para UMKM dalam mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan izin edar	Desember 2022
a	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM	Berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Prov. Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan Booster UMKM Juara	Kegiatan kolaborasi pendampingan UMKM dengan 3 instansi di Pemprov Jabar masih terus berlanjut, akan dilaksanakan kegiatan desk e-registrasi pangan olahan di TW4	Desember 2022
b	Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan pendampingan UMKM sebagai fasilitator.	Telah dilakukan pendampingan dan kegiatan pelatihan	Proses pendampingan kembali dilakukan di TW 4 karena ada tambahan personel baru di sertifikasi	Desember 2022
c	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/Bimtek Pendampingan UMKM yang telah dilaksanakan pada tanggal 25-26 Januari 2022 untuk UMKM Pangan Olahan, 19-20 April 2022 untuk UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional; 18-19 Mei 2022 untuk UMKM Pangan Olahan; tanggal 2 Juni 2022 untuk Kegiatan Booster UMKM Juara dan tanggal 5 Agustus 2022 kegiatan Sosialisasi Panduan Mutu untuk Booster UMKM	Melaksanakan kegiatan Pendampingan UMKM dan Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan	Desember 2022
d	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM..	Sudah dilakukan Monev sampai Triwulan III. Melakukan penginputan	Realisasi pelaksanaan di TW 3 sebesar 81,33%	Desember 2022



Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
	realisasi kinerja yang telah dilaksanakan		
e Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Desember 2022

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

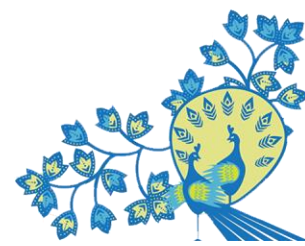
SASARAN KEGIATAN KE-5

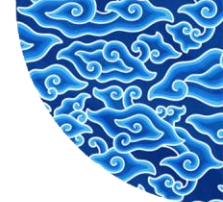
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **99,01%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.38

TABEL 3.38
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-5
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.50	99.68%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Progress 44.00%	Progress 71.31%	162.07%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
3. Jumlah desa pangan aman	Progress 85.00%	Progress 61.22%	72.02%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
4. Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	Progress 90.00%	Progress 56.04%	62.27%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			99.01%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF





1. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

Penetapan hasil pengukuran indikator tersebut pada triwulan I, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-HM.11.02.22.224.04.22.114 Tanggal 11 April 2022 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 1 tahun 2022. Triwulan II berdasarkan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-HM.11.02.2.22.07.22.493 Tanggal 11 Juli 2022 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 2 tahun 2022. Triwulan III berdasarkan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-HM.11.02.2.22.10.22.754 Tanggal 10 Oktober 2022 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 3 tahun 2022.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun sebagai berikut:

TABEL 3.39
KATEGORI PENILAIAN
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022

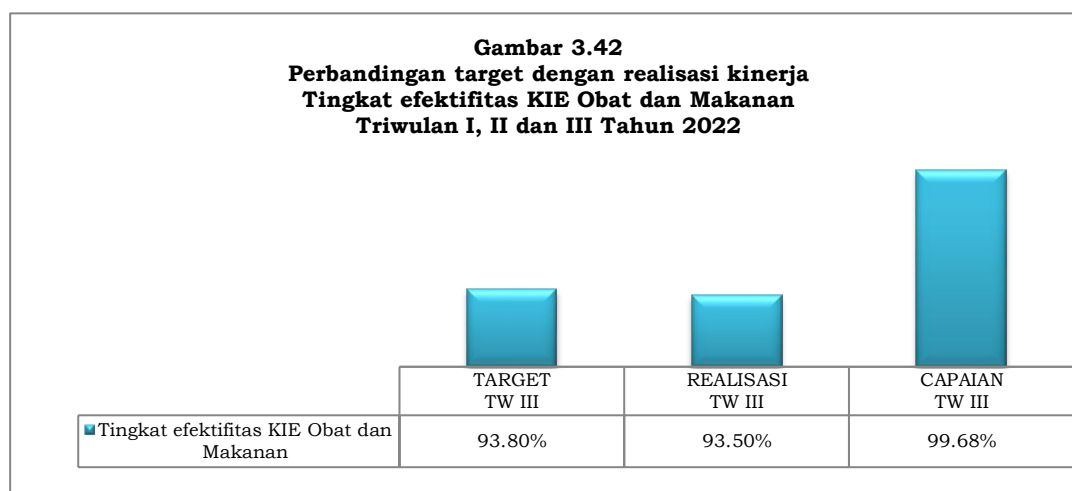
SKOR INDEKS 100	INTERPRESTASI EFEKTIFITAS
<65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali



TABEL 3.40
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGE T TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.50	99.68%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

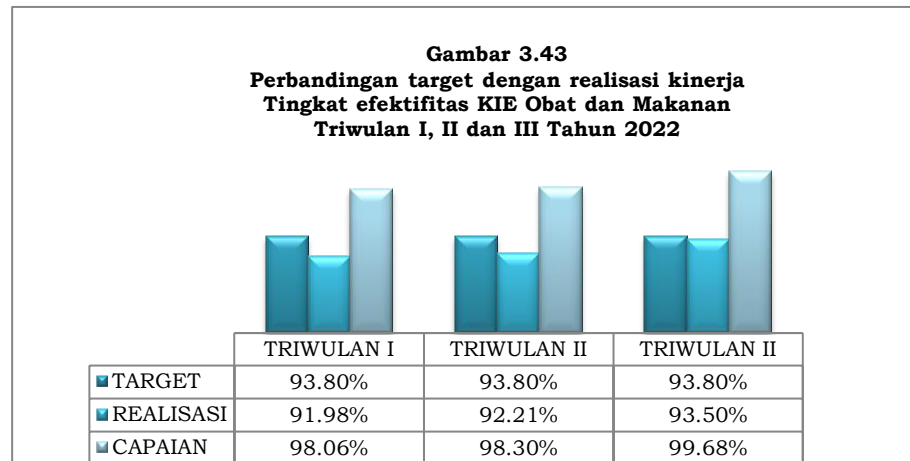


Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2022 adalah sebesar 93,80%. Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan akumulasi hingga Triwulan III tahun 2022 sebesar 93,50% (Sangat Efektif) sesuai Kategori Penilaian tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan. Nilai tersebut di atas Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tingkat nasional UPT Balai Besar/Balai POM sebesar 93,38. Persentase capaian target dengan realisasi kinerja indikator sasaran tersebut adalah sebesar **99,68%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 93,80%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan 1 (98,06%), triwulan II (98,30%) dan triwulan III (99,68%). Terjadi Kenaikan sebesar 1,38% terhadap triwulan II.





C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93,80. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar **99,86%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.

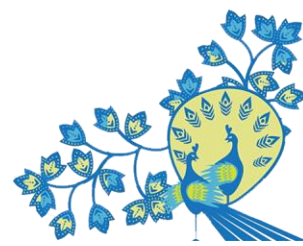
D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kegagalan kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan III tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☪ Penayangan informasi melalui medsos tidak dilakukan secara konsisten
- ☪ Jumlah peserta KIE yang mengumpulkan Kembali survei kurang dari jumlah kuisisioner yang disebarkan
- ☪ Konten yang dibuat dalam penyampaian KIE kurang menarik
- ☪ Belum dilaksanakan kegiatan webinar ketiga dan sosialisai melalui Kelom Geulis.

Rekomendasi baik internal/eksternal pada periode berikutnya untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☪ Melakukan penayangan informasi melalui medsos secara konsisten
- ☪ Mengembangkan materi KIE sesuai sasaran audiens
- ☪ Memastikan pengisian formulir survei KIE terisi dan diolah dengan baik
- ☪ Memperluas cakupan KIE dengan cara bekerjasama dengan tokoh masyarakat, bekerjasama dengan lintas sektor terkait.

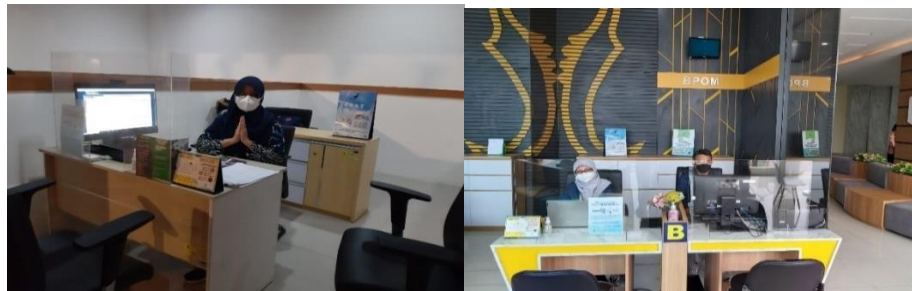


- ☛ Meningkatkan konsistensi program KAHARTOS di Media social. Program ini berisi definisi dari tiap kata yang ada di peraturan ataupun yang biasa digunakan pada isu terkini, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu terkini.

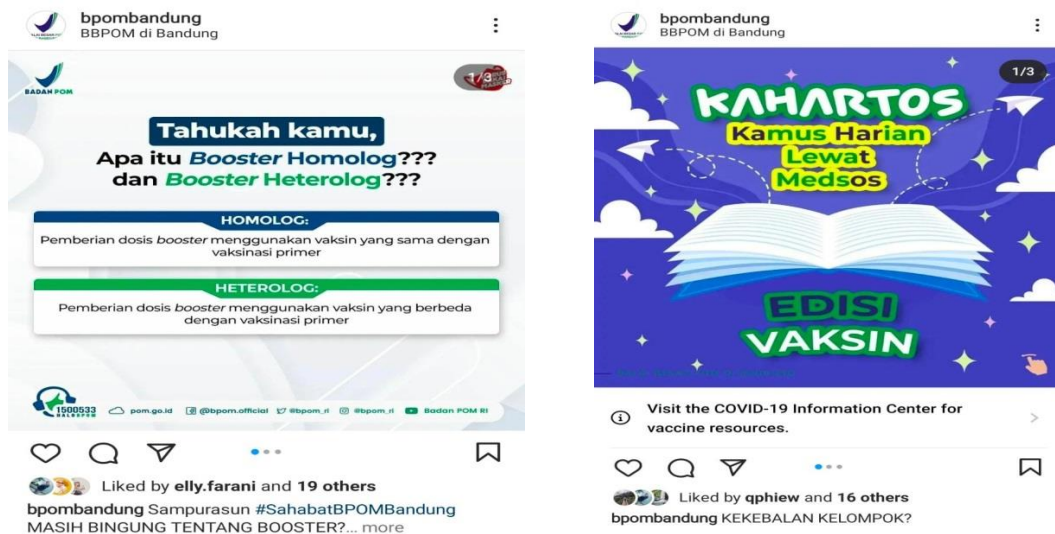
E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah Analisis kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja:

1. Penayangan KIE di Media Sosial membutuhkan proses rancangan dan penjadwalan materi. Pada periode sebelumnya, penjadwalan penayangan materi di media sosial tidak rutin dibuat, sehingga para petugas tidak melakukan proses rancang materi untuk media social.
2. Penjadwalan yang tidak konsisten menyebabkan Program KAHARTOS di Media Sosial tidak rutin ditayangkan.
3. Pelaksanaan layanan di Mall Layanan publik tidak dapat dilaksanakan pada jadwal yang konsisten, hal ini disebabkan padatnya jadwal kegiatan dan terbatasnya Sumber daya di Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

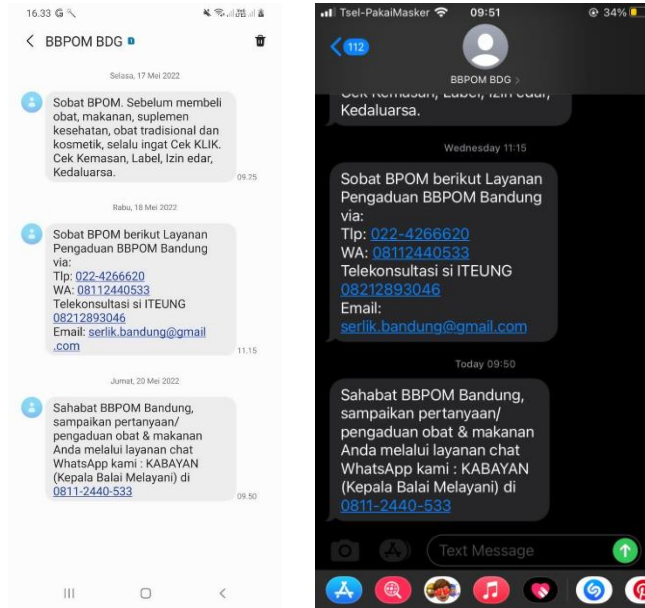


Gambar 3.44 Layanan di Mall Pelayanan Publik



Gambar 3.45 KIE melalui Media Sosial





Gambar 3.46 KIE melalui SMS Blast



Gambar 3.47 KIE melalui Media Transportasi

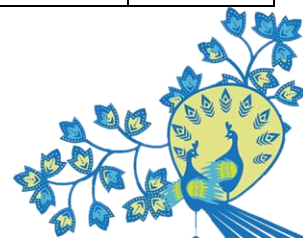
F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.41

**MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a Melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda	Telah dilakukan sesuai periode triwulan dengan jumlah responden tercukupi serta cleaning data terhadap responden ganda	-	-



Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
b	Melakukan evaluasi dan Analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif	Telah dilakukan Evaluasi dan Analisa terhadap hasil efektifitas KIE dimana terbanyak responden lebih efektif KIE secara langsung.		
c	Melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi Evaluasi KIE.	Tidak Terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi KIE. Pada TW3 juga dilaksanakan pertemuan pembahasan terhadap aplikasi tersebut.	-	-

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman diukur berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Petunjuk Teknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Jumlah sekolah dihitung secara kumulatif dari periode tahun 2022.

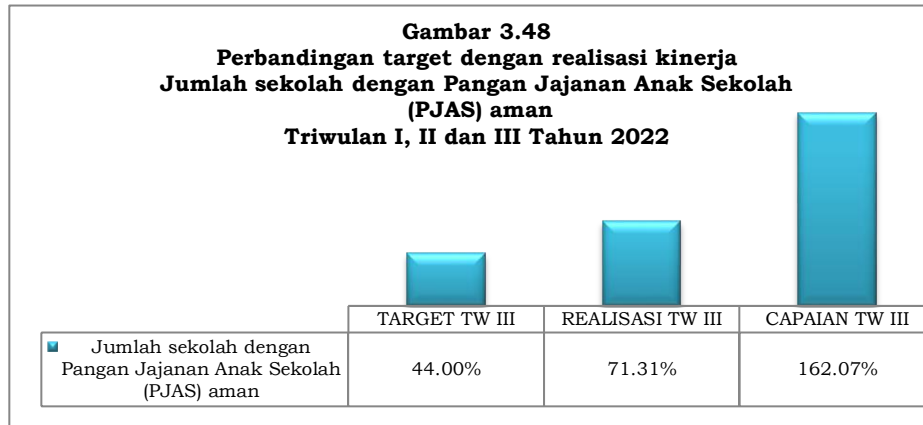
**TABEL 3.42
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGE T TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Progress 44.00%	Progress 71.31%	162.07%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022

Target penetapan kinerja tahun 2022 pada indikator sasaran strategis ini adalah sebanyak 76 sekolah yang terdiri dari sekolah yang sudah diintervensi dari tahun 2020 – 2021 sebanyak 42 sekolah, dan target tahun 2022 sebanyak 34 sekolah, dan untuk target triwulan III tahun 2022 adalah progress 44%, Kegiatan ini dapat dihitung outputnya pada akhir tahun anggaran jika keseluruhan tahapan telah selesai. Progres pelaksanaan kegiatan PJAS pada triwulan III sebesar **40%**. Jika diukur terhadap target triwulan III maka capaiannya sebesar **162,07%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**



Balai Besar POM di Bandung akan melaksanakan Intervensi PJAS pada tahun 2022 di Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kota Sukabumi dan Banjar. Sampai dengan triwulan III Tahun 2022, BBPOM di Bandung sudah melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan di Sekolah terhadap 34 Sekolah yang ada di Wilayah Kota Banjar, 36 Sekolah yang ada di wilayah Kab. Ciamis, 38 Sekolah di wilayah kota sukabumi dan 38 Sekolah di wilayah Kab. Pangandaran. BBPOM di Bandung juga sudah melakukan Bimtek Kader Keamanan Pangan di Sekolah terhadap 9 Sekolah di Kab. Ciamis dan Kota Banjar serta 8 Sekolah di Kota Sukabumi dan Kab. Pangandaran.

Intervensi yang dilakukan bertahap sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan POM RI. Tahap kegiatan PJAS yang dilaksanakan adalah Advokasi dengan lintas sektor, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di Sekolah dan Workshop. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan PJAS dapat dilihat pada tabel berikut.

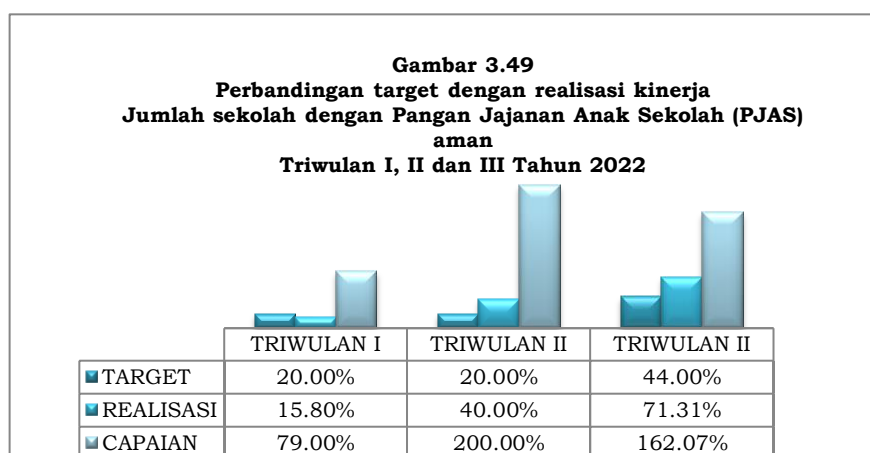
TABEL 3.43
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PJAS
s.d. TRIWULAN III TAHUN 2022



KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Adokasi Lintas Sektor PJAS	20	10	5.0	5	0	20
2 Sosialisasi Keamanan Pangan	10	2.5	5	2.5	0	10
3 Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15	0	7.5	7.5	0	15
4 Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10	0	5.0	5	0	10
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)	15			7.5		7.5
Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		0	0	0	0	0
Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		0	0	0	0	0
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20	0	0	0	0	0
7 Pengawalan	10	3.3	2.2	3.81	0	8.81
TOTAL SKOR	100	15.8	24.20	31.31	0	71.31

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 44,00%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan 1 (79,00%), triwulan II (200,00%) dan Triwulan III (162,07%). Terjadi Kenaikan sebesar 37,93% terhadap triwulan II.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 76 sekolah (progress 44,00%). Jika realisasi kinerja pada triwulan III



dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar **162,07%** dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan atas peningkatan kinerja diantaranya:

- ☰ Audiensi sebagai persiapan untuk pelaksanaan Advokasi sudah dapat dilaksanakan terhadap seluruh Kab./Kota yang diintervensi pada tahun 2022
- ☰ Sampai dengan triwulan III Tahun 2022, BBPOM di Bandung dapat menyelesaikan tahapan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan di seluruh Kab./Kota yang diintervensi pada tahun 2022

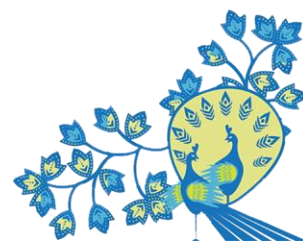
Rekomendasi baik internal/eksternal untuk periode selanjutnya diantaranya:

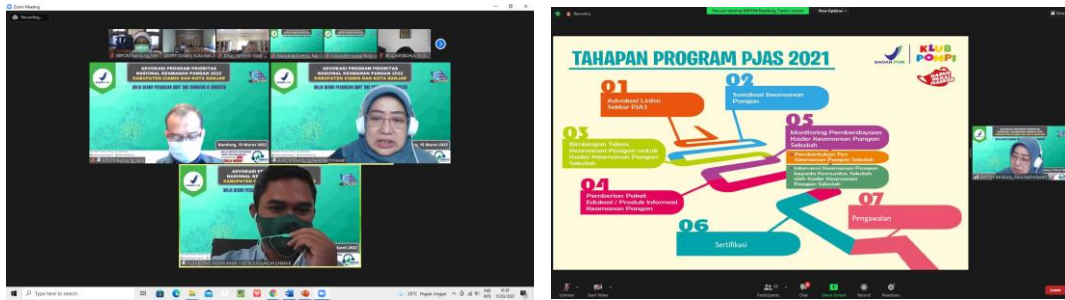
- ☰ Melakukan kegiatan Sertifikasi terhadap sekolah yang diintervensi program PJAS
- ☰ Melaksanakan Kegiatan Pengawasan terhadap sekolah di wilayah Kab. Karawang dan Majalengka

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah Analisis kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja:

- ☰ Kegiatan pengawasan sudah mulai dilakukan dari awal tahun anggaran
- ☰ Balai Besar POM di Bandung menindaklanjuti tahapan kegiatan setelah advokasi dengan cepat, diantaranya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan di Sekolah dan Bimbingan Teknis Kader KP di Sekolah.
- ☰ Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai terhadap Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Bandung TA 2022. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi program KIE tomas yang kemungkinan banyak dilaksanakan di TW 4





Gambar 3.50
Kegiatan Advokasi dengan lintas Sektor



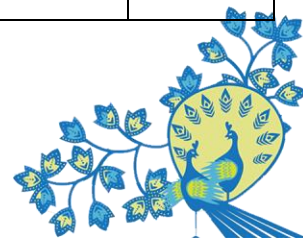
Gambar 3.51
Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader di Sekolah

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindakanlanjutan terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.44
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”**

Rekomendasi		Tindakanlanjutan		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a.	Pelaksanaan Advokasi dilakukan secara daring	Kegiatan Advokasi terhadap Kab. Pangandaran telah dilaksanakn pada TW III secara daring	-	-
b.	Mempertajam kegiatan Audiensi dengan koordinasi ke kantor bupati/walikota.	Pelaksanaan Audiensi terhadap Kabupten Pangandaran diikuti oleh bupati dan seluruh OPD terkait Program Keamanan Pangan, Sehingga implementasi kegiatan dapat dengan mudah ditindaklanjuti	-	-



Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
c.	Melakukan percepatan pelaksanaan tahapan kegiatan PJAS	Tahapan kegiatan PJAS dilanjutkan tepat setelah kegiatan advokasi dilaksanakan	-	-

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

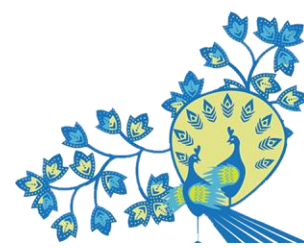
Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Jumlah desa pangan aman diukur berdasarkan jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Pangan Aman: (1) Advokasi Kelembagaan Desa; (2) Bimtek Kader Pembentukan Desa Pangan Aman; (3) Bimtek Komunitas; (4) Fasilitasi Keamanan Pangan; (5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan; (6) Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Desa Pangan; (7) Lomba Desa; dan (8) Pengawalan. Jumlah desa dihitung secara kumulatif dari desa yang diintervensi pada periode tahun 2020. Desa yang sudah diintervensi pada periode 2020-2021 adalah 19 Desa. Target desa yang diintervensi tahun 2022 adalah 9 Desa yang meliputi 3 Kelurahan di Kota Banjar (Batulawang, Binangun dan Sukamukti), 2 Desa di Kab. Ciamis (Panjalu dan Sindangangin), 1 Desa di Kab. Pangandaran (Selasari) dan 3 Kelurahan di Kota Sukabumi (Jayamekar, Lembursitu dan Sukakarya). Desa dengan status stunting diantaranya Kelurahan Sukakarya dan Jayamekar.

**TABEL 3.45
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"JUMLAH DESA PANGAN AMAN"
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Jumlah desa pangan aman	Progress 85.00%	Progress 61.22%	72.02%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 28 Desa. Target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2022 adalah progress 85,00%. Pada triwulan III, realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar progress 61,22%. Jika diukur terhadap target triwulan III maka capaiannya sebesar **72,02%** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)**. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman dapat dilihat pada tabel berikut.



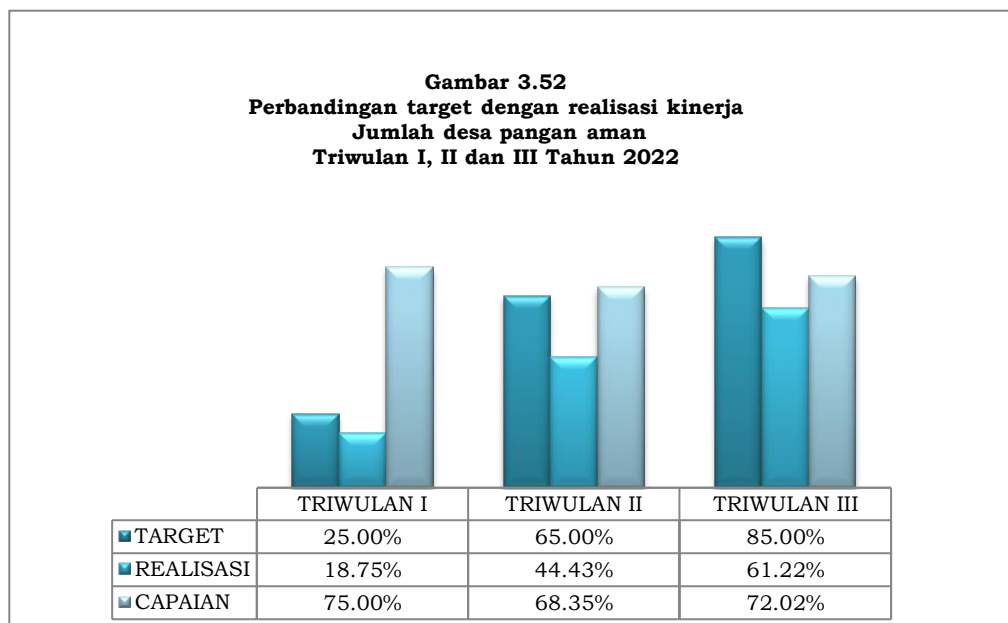
TABEL 3.46
PROGRESS PELAKSANAAN DESA PANGAN AMAN
s.d. TRIWULAN III TAHUN 2022

KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRESS (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Adokasi Kelembagaan Desa	20	10	5	5.00	0	20.00
2 Pengadaan Gimmick, rapid test, dll	5	5	0	0.00	0	5.00
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15	3.75	4.58	1.67	0	15.00
4 Bimtek Komunitas	15	0	8.33	3.49	0	11.82
5 Fasilitasi Keamanan Pangan	10	0	0	5.00	0	5.00
6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10	0	2.77	1.63	0	4.40
7 Monitoring dan Evaluasi	10	0	0	0.00	0	0.00
8 Lomba Desa Pangan Aman	5	0	0	0.00	0	0.00
9 Pengawalan	10	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL SKOR	100	18.75	25.68	16.79	0	61,22



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini berurutan Triwulan I, II dan III adalah 25,00%; 65,00% dan 85,00% yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dan II dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan 1 (75,00%), triwulan II (68,35%), triwulan III (72,02%). Terjadi kenaikan sebesar 3,67% terhadap triwulan II.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 28 desa (progress 85%). Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar **72,02%** dengan kriteria **Tidak Memnuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Analisis terhadap kegagalan peningkatan kinerja:

- ☛ Terjadi perubahan Kabupaten yang akan diintervensi setelah desk dengan Dit.
- ☛ Komunikasi yang tidak efektif antara BBPOM di Bandung dengan perangkat desa yang diintervensi



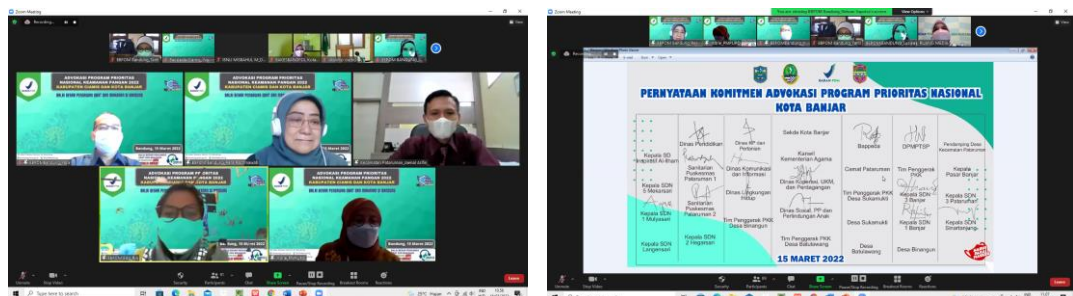
Rekomendasi baik internal/eksternal untuk periode berikutnya:

- ☰ Melaksanakan Kegiatan Bimtek PUPD terhadap desa Selasari Kab. Pangandaran
- ☰ Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi I dan II serta Intensifikasi Keamanan Pangan terhadap desa yang diintervensi
- ☰ Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap desa yang diintervensi
- ☰ Melakukan pengawalan terhadap desa yang diintervensi di tahun sebelumnya

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah Analisis kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja:

- ☰ Kegiatan Audiensi tertunda dikarenakan terjadinya perubahan Kab./Kota yang diintervensi, disamping proses audiensi terhadap pemerintah daerah sering kali terkendala padatnya jadwal dari OPD setempat
- ☰ Penjadwalan Kegiatan Desa Pangan Aman seringkali bersamaan dengan kegiatan lain di desa sehingga perlu dilakukan penyesuaian jadwal.
- ☰ Kegiatan pengawalan desa pangan aman terhadap desa yang diintervensi tahun sebelumnya belum dapat dilaksanakan sampai TW 3



Gambar 3.53 Advokasi Keamanan Pangan dengan Lintas Sektor



Gambar 3.54 Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa Kelurahan Banjar





Gambar 3.55 Bimtek Komunitas Desa di Kab. Ciamis dan Kota Banjar

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindakan lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.47
Matriks Tindakan Lanjut Rekomendasi Triwulan III
“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”**

Rekomendasi	Tindakan lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a Melaksanakan Kegiatan Advokasi terhadap kab. Pangadaran.	Telah dilakukan Advokasi Kegiatan Keamanan Pangan Nasional terhadap Kab Pangadaran tanggal 29 Juli 2022	-	-
b Melakukan percepatan kegiatan terhadap kabupaten yang telah diadvokasi	Setelah kegiatan advokasi BBPOM di Bandung langsung melanjutkan kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas Desa.	-	-

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Jumlah output target pasar merupakan jumlah kumulatif dari pasar yang diintervensi sejak tahun 2020. Pasar yang sudah diintervensi



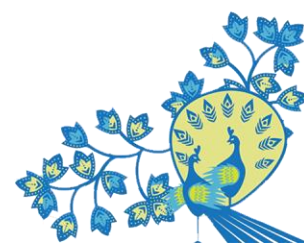
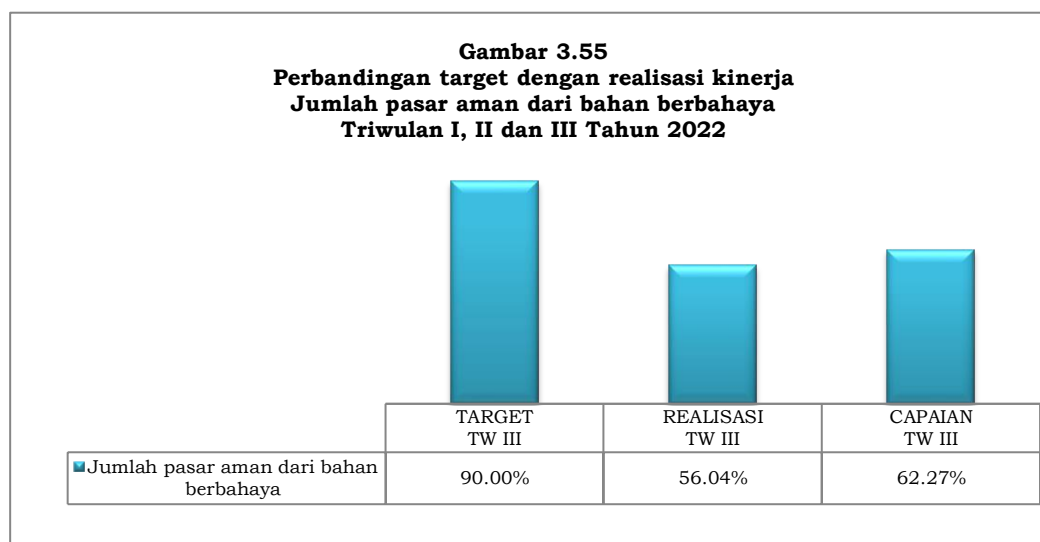
dari tahun 2020- 2021 sebanyak 8 pasar, target tahun ini sebanyak 5 pasar. Pasar yang di rencanakan di intervensi pada tahun 2022, adalah Pasar Degung dan Pelita di Kota Sukabumi, Pasar Kawali di Kabupaten Ciamis, Pasar Banjar di Kota Banjar serta Pasar Parigi di Kab. Pangandaran.

TABEL 3.48
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA”
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGE T TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
5. Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	Progress 90.00%	Progress 56.04%	62.27%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 13 pasar. Target yang ditetapkan pada TW III tahun 2022 adalah progress 90,00%. Pada triwulan III, realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar 13 Pasar dengan progress 56,04%. Jika diukur terhadap target triwulan III maka capaiannya sebesar **62,27%** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi dengan efektifitas Tidak Efektif**. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat dilihat pada tabel berikut.

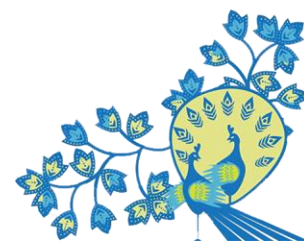
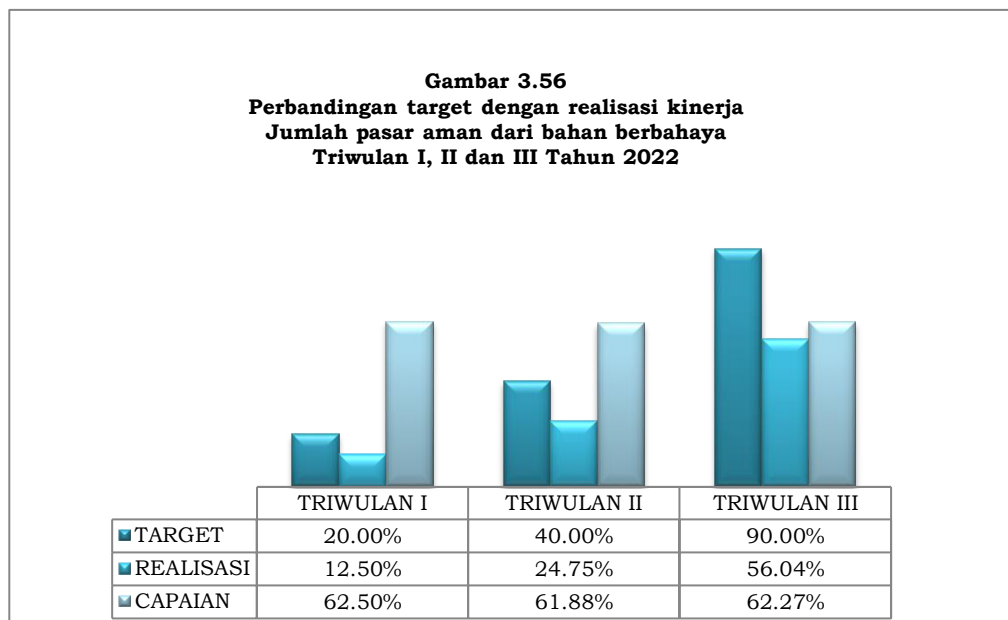


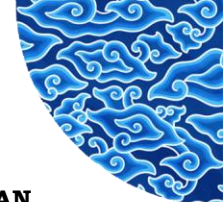
TABEL 3.49
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR AMAN
DARI BAHAN BERBAHAYA
s.d. TRIWULAN III TAHUN 2022

KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Advokasi	20	10	5	5.00	0	20.00
2 Survey Pasar	5	2.50	1.25	1.25	0	5.00
3 Bimtek Pengelola Pasar	15	0	6	9.00	0	15.00
4 Sampling dan Pengujian Tahap I	15	0	0	3.45	0	3.45
5 Penyuluhan	10	0	0	4.00	0	4.00
6 Kampanye	10	0	0	4.00	0	4.00
7 Sampling dan Pengujian Tahap II	15	0	0	2.29	0	2.29
8 Pengawasan	10	0	0	2.30	0	2.30
TOTAL SKOR	100	12.50	12.25	31.29	0	56.04

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini berurutan Triwulan I, II dan III adalah 20,00%; 40,00% dan 90,00% yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan 1 (62,00%), triwulan II (61,88%) dan triwulan III (62,27%). Terjadi Kenaikan sebesar 0,39% terhadap triwulan II.





C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 13 Pasar (progress 90%). Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar **62,27%** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi efektifitas tidak efektif**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Analisis Kegagalan peningkatan kinerja diantaranya:

- ☰ Terjadi perubahan Kabupaten yang akan diintervensi setelah desk dengan Dit. PMPU. Menyebabkan pelaksanaan audiensi terhadap kabupaten baru membutuhkan waktu yang lebih lama
- ☰ Proses audiensi terhadap pemerintah kab. Pangandaran baru sampai tahap penyampaian program ke Bupati dan belum dapat dilaksanakan terhadap dinas terkait.
- ☰ Proses pelaksanaan intervensi pasar terlambat dikarenakan kegiatan padatnya jadwal dan kurangnya petugas

Rekomendasi baik internal/eksternal untuk periode berikutnya:

- ☰ Melaksanakan Kampanye dan Penyuluhan di pasar Banjar, Kawali dan pasar parigi
- ☰ Melaksanakan Monev tahap 1 terhadap pasar yang diintervensi baru dan pasar pengawalan terhadap 10 Pasar (selain Pasar Pagi Cirebon, Pasar Sumber, Pasar Bangkir)
- ☰ Melaksanakan Monev tahap 2 terhadap pasar yang diintervensi baru dan pasar pengawalan terhadap 12 Pasar (selain Pasar Pagi Cirebon)

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah Analisis kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja:

- ☰ Perubahan Kab./Kota Intervensi menyebabkan tertundanya proses audiensi yang berakibat mundurnya pelaksanaan tahapan kegiatan Pasar Aman
- ☰ Respon petugas pasar dalam melaksanakan kegiatan monev terbilang lambat, hal ini dapat terlihat pada kegiatan monev tahap I hanya 3 dari 13 pasar yang



telah melaporkan kegiatannya. Sedangkan untuk monev tahap II hanya 1 dari 13 pasar yang telah melaporkan kegiatannya.



Gambar 3.57 Kegiatan Survey Pasar di Kota Banjar



Gambar 3.58 Kegiatan Survey Pasar di Kab. Ciamis



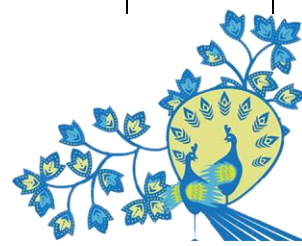
Gambar 3.59 Kegiatan Survey Pasar di Kota Sukabumi

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.50
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan III
"JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA"**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a Melaksanakan Kegiatan Advokasi terhadap 1 Kab. Pangandaran.	Telah dilakukan Advokasi Kegiatan Keamanan Pangan Nasional terhadap Kab Pangandaran tanggal 29 Juli 2022	-	-



Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
b Melakukan percepatan kegiatan terhadap kabupaten yang telah diadvokasi.	Setelah kegiatan advokasi BBPOM di Bandung langsung melanjutkan kegiatan survey pasar dan Bimtek Pengelola Pasar	-	-

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-6**

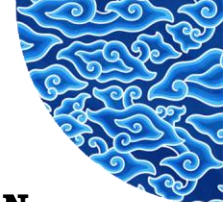
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN
PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **99,54%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3.51
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	70,00%	72,50%	103,57%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	70,00%	66,86%	95,51%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			99,54%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF





1. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

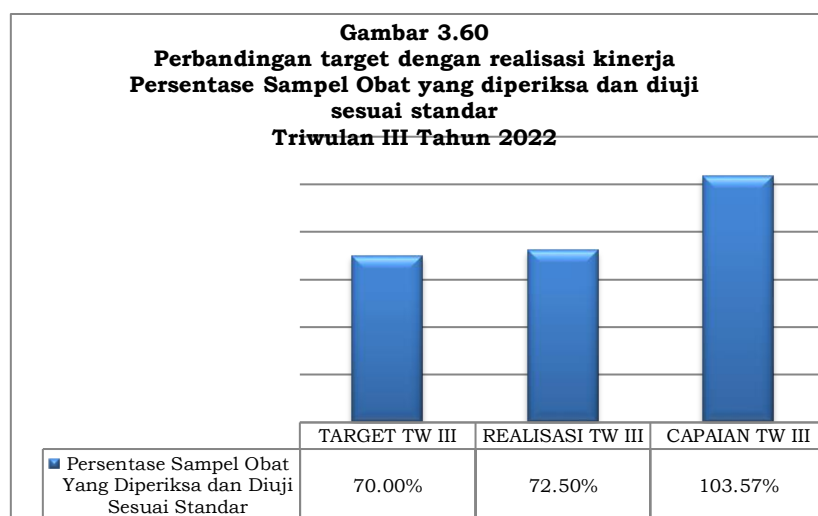
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Obat dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100%.

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

TABEL 3.52
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	70,00%	72,50%	103,57	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

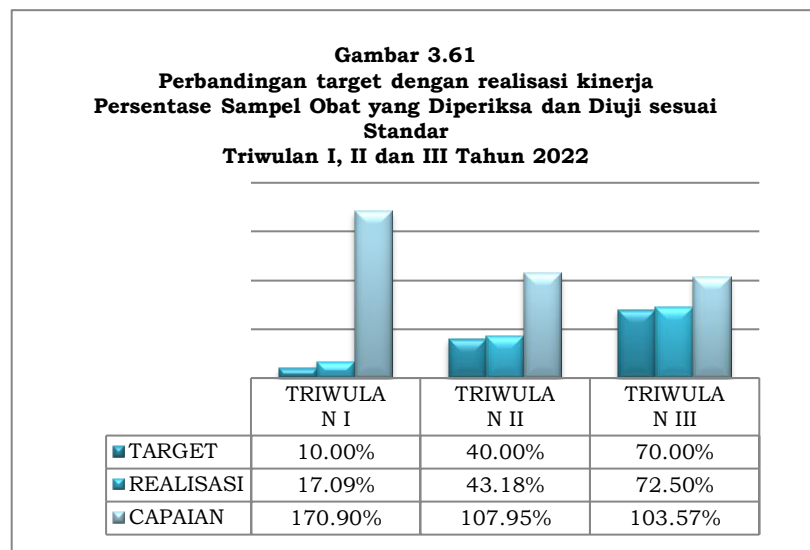
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022



Pada triwulan III, jumlah sampel obat yang disampling 2659 sampel dan jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 2237 sampel. Dari data tersebut, diperoleh nilai persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 72,50%. Target pada triwulan III yang telah ditetapkan sebesar 70,00%, dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **103,57%** dengan Kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70,00%. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 sebesar 17,09% (triwulan I), 43,18% (triwulan II) dan 72,50% (triwulan III). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II, dan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (170,9%), triwulan II (107,90%) dan triwulan III (103,57%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan III menurun tetapi masih memenuhi ekspektasi. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.61.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target triwulan III tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 70,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 103,57%.

D. ANALISIS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Keberhasilan pencapaian pada triwulan III tahun 2022 ini disebabkan oleh:



- ☸ Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 80,00% dan realisasinya sebesar 80,82% (2149 sampel dari 2659 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan pada triwulan III adalah 60,00% dan realisasinya mencapai 64,17% (2237 sampel dari 3486 sampel yang diuji). Sehingga target triwulan III untuk indikator kinerja ini sebesar 70,00%.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022, antara lain:

- ☸ Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan, Koordinator regionalisasi region 3 (BBPOM di DKI Jakarta) dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.
- ☸ Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- ☸ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☸ Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja ke depan, yaitu:

- ☸ Pemenuhan sampel obat yang diuji sesuai standar bisa dipenuhi sesuai target akhir tahun (100%), apabila ada penambahan peralatan laboratorium sesuai standar GLP. Sampel obat yang diuji laboratorium bisa melewati timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP, karena adanya antrian alat terutama peralatan utama seperti KCKT dan AAS.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

- ☸ Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji validasi dan verifikasi metode analisa.



- ☪ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Sampai dengan triwulan II tahun 2022 telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis personil melalui pelatihan dan webinar, yaitu 1) Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3). Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022; 4). Bimbingan Teknis Internal Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan judul Penetapan Kadar n-Heksan dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat Secara GC Headspace Detektor Spektrofotometri Massa; 5). Bimbingan Teknis Internal Kosmetika dengan judul Identifikasi Vitamin D2 dan D3 dalam Sediaan Kosmetik Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi pada tanggal 6-10 Juni 2022; 6). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat dan Nappza (Penetapan Kadar Natrium, Kalium, Kalsium dalam Sediaan Infus Ringer Laktat dengan metode AAS dan Penetapan Kadar Zat Terlarut hasil Uji Disolusi Parasetamol dan Kofein dalam Sediaan Tablet dengan metode KCKT) tanggal 8-12 Agustus 2022.



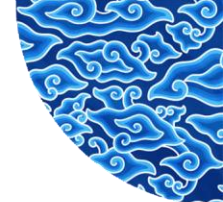
Gambar 3.62 Kegiatan Bimbingan Teknis Internal Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- ☪ Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator dan Subkoordinator.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

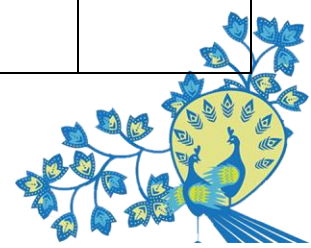
Tindakan lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:





TABEL 3.53
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YA G DIUJI SESUAI STANDAR”

Rekomendasi		Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP sampai dengan Triwulan III adalah 74,67%	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP sampai dengan Triwulan IV	Januari 2023
b	Pada tahun 2021 masih terkendala pandemic Covid-19, sehingga masih dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target tahun 2021 dapat tercapai. Dengan penyesuaian ini, dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.	Telah dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS yang dipakai oleh Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan		
c	Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar, Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.	Telah dilakukan peningkatan kompetensi teknis pengujian sebagai berikut : 1. Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Obat dan Nappza (Penetapan Kadar Natrium, Kalium dan Kalsium dalam Infus Ringer Laktat secara AAS) tanggal 6-10 Juni 2022. 2. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Penetapan Kadar n-Hexan dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat secara Kromatografi Gas Headspace Detektor Spektrometri Massa) tanggal 6-10 Juni 2022. 3. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Kosmetik (Identifikasi Vitamin D2 dan D3 dalam Sediaan Kosmetik secara Kromatografi Cair		



Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
	Kinerja Tinggi) tanggal 6-10 Juni 2022. 4. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat dan Nappza (Penetapan Kadar Natrium, Kalium, Kalsium dalam Sediaan Infus Ringer Laktat dengan metode AAS dan Penetapan Kadar Zat Terlarut hasil Uji Disolusi Parasetamol dan Kofein dalam Sediaan Tablet dengan metode KCKT) tanggal 8-12 Agustus 2022. 5. Bimbingan Teknis Analisis Sterilitas tanggal 5-10 Juni 2022 6. Bimbingan Teknis Analisis Kosmetik tanggal 10-15 Juli 2022		
d	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.	Monev timeline pengujian obat sampai dengan triwulan III	Monev timeline pengujian obat sampai dengan triwulan IV Januari 2023

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Makanan dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100%.

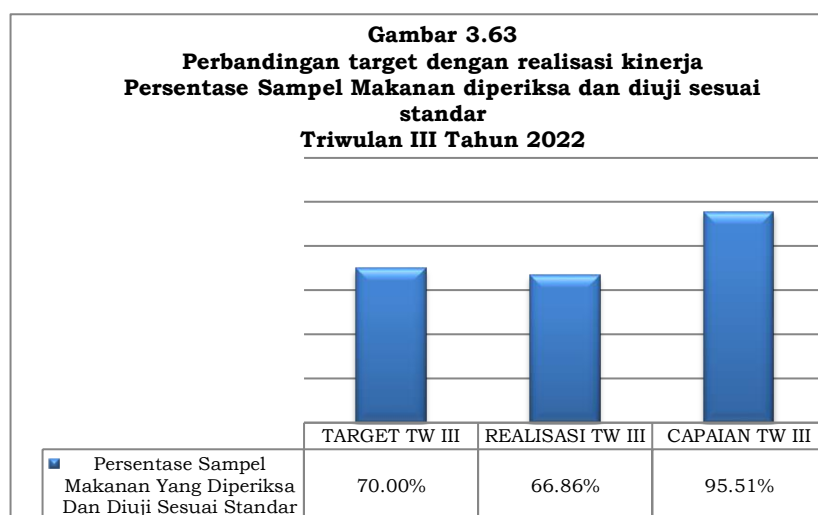


Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

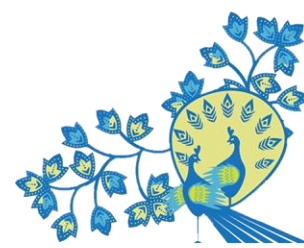
**TABEL 3.54
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	70,00%	66,86	95,51%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

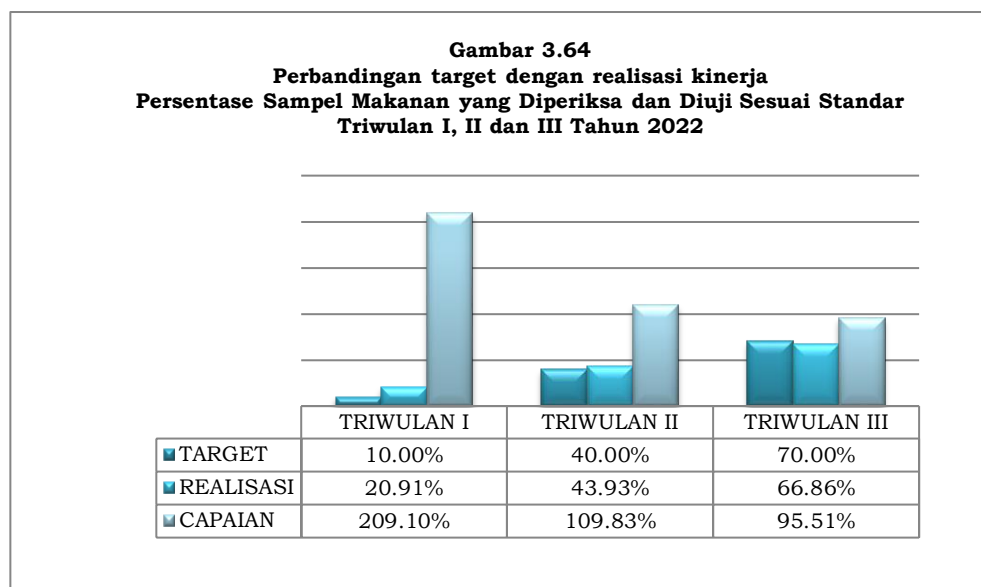


Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70,00%. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2022 sebesar 66,86% dengan rincian jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebesar 81,17% (sebanyak 940 sampel dibandingkan terhadap jumlah target sampel Makanan yang diperiksa sebanyak 1158 sampel) dan jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebesar 52,55% (sebanyak 845 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang diuji sebanyak 1608 sampel). Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **95,51 %** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)**.



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70,00%. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 sebesar 20,91% (triwulan I), 43,93% (triwulan II) dan 66,86%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I (209,10%), triwulan II (109,83%), triwulan III (95,51%). Nilai pencapaian sasaran pada triwulan III menurun dibandingkan triwulan II. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.59.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III sebesar 66,86%.

D. ANALISIS KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kegagalan pencapaian pada triwulan III tahun 2022 ini disebabkan oleh:

- ☛ Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 80,00% dan realisasinya sebesar 81,17% (940 sampel dari 1158 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan pada triwulan III adalah 60,00% dan realisasinya mencapai 52,55% (845 sampel dari 1608 sampel yang diuji). Jadi realisasi sampel yang diuji masih dibawah target hal ini karena sampel.



Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan III tahun 2022, antara lain :

- ☰ Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan, Koordinator regionalisasi region 3 (BBPOM di DKI Jakarta) dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.
- ☰ Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- ☰ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☰ Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

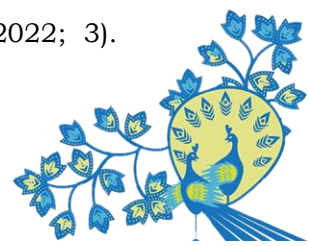
Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja ke depan, yaitu:

- ☰ Pemenuhan sampel obat yang diuji sesuai standar bisa dipenuhi sesuai target akhir tahun (100%), apabila ada penambahan peralatan laboratorium sesuai standar GLP. Sampel obat yang diuji laboratorium bisa melewati timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP, karena adanya antrian alat terutama peralatan utama seperti KCKT dan AAS.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENINGKATAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang peningkatan pencapaian kinerja, antara lain:

- ☰ Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji validasi dan verifikasi metode analisa.
- ☰ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Sampai dengan triwulan III tahun 2022 telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis personil kimia pangan melalui pelatihan dan webinar, yaitu 1) Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3).



Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022; 3). Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian 3-MCPD dalam Kecap secara GC-MS) tanggal 6-10 Juni 2022; 4). Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian Residu Pestisida dalam Air) tanggal 13-17 Juni 2022; 5). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan (Penetapan Kadar Simultan Logam Berat dalam AMDK dengan metode ICP-MS) tanggal 8-12 Agustus 2022.

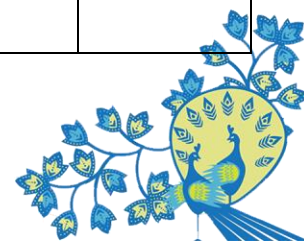
- ☛ Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator dan Subkoordinator.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

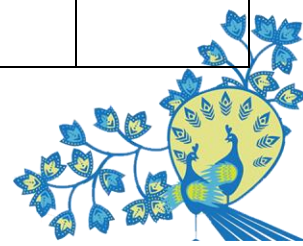
Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.55
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan III
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR”**

Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
a	Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP sampai dengan Triwulan III adalah 74,67%	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP sampai dengan Triwulan IV	Januari 2023
b	Pada tahun 2021 masih terkendala pandemic Covid-19, sehingga masih dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target tahun 2021 dapat tercapai. Dengan penyesuaian ini, dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga	Telah dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS yang dipakai oleh Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan		



Rekomendasi	Tindaklanjuti			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
	pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.			
c	Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar dan Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel pengujian kimia pangan.	Telah dilakukan peningkatan kompetensi teknis pengujian sebagai berikut : 1. Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian 3-MCPD dalam Kecap secara GC-MS) tanggal 6-10 Juni 2022 2. Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian Residu Pestisida dalam Air) tanggal 13-17 Juni 2022 3. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan (Penetapan Kadar Simultan Logam Berat dalam AMDK dengan metode ICP-MS) tanggal 8-12 Agustus 2022 4. Bimbingan Teknis Analisis DNA 9-13 Mei 2022 5. Bimbingan Teknis Internal Analisis DNA 18-22 Juli 2022		
d	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.	Monev timeline pengujian makanan sampai dengan triwulan III	Monev timeline pengujian makanan sampai dengan triwulan IV	Januari 2023
a	Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP sampai dengan Triwulan III adalah 74,67%	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP sampai dengan Triwulan IV	Januari 2023
b	Pada tahun 2021 masih terkendala pandemic Covid-19, sehingga masih dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target tahun	Telah dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji terutama peralatan utama yang dipakai beberapa laboratorium sekaligus seperti GCMS yang dipakai oleh Laboratorium Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan		



Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
2021 dapat tercapai. Dengan penyesuaian ini, dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.			

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-7

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **128,55%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.37.

TABEL 3.56
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-7
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00%	74.56%	128.55%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
Nilai Pencapaian Sasaran			128.55%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang



terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

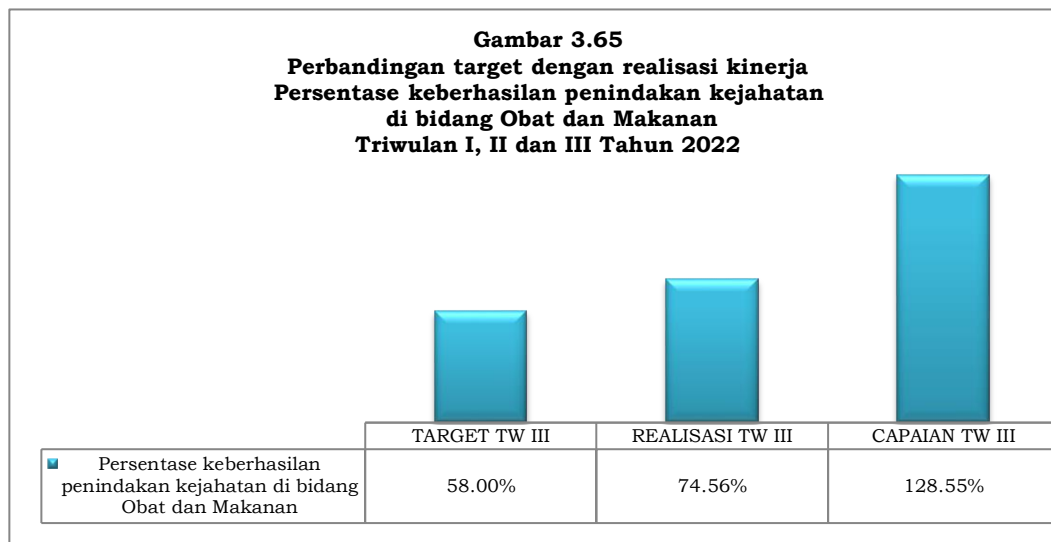
Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

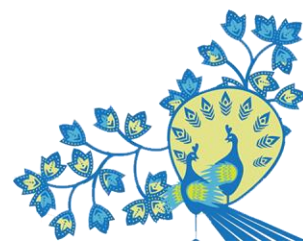
Nilai Tingkat Keberhasilan =

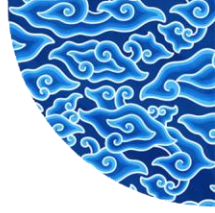
$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022



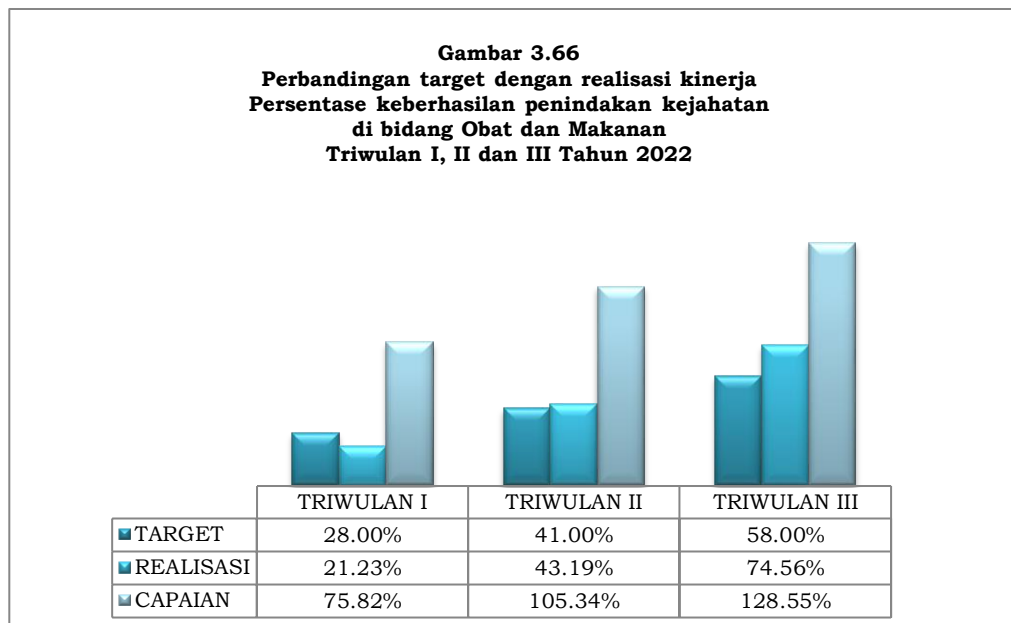
Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 58,00%. Realisasi kinerja untuk sasaran kegiatan ke-7 sebesar 74,56% sehingga capaian indikator sasaran kegiatan ke-7 sebesar **128,55%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.





B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 58,00% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 sebesar 21,23% (triwulan I), 43,19% (triwulan II) dan 74,56% (triwulan III). Jika capaian pada triwulan I, II, dan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian pada triwulan I (75,82%), triwulan II (105,34%) dan triwulan III (128,55%). Capaian pada triwulan III meningkat sebanyak 23,21% dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, bisa dilihat capaian kinerja pada sasaran kegiatan 7 mengalami kenaikan pada setiap triwulan. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.66.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 67,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan III terhadap target tahun 2022 adalah sebesar **111,28 %** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi (Efektif)**.



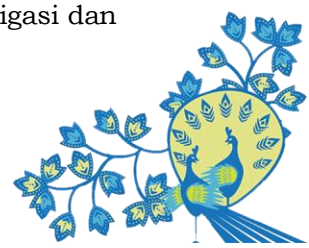
D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Analisis penyebab peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☰ Meningkatnya hubungan baik dengan lintas sektor. Beberapa pendekatan baru yang dilakukan dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor cukup efektif memperkuat hubungan dengan lintas sektor. Hubungan dengan lintas sektor yang baik berpengaruh dalam kelancaran penyelesaian berkas perkara yang ditangani
- ☰ Jejaring informasi terkait target penindakan semakin kuat dan luas. Semakin kuat dan luasnya jejaring informasi yang terbentuk membuat informasi target penindakan yang diterima semakin banyak dan valid. Hal ini sangat menguntungkan dalam penentuan target operasi intelijen yang nantinya akan menjadi target penindakan
- ☰ Adanya informasi tambahan dari pengembangan kasus yang sedang ditangani
- ☰ Meningkatnya integritas personel penindakan. Permasalahan integritas pada triwulan sebelumnya telah dievaluasi dan diperbaiki.
- ☰ Kondisi masyarakat yang kembali normal setelah setelah wabah pandemic corona

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan ke depan) antara lain:

- ☰ Mempertahankan hubungan baik dengan pejabat struktural di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dan Kejati Jabar untuk kelancaran kegiatan penindakan dan pemberkasan tindak pidana bidang obat dan makanan
- ☰ Meningkatkan hubungan baik dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat khususnya Korwas PPNS Polda Jawa Barat
- ☰ Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pengembangan kasus sebelumnya, pelaporan dari masyarakat melalui infokom yang diteruskan ke kelompok substansi penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara
- ☰ Membangun jejaring informasi secara berkelanjutan tentang kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah Jawa Barat
- ☰ Melakukan sistem komunikasi terbatas dalam penentuan target investigasi dan operasi penindakan serta melakukan rotasi atau penggantian terhadap petugas yang bertugas dalam pembuatan surat perintah tugas investigasi dan surat perintah operasi penindakan



E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke-7, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandung” dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Balai Besar POM di Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

✦ Penyidikan Obat dan Makanan

Pada Triwulan III tahun 2022, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 1 perkara yang dilakukan proses projusticia. Perkara adalah kasus yang ditindak lanjuti secara pro justicia berdasarkan hasil gelar perkara. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 1 perkara yg ditangani Bidang Penindakan pada Triwulan III terdiri dari 1 perkara produksi pangan dengan tambahan bahan yang dilarang yaitu Tahu Formalin di Wilayah Kabupaten Bogor. Proses penyidikan atas 1 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan masih berlanjut dan diharapkan dapat selesai tahap 2 di tahun berjalan.



Gambar 3.66 Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan



☛ **Intelijen**

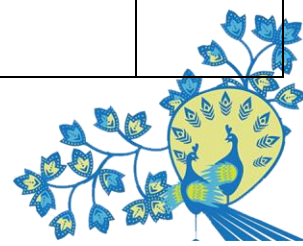
Kegiatan intelijen adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online. Kegiatan intelijen yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2022 terhadap 7 sarana, namun hanya 4 sarana yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Dari jumlah tersebut, 1 sarana ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan pada Triwulan III dengan output kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 1 kasus Pro-justitia ditangani Balai Besar POM di Bandung dan 3 sarana perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjuti terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.57
Matriks Tindaklanjuti Rekomendasi Triwulan III
“Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan
di Bidang Obat dan Makanan”**

Rekomendasi	Tindaklanjuti		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	<p>Peningkatan kemampuan sumber daya manusia secara berkelanjutan dalam mengatasi perkembangan modus kejahatan tindak pidana bidang obat dan makanan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar Tahun Anggaran 2022 tgl 06 Juni-05 Juli 2022</p> <p>Analisis Intelijen Obat dan Makanan tgl 30 Juni-30 Juli 2022</p>		Desember 2022
b	<p>Menjaga soliditas dan sinergisme lintas sektor ICJS dalam memaksimalkan upaya penindakan tindak pidana bidang obat dan makanan</p> <p>Melakukan koordinasi dengan Korwas Direskrimsus Polda Jabar, Diresnarkoba Polda Jabar dan Kejati Jabar</p> <p>Melakukan Audiensi dengan Bareskrim Polda Metro Jaya</p>	Melakukan koordinasi secara berkala dengan Korwas Direskrimsus Polda Jabar, Diresnarkoba Polda Jabar dan Kejati Jabar	Desember 2022



Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
c	Melakukan penyelesaian carry over perkara tahun 2018,2019 dan 2021 Melakukan koordinasi dengan Aspidum dan staff Kejati Jabar	Mengirimkan surat permintaan tanggapan/keterangan terkait penyelesaian carry over perkara tahun 2018,2019 dan 2021 Melakukan koordinasi dengan Aspidum dan staff Kejati Jabar	Melakukan koordinasi secara berkala dengan Kejati Jabar Desember 2022
d	Melakukan pemeliharaan gudang penyimpanan barang bukti secara memadai serta mengikutsertakan Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) diklat	Melakukan pencatatan inventarisasi barang bukti menggunakan Berita Acara Penerimaan, Berita Acara Pengeluaran, dan Buku Daftar Barang Bukti Melakukan pengecekan barang bukti secara berkala dan didokumentasikan dalam Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Buku Kontrol Barang Bukti	Melakukan pemeliharaan gudang termasuk kebersihan gudang, terhindar dari binatang pengerat dan melakukan pemeliharaan lainnya Desember 2022

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

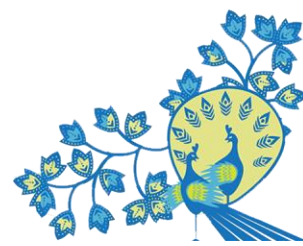
Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-8**

**TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran. Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG

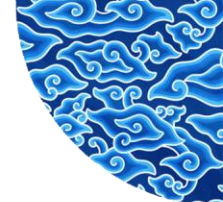


Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Manajemen Perubahan: bobot 5%; (2) Penataan Tatalaksana: bobot 5%; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; (5). Penguatan Pengawasan: bobot 15%; dan (6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas KemenPAN dan RB Nomor : B/89/PW.04/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2021 pada point a dan b; dan Surat Inspektur Utama BPOM Nomor PI.06.06.7.72.12.21.62 tanggal 23 Desember 2021 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan POM Tahun 2021 pada poin c dan d, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:





TABEL 3.58
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG”

Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
a	Mengembangkan inovasi yang telah dibangun secara berkelanjutan dalam hal penguatan integritas dan sistem pelayanan untuk mewujudkan WBBM	Monitoring dan Evaluasi efektifitas inovasi yang telah dibangun secara berkala	Monitoring dan Evaluasi efektifitas inovasi yang telah dibangun secara berkala dan melakukan pengembangan inovasi-inovasi lainnya khususnya dalam hal penguatan integritas dan sistem pelayanan	30 Desember 2022
b	Membangun unit kerja dengan orientasi pelayanan prima sehingga dapat menjadi unit kerja percontohan, baik di lingkup BPOM maupun di lingkup antar instansi pemerintah	BBPOM di Bandung mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2022 dari BPOM dengan nilai Indeks Pelayanan Publik 4,67	Tindaklanjut rekomendasi hasil penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2022	30 Desember 2022
c	Memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal		Melengkapi data dukung tindaklanjut rekomendasi dan mengupload data dukung tersebut pada aplikasi SAPA APIP, serta berkoordinasi dengan PIC Auditor Inspektorat Utama BPOM.	30 Desember 2022
d	Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja		Pengembangan inovasi-inovasi sesuai karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan.	30 Desember 2022

2. INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

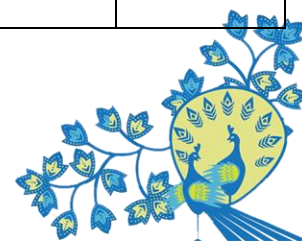


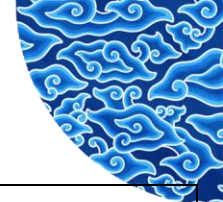
Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya berdasarkan Surat Inspektur Utama Nomor PI.04.7.71.12.21.97 tanggal 31 Desember 2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

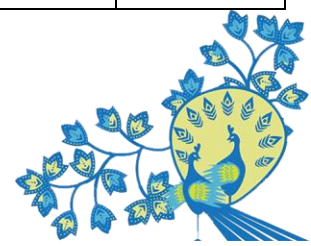
**TABEL 3.59
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan III
"Indeks AKIP BBPOM di Bandung"**

Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
1 PERENCANAAN			
a Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM	Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024		
b Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi	Telah disusun Kertas Kerja Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024		
2 PENGUKURAN			
a Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM.	Telah disampaikan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor BOT.01.02.12A.12A5.06.22.1622 perihal Penyampaian Masukan untuk Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan tanggal 17 Juni 2022 kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Ditanggapi dengan Surat Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor : B-PR.08.01.21.213.07.22.232 perihal Tanggapan atas Masukan Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan tanggal 29 Juli 2022.		





Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
b	Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.	Surat Edaran Nomor : KP.09.01.2.24.01.22.01 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS dalam Penilaian Kinerja Individu melalui Aplikasi SIMAKIN BPOM Sebagai Dasar Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM. Berdasarkan SE tersebut, pada tahun 2022 telah disusun SKP setiap individu berdasarkan indikator kinerja tingkat unit. Pengukuran dan penilaian kinerja individu dilaksanakan setiap triwulan melalui aplikasi SIMAKIN tersebut yang menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai.		
3	PELAPORAN			
	Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja Interim merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam melakukan Reviu Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024 (penetapan target). Selain itu, dalam analisa keberhasilan dan kegagalan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana tindaklanjut dalam upaya meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya		
4	EVALUASI INTERNAL			
a	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi.		Melengkapi monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi	28 Februari 2023
b	Melengkapi rencana aksi tindak lanjut yang dituangkan pada laporan evaluasi berkala dan/atau laporan kinerja interim dengan Person in Charge (PIC) maupun timeline penyelesaian tindak lanjut.		Melengkapi Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim, Laporan Kinerja Tahunan dengan rekomendasi, PIC dan timeline penyelesaian tindaklanjut	28 Februari 2023
5	CAPAIAN KINERJA			



Rekomendasi	Tindaklanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal secara optimal.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara berkala setiap bulan untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada bulan berikutnya	Pemberian Reward dan Punishment atas capaian kinerja dan anggaran kepada Bagian/Poksi berdasarkan hasil Laporan Evaluasi Internal	30 Desember 2022

**SASARAN
KEGIATAN
KE-9**

**TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG
BERKINERJA OPTIMAL**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran.

INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai; (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan; (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT yang dipersiapkan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM.

Pengukuran IP-ASN tahun 2022 diukur pada akhir Triwulan IV menggunakan aplikasi <https://siasn.pom.go.id/sirensdm/ip-asn>. Namun demikian, berbagai kegiatan tetap dilaksanakan pada Triwulan III untuk meningkatkan realisasi kinerja, antara lain:

- **Kualifikasi Pendidikan:**
Usulan calon peserta tugas belajar dan ijin belajar batch 4 Tahun 2022 ke PPSDM; Monitoring dan Evaluasi Peserta Tugas Belajar secara berkala.

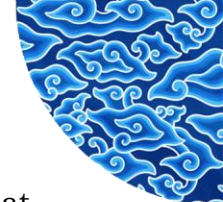


- **Kompetensi:**
Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai Pejabat Fungsional PFM; dan Pemetaan Kompetensi Pejabat Fungsional PFM
- **Kinerja:**
Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya capaian SKP TW2 tahun 2022; Pengisian capaian SKP seluruh Pegawai TW 3 Tahun 2022 melalui aplikasi SIMAKIN
- **Disiplin:**
Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala

Diharapkan proses pencapaian kinerja pada akhir tahun sesuai target, dan proses keberhasilan di TW 3 dipengaruhi berbagai faktor, antara lain:

- **Kualifikasi Pendidikan:**
BBPOM di Bandung memfasilitasi peserta Tugas Belajar serta Ijin Belajar untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan. Pada TW3 tahun 2022 terdapat dua pegawai telah menyelesaikan TUBEL, sedangkan ada penambahan dua pegawai yang memulai TUBEL, total ada sejumlah tujuh Pegawai sedang menjalani Tugas Belajar dan dua pegawai Ijin Belajar.
- **Kompetensi:**
Pemenuhan persyaratan target SKP Pengembangan Kompetensi 20 JP untuk seluruh pegawai sangat berpengaruh dalam peningkatan kompetensi. Selain itu, program Uji Kompetensi untuk Pejabat Fungsional, terutama PFM, juga berpengaruh dalam peningkatan Kompetensi Pegawai
- **Kinerja:**
Capaian Kinerja seluruh Pegawai seluruhnya baik berdasarkan Penilaian atasan langsung, sangat dipengaruhi kompetensi manajerial masing-masing atasan
- **Disiplin:**
Pencegahan Pelanggaran Disiplin, melalui sosialisasi Peraturan Disiplin berperan dalam pemahaman dan pelaksanaan Disiplin Pegawai BBPOM di Bandung





Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.60
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG”**

	Rekomendasi	Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan: Usulan calon peserta tugas belajar dan ijin belajar batch 4 Tahun 2022 ke PPSDM; Monitoring dan Evaluasi Peserta Tugas Belajar secara berkala.		Pelaporan Pegawai yang telah selesai tugas belajar tahun 2022 (2 pegawai) Monev pegawai sedang tubel (7 pegawai) dan ijin belajar (3 pegawai)	26 Desember 2022
b	Peningkatan Kompetensi: Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai Pejabat Fungsional PFM;		Monev Pengembangan Kompetensi TW4 2022 dan capaian target 20 JP	30 Desember 2022
c	Pencapaian target Kinerja: Monitoring dan evaluasi SKP secara berkala		Monev pengisian SKP melalui aplikasi SIMAKIN TW4 2022	30 Desember 2022
d	Peningkatan Indeks Disiplin: Pelaporan disiplin kehadiran tepat waktu dan sosialisasi peraturan disiplin, kode etik dan kode perilaku terbaru		Monev akumulasi disiplin kehadiran TW4 2022 dan sosialisasi peraturan disiplin kepada seluruh pegawai	30 Desember 2022
a	Peningkatan koordinasi dengan PUSDATIN untuk optimalisasi SIPT serta peningkatan komunikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung untuk optimalisasi email corporate semakin ditingkatkan dengan monitoring perbulan.		Monev aplikasi SIPT oleh admin SIPT Balai dan koordinasi dengan role sampling serta PUSDATIN di grup whatsapp; Input data Gaji setiap awal bulan ke email seluruh pegawai	30 Desember 2022
b	Peningkatan monitoring terhadap akses dan pemanfaatan koneksi BOC dan shared folder oleh penanggungjawab TIK dilaksanakan perbulan.		Monev shared folder simpan.pom.go.id berkoordinasi dengan pengelola e-registrasi secara berkala setiap awal bulan	30 Desember 2022

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN
KEGIATAN
KE-10**

**MENGUATNYA LABORATORIUM PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Namun pada triwulan III, yang diukur hanya Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar 128,00% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.61.

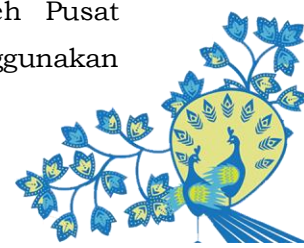
**TABEL 3.61
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10
TRIWULAN III TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25	2.88	128.00%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			128.00%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

1. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dengan menggunakan



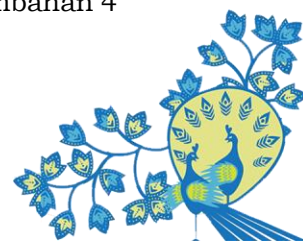
tools penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)
Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Hasil Uji Profisiensi yang inlier. Hasil Uji Kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.
2. Penilaian Standar Kompetensi
Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.
 - ☰ Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat pada Formulir Informasi Kompetensi. Hasil sudah dinyatakan dalam persen (%).
 - ☰ Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
 - ☰ Hasil Rekapitulasi masing-masing Laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.
3. Penilaian Standar Peralatan
 - ☰ Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
 - ☰ Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
 - ☰ Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pada triwulan III, belum dilakukan pengukuran terhadap realisasi kinerja indikator sasaran ini, karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun anggaran 2022. Akan tetapi sampai dengan triwulan III telah dilakukan monitoring untuk pemenuhan SKL yang telah dilaksanakan, dengan nilai 81,24% dan rincian nilai dijelaskan sebagai berikut :

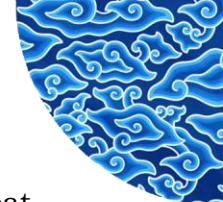
- 1) Persentase pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 84,2%:
Penambahan kemampuan uji laboratorium kimia obat (penambahan 10 item ruang lingkup) dan laboratorium kimia obat tradisional dan suplemen Kesehatan (penambahan 10 ruang lingkup), laboratorium kimia kosmetik (penambahan 4 ruang lingkup), laboratorium kimia pangan (penambahan 4



ruang lingkup) dan laboratorium mikrobiologi (penambahan 3 ruang lingkup).

- 2) Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi sebesar 84,88% : Telah dilakukan kegiatan bimbingan teknis internal dan webinar terkait teknis laboratorium untuk meningkatkan pengetahuan personil pengujian, antara lain yaitu 1). Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3). Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022; 4). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Penentuan Kadar n-Hexan dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat secara Kromatografi Gas Headspace Detektor Spektrometri Massa) tanggal 6-10 Juni 2022; 5). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Kosmetik (Identifikasi Vitamin D2 dan D3 dalam Sediaan Kosmetik secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) tanggal 6-10 Juni 2022; 6). Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian 3-MCPD dalam Kecap secara GC-MS) tanggal 6-10 Juni 2022; 7). Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Pangan dan Air (Pengujian Residu Pestisida dalam Air) tanggal 13-17 Juni 2022; 8). Pengembangan Kompetensi Laboratorium Bidang Obat dan Nappza (Penetapan Kadar Natrium, Kalium dan Kalsium dalam Infus Ringer Laktat secara AAS) tanggal 6-10 Juni 2022; 9). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat dan Nappza (Penetapan Kadar Natrium, Kalium, Kalsium dalam Sediaan Infus Ringer Laktat dengan metode AAS dan Penetapan Kadar Zat Terlarut hasil Uji Disolusi Parasetamol dan Kofein dalam Sediaan Tablet dengan metode KCKT) tanggal 8-12 Agustus 2022; 10). Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan (Penetapan Kadar Simultan Logam Berat dalam AMDK dengan metode ICP-MS) tanggal 8-12 Agustus 2022.
- 3) Pemenuhan Standar Alat Laboratorium sebesar 74,67%: Terjadi penurunan untuk standar peralatan karena ada alat yang rusak yaitu water bath di laboratorium kimia dan electrical pippetor serta micropipet di laboratorium mikrobiologi. Sampai dengan triwulan III telah dibuat rencana pemenuhan penambahan beberapa alat laboratorium untuk meningkatkan alat laboratorium sesuai standar GLP. Pada substansi Pengujian Kimia, terdapat penambahan sebanyak 4 alat, yaitu Microwave Digester, Disolution Tester, Karl Fischer dan ICP MS. Pada substansi Pengujian Mikrobiologi ada penambahan sebanyak 4 alat, yaitu Biossafety Cabinet Class II Tipe A2; Incubator, pH Meter dan Particle Counter.





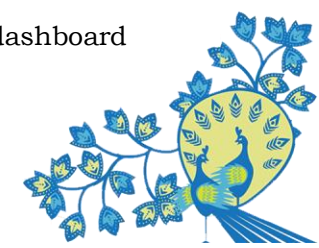
Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.62
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan III
"Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP"**

	Rekomendasi	Tindaklanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline
a	Meningkatkan nilai pemenuhan peralatan dengan menambahkan pengadaan Alat Laboratorium yang dilaksanakan di tahun 2022.	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP sampai dengan Triwulan III adalah 74,67%	Pemenuhan peralatan sesuai standar GLP sampai dengan Triwulan IV	Januari 2023
b	Meningkatkan pengembangan kompetensi ini sudah masuk ke dalam rencana pengembangan kompetensi di tahun 2022.	Pemenuhan kompetensi sesuai standar GLP sampai dengan Triwulan III adalah 84,88%	Pemenuhan kompetensi sesuai standar GLP sampai dengan Triwulan IV	Januari 2023

2. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM Operational Centre (BOC). Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard

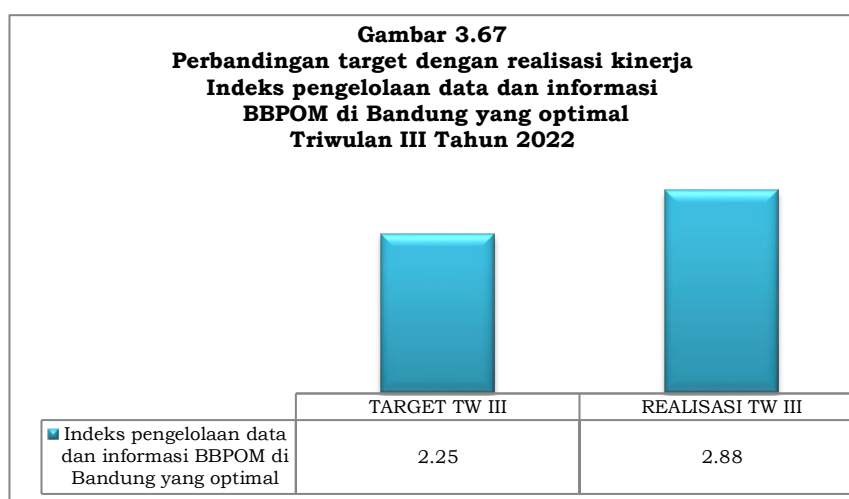


BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

TABEL 3.63
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”
TRIWULAN III TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25	2.88	128.00%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

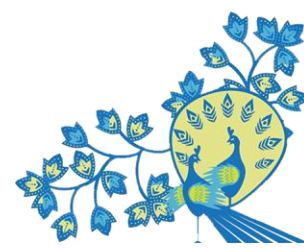
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022

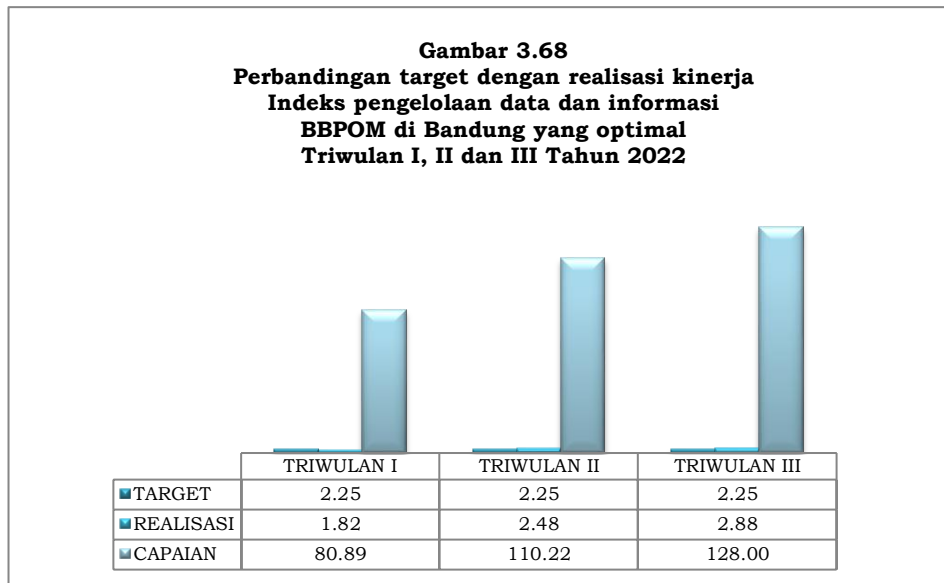


Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2,25 sedangkan realisasinya sebesar 2,88. Dengan rincian, pada komponen Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi sebesar 2,75 dan komponen Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan sebesar 3. Sehingga capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **128 %** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Pada triwulan III, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2,25 sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Indeks sebesar 80,89% (triwulan I), 110,22% (triwulan II), dan 128% (triwulan III). Capaian pada triwulan III naik sebanyak 17,78% dibandingkan pada triwulan II. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.68.





C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 2,25 (dua koma dua lima). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan III sebesar 128 % (Tidak dapat disimpulkan).

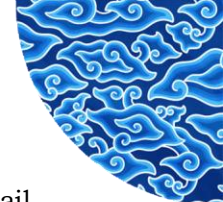
D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Penyebab kecenderungan kenaikan capaian kinerja pada triwulan III tahun 2022, sebagai berikut:

- ☛ Pemanfaatan email: Masih belum optimal pemanfaatan email corporate oleh pegawai pada TW II, yaitu rata-rata 82.83 %, seperti tampak dari tabel berikut:

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email									
	TW I			TW II			TW III		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
total_akun_individu	146	147	150	150	149	149	149	149	147
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1
total_individu_login	85	102	103	122	125	90	119	89	119
total_individu_aktif	85	102	103	122	125	90	119	89	119
total_unitbalai_aktif	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aspek Login (%)	17,47	20,82	20,6	24,4	25,17	18,12	23,96	17,92	24,29
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	17,47	20,82	20,6	24,4	25,17	18,12	23,96	17,92	24,29
Perhitungan (%)	74,94	81,64	81,2	88,8	90,34	76,24	87,92	75,84	88,58
Perhitungan per TW	74,94	78,29	79,26	81,65	83,38	82,19	83,01	82,12	82,83
Nilai Indeks	2	2	2	2	2	2	2	2	2





Hal tersebut disebabkan, pegawai lebih banyak menggunakan akses email gmail untuk akses komunikasi dan belum ada manfaat tambahan untuk penggunaan fitur email corporate.

- ☰ Akses BOC dan Login BOC: Pada TW III akses dan login BOC dilaksanakan secara rutin dan berkala sehingga indeks pemanfaatan maksimal yaitu 3 (tiga).
- ☰ Akses Sharing Folder: Pada TW III kecenderungan peningkatan akses sharing folder semakin tinggi, yaitu rata-rata 125,3 dengan Indeks 3 (tiga), sebagian besar akses shared folder adalah untuk download label produk e-Registration.

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder									
Aktifitas	TW I			TW II			TW III		
	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Jumlah Akses	44	53	73	182	110	102	46	352	166
Perhitungan	44	48,5	56,67	88	92,4	94	87,14	120,25	125,33
Nilai Indeks	1	1	2	2	2	2	2	3	3

- ☰ Berita Aktual: Pada TW III ada kecenderungan peningkatan jumlah viewer berita aktual menjadi 123,37 pengunjung, dengan jumlah berita yang diunggah cukup banyak yaitu rata-rata kumulatif 13,78 berita. Peran penting tim media sosial untuk pemanfaatan subsite bandung.pom.go.id untuk upload kegiatan BBPOM di Bandung sangat besar dalam peningkatan indeks tersebut, karena pada bulan September terjadi kecenderungan penurunan upload berita media sosial dan pengunjung.

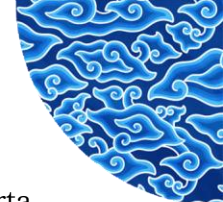
Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual									
Aktifitas	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
	Jumlah Upload	8	2	16	16	12	19	20	25
Jumlah Viewer	6284	446	2930	2060	694	1240	776	587	281
Perhitungan Rata2 Berita	8	5	8,67	10,5	10,8	12,17	13,29	14,75	13,78
Perhitungan Rata2 Pengunjung	785,5	673	371,54	279,05	229,89	187,04	155,16	127,26	123,37
Indeks Per TW	3	3	3	3	3	3	3	3	3

- ☰ SPIMKER dan SIPT: Secara umum untuk SPIMKER dan SIPT telah dilaksanakan dengan baik pada TW III; Untuk SPIMKER pemanfaatan cukup tinggi, yaitu 99.35% dengan indeks komposit maksimal 0,6; namun untuk SIPT pada TW III, pemanfaatan hanya mencapai 106,74% dengan indeks komposit maksimal 2,4.

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

- ☰ Pemanfaatan email: Sosialisasi berkala pemanfaatan email kepada seluruh pegawai; Integrasi Lembar Potongan Gaji yang dikirimkan melalui email; Koneksi aplikasi internal dengan akun email corporate seluruh pegawai; serta notifikasi akses aplikasi internal,





- ☰ Akses BOC dan Login BOC: Tertib administrasi akses dan login BOC, serta update data secara berkala sesuai oleh PIC tim TIK
- ☰ Sosialisasi Shared Folder, akses Berita Aktual oleh seluruh pegawai ditingkatkan.
- ☰ Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian input SIPT serta diharapkan ada peningkatan nilai Indeks setelah tim Pusdatin bergabung dengan WA grup SIPT BBPOM di Bandung.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja untuk periode berikutnya adalah:

- ☰ Peningkatan koordinasi dengan PUSDATIN untuk optimalisasi SIPT serta peningkatan komunikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung untuk optimalisasi email corporate semakin ditingkatkan dengan monitoring perbulan.
- ☰ Peningkatan monitoring terhadap akses dan pemanfaatan koneksi BOC dan shared folder oleh penanggungjawab TIK dilaksanakan perbulan.

E. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.64
MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”**

Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
a	Peningkatan koordinasi dengan PUSDATIN untuk optimalisasi SIPT serta peningkatan komunikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung untuk optimalisasi email corporate semakin ditingkatkan dengan monitoring perbulan.		Monev aplikasi SIPT oleh admin SIPT Balai dan koordinasi dengan role sampling serta role pengujian serta PUSDATIN di grup whatsapp; Input data Gaji setiap awal bulan ke email seluruh pegawai	30 Desember 2022
b	Peningkatan monitoring terhadap akses dan pemanfaatan koneksi BOC dan shared folder oleh penanggungjawab TIK dilaksanakan perbulan.		Monev shared folder simpan.pom.go.id berkoordinasi dengan pengelola e-registrasi secara berkala setiap awal bulan	30 Desember 2022

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



SASARAN
KEGIATAN
KE-11

TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG
SECARA AKUNTABEL

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **104,13%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.65.

TABEL 3.65
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-11
TRIWULAN III TAHUN 2022

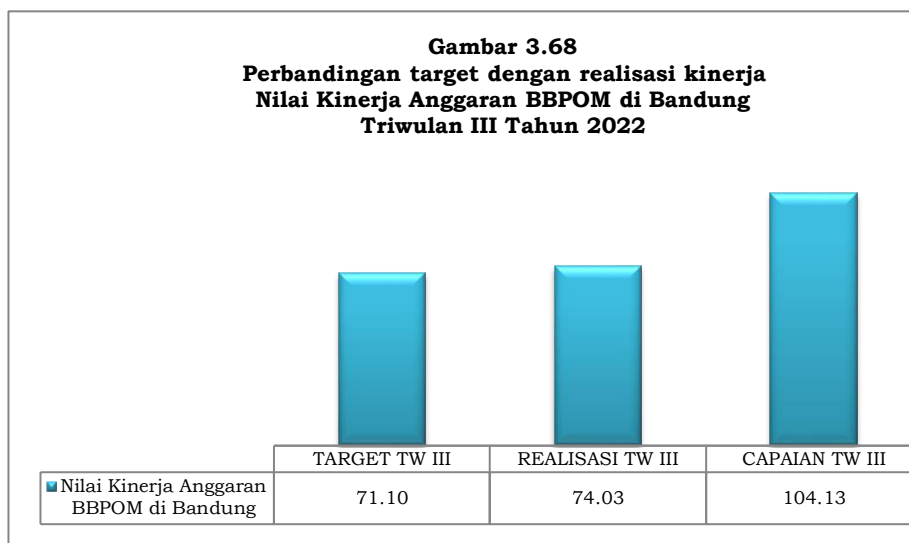
INDIKATOR	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III	KRITERIA	EFEKTIVITAS
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	71.10	74.03	104.13%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104.13%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022



Pada triwulan III tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 71,10, Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung triwulan III tahun 2022 sebesar 74,03, dengan rincian, nilai EKA sebesar 58,95 dan nilai IKPA sebesar 96,66. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **104,13%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

GAMBAR 3.68
“NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) BBPOM DI BANDUNG”
TRIWULAN III TAHUN 2022



TABEL 3.66
“NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
BBPOM DI BANDUNG”
TRIWULAN III TAHUN 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

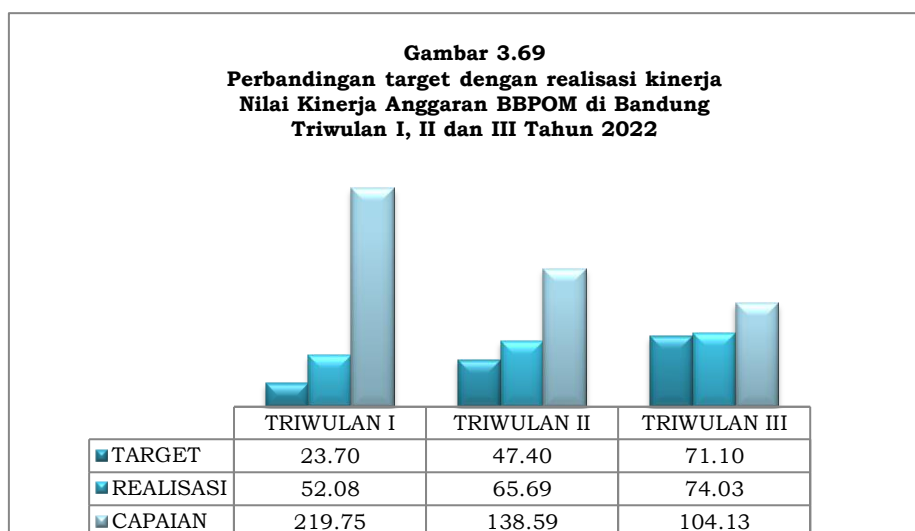
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	095	063	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Nilai	100.00	86.35	95.56	98.00	100.00	96.54	100.00	97.85	96.66	100%	96.66
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.64	19.11	9.80	10.00	9.65	24.46				
					Nilai Aspek	93.18		98.02			97.85					

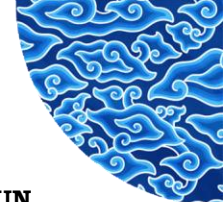
Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 23,70 (triwulan I), 47,40 (triwulan II) dan 71,10 (triwulan III). Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung tahun 2022 sebesar 52,08 (triwulan I), 65,69 (triwulan II), dan 74,03 (triwulan II). Jika capaian pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka capaian pada sebesar 219,75% (triwulan I), 138,59% (triwulan II) dan 104,13% (triwulan III). Capaian pada triwulan III menurun sebanyak 115,62% dibandingkan pada triwulan I dan sebanyak 34,46% dibandingkan pada triwulan II. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.67.





C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III DENGAN TARGET TAHUN 2021

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95,30. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan III terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan III (77,69%).

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KE DEPAN)

Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan antara lain oleh:

- ☰ Meningkatnya capaian rincian output, salah satu penyebabnya adalah kebijakan transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun. Sehingga realisasi dari seluruh rincian output mencapai target yang telah ditetapkan yang sebagian besar telah mencapai lebih dari 75% terhadap target yang telah ditetapkan dan terdapat 2 (dua) rincian output yang telah terealisasi 100% yaitu: Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan.
- ☰ Serapan anggaran BBPOM di Bandung pada triwulan III tahun 2022 sebesar Rp. 40.295.581.767,- (63,04%).berdasarkan OMSPAN.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan setiap bulan.
- ☰ Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan melakukan perubahan metode pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya secara luring menjadi daring atau hybrid. Serta percepatan pengadaan barang dan jasa yang sudah dimulai pada Bulan Desember 2021.
- ☰ Peningkatan kinerja pengelolaan APBN pada satker BBPOM di Bandung, antara lain: penyampaian laporan capaian output tepat waktu, pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.

Rekomendasi untuk perbaikan pada periode berikutnya yang disampaikan melalui Nota Dinas Plt. Sekretaris Utama BPOM Nomor: PR.06.01.2.21.09.22.793 tanggal 06 September 2022 perihal Laporan Monev Kinerja dan Anggaran sampai dengan



31 Agustus 2022, bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan NKA Satker adalah sebagai berikut:

- ☰ Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART dan aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.
- ☰ Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
- ☰ Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan Kemenkeu, menyusun plan of action (PoA) dan RPD triwulanan dengan cermat, melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA dan RPD, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
- ☰ Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
- ☰ Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.

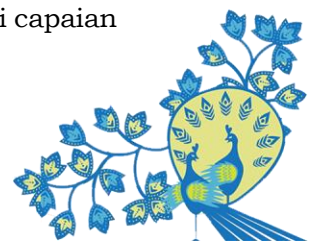
Selain itu, upaya untuk percepatan realisasi anggaran dapat dilaksanakan dengan:

- ☰ Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2022 dan segera melakukan revisi apabila terdapat perubahan pelaksanaan program/kegiatan.
- ☰ Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan.
- ☰ Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- ☰ Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
- ☰ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
 - Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
 - Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- ☰ Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Tim Manajemen Kinerja yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian



kinerja dan anggaran serta merumuskan rencana tindaklanjut untuk kegiatan bulan berikutnya.



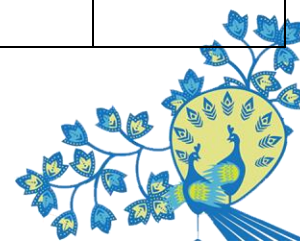
Gambar 3.70
Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

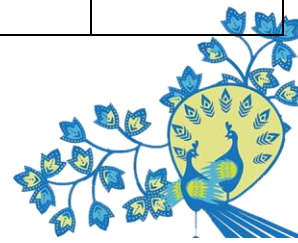
Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.67
Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan III
“NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”**

Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
a	Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART DJA secara tepat waktu dengan data yang akurat.	Telah dilakukan penginputan data kinerja melalui aplikasi SMART DJA sd Bulan September 2022/Triwulan III secara tepat waktu dengan data yang akurat	Melakukan penginputan data kinerja melalui aplikasi SMART DJA Bulan Oktober sd Desember 2022 secara tepat waktu dengan data yang akurat	30 Desember 2022
b	Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara berkala setiap bulan untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada bulan berikutnya	Pemberian Reward dan Punishment atas capaian kinerja dan anggaran kepada Bagian/Poksi berdasarkan hasil Laporan Evaluasi Internal	30 Desember 2022
c	Memastikan penyerapan anggaran triwulan sesuai dengan target (15%-40%-60%-99%) dengan cara menyegerakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan terutama belanja modal.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara berkala setiap bulan untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada bulan berikutnya	Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara berkala setiap bulan untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada bulan berikutnya	30 Desember 2022



Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
d	Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.	Memorandum Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: KU.01.12A.12A5.07.22.09 tentang Pengelolaan Anggaran TA 2022 yang salah satunya mengatur timeline penyampaian dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, diatur dengan SOP Mikro POM-12.01/CFM.04/SOP.01/IK.12A.02 Pelaksanaan Anggaran yang mengatur timeline penyampaian dokumen pertanggungjawaban.		
e	Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.	Memorandum Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: KU.01.12A.12A5.07.22.09 tentang Pengelolaan Anggaran TA 2022 dan SOP Mikro POM-12.01/CFM.04/SOP.01/IK.12A.02 Pelaksanaan Anggaran		
f	Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2022 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.	Telah dilakukan revisi anggaran baik DIPA/POK TA 2022, diantaranya adalah kebijakan Automatic Adjustment, dan penambahan titik KIE dengan Tokoh Masyarakat, dll	Melakukan revisi DIPA/POK sesuai dengan kebutuhan, antara lain tindaklanjut terhadap kebijakan Automatic Adjustmet dll	November 2022
g	Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara berkala setiap bulan untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada bulan berikutnya		
h	Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.	Realisasi anggaran untuk Belanja Modal (53) sampai dengan Triwulan III sebesar 89,68%, dan telah melebihi target penyerapan anggaran triwulan III sebesar 70%.	Percepatan penyelesaian pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kontrak.	30 Desember 2022
i	Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.	Telah dilaksanakan KIE dengan Tokoh Masyarakat sampai dengan Bulan September 2022 sebanyak 55 titik KIE dari 118 titik KIE	Percepatan pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat sebanyak sisa titik KIE yang belum terlaksana	30 Desember 2022
j	Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.	SOP Mikro POM-12.01/CFM.04/SOP.01/IK.12A.02 Pelaksanaan Anggaran yang mengatur timeline penyampaian dokumen pertanggungjawaban.	Percepatan penyelesaian tagihan dan tidak menunda proses pembayaran	30 Desember 2022



Rekomendasi	Tindaklanjut			
	Selesai	Belum		
		Rencana Aksi (Triwulan IV)	Timeline	
k	Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar	Memorandum Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: KU.01.12A.12A5.07.22.09 tentang Pengelolaan Anggaran TA 2022		
l	Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.	Memorandum Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: KU.01.12A.12A5.07.22.09 tentang Pengelolaan Anggaran TA 2022 yang salah satunya mengatur timeline penyampaian dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, diatur dengan SOP Mikro POM-12.01/CFM.04/SOP.01/IK.12A.02 Pelaksanaan Anggaran yang mengatur timeline penyampaian dokumen pertanggungjawaban.		

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, anggaran Balai Besar POM di Bandung semula sebesar Rp. 57.361.818.000,- dengan rincian: (1) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.257.850.000,-; dan (2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.595.745.000,-. Pada triwulan II tahun 2022, anggaran Balai Besar POM di Bandung menjadi sebesar Rp. 61.356.815.000,- dengan rincian: (1) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.761.070.000,- dan (2) Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26,595,745,000,-. Selisih anggaran sebesar Rp. 1.532.040.000,- untuk penambahan pelaksanaan titik KIE berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.03.03.21.212.05.22.190 tanggal 30 Mei 2022 tentang Realokasi Anggaran dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Namun, berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Utama



Nomor B-PR.03.01.2.21.12.21.629 tanggal 6 Desember 2021 perihal Data Pemblokiran Mandiri (Selfblocking) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) TA 2022, anggaran BBPOM di Bandung yang diblokir dalam rangka Automatic Adjustment sebesar Rp. 2.542.957.000,- (Tahap I). Kemudian berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor : B-PR.03.03.2.21.05.22.370 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penyampaian Tambahan Automatic Adjustment TA 2022, anggaran BBPOM di Bandung yang diblokir dalam rangka Automatic Adjustment sebesar Rp. 2.903.346.000,- (Tahap II). Sehingga anggaran BBPOM di Bandung yang diblokir dalam Automatic Adjustment sebesar Rp. 5.446.303.000,-. Pada Triwulan III, anggaran BBPOM di Bandung meningkat menjadi Rp. 63.916.221.000,-. Penambahan anggaran tersebut antara lain : (1) Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: B-PR.03.03.21.212 05.22.190 tanggal 30 Mei 2022 perihal Realokasi Anggaran dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, disampaikan BBPOM di Bandung mendapatkan tambahan pelaksanaan KIE sebanyak 17 titik dengan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp. 1.532.040.000,-; (2) Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 04 Agustus 2022 perihal Penginputan Kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2022, disampaikan revisi kekurangan belanja pegawai; (3) Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor : B-PR.03.03.2.21.09.22.675 tanggal 13 September 2022 perihal Realokasi dan Optimalisasi Anggaran dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program KIE Obat dan Makanan, disampaikan Hasil Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman, maka Balai Besar POM di Bandung ditambahkan sebanyak 7 titik KIE dengan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp. 591.990.000,-. Pada triwulan III tahun 2022 berdasarkan OMSPAN, realisasi anggaran sebesar Rp. 40.295.581.767,- (63,04%).

**TABEL 3.68
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BERDASARKAN OMSPAN
TRIWULAN III TAHUN 2022**

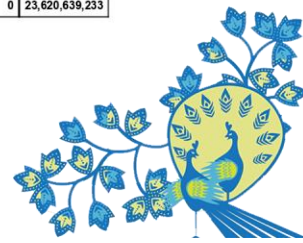


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 09

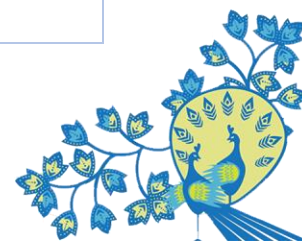
NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	432753 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	PAGU	23,300,000,000	33,160,836,000	7,455,385,000	0	0	0	0	0	0	63,916,221,000
		REALISASI	17,018,657,843 (73.04%)	16,591,168,954 (50.03%)	6,685,754,970 (89.68%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40,295,581,767 (63.04%)
		SISA	6,281,342,157	16,569,667,046	769,630,030	0	0	0	0	0	0	23,620,639,233
GRAND TOTAL		PAGU	23,300,000,000	33,160,836,000	7,455,385,000	0	0	0	0	0	0	63,916,221,000
		REALISASI	17,018,657,843 (73.04%)	16,591,168,954 (50.03%)	6,685,754,970 (89.68%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	40,295,581,767 (63.04%)
		SISA	6,281,342,157	16,569,667,046	769,630,030	0	0	0	0	0	0	23,620,639,233



Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

**TABEL 3.69
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,822,530,000	85,684,148	4.70
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	34,885,000	34,881,000	99.99
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	271,937,500	135,841,500	49.95
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	4,040,979,500	2,199,248,502	54.42
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	13,090,009,000	6,573,481,670	50.22
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	994,905,000	806,567,210	81.07
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,455,307,000	707,030,197	48.58
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	4,795,360,000	3,723,610,727	77.65
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	27,186,518,000	20,504,558,316	75.42
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	9,881,712,000	9,683,600,449	98.00

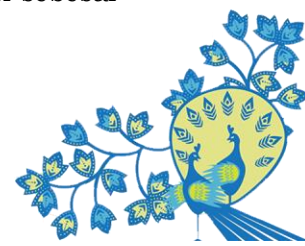


11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	342,078,000	166,908,000	48.79
TOTAL		63,916,221,000	44,621,411,719	69.81

Catatan : Realisasi Anggaran Berdasarkan SAKTI.

Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada triwulan III tahun 2022 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Kegiatan Kedua yaitu: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 34,885,000,- dan realisasi sebesar Rp. 34,881,000,- dengan capaian 99,99%.
- 2) Sasaran Kegiatan Kesepuluh yaitu: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan pagu sebesar Rp. 9,881,712,000,- dan realisasi sebesar Rp. 9,683,600,449,- dengan capaian 98,00%.
- 3) Sasaran Kegiatan Keenam yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 994,905,000,- dan realisasi sebesar Rp. 806,567,210,- dengan capaian 81,07%.
- 4) Sasaran Kegiatan Kedelapan yaitu: Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal dengan pagu sebesar Rp. 4,795,360,000,- dan realisasi sebesar Rp. 3,723,610,727,- dengan capaian 77,65%.
- 5) Sasaran Kegiatan Kesembilan yaitu: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal dengan pagu sebesar Rp. 27,186,518,000,- dan realisasi sebesar Rp. 20,504,558,316,-, dengan capaian 75,42%.
- 6) Sasaran Kegiatan Keempat yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 4,040,979,500,- dan realisasi sebesar Rp. 2,199,248,502,- dengan capaian 54,42%.
- 7) Sasaran Kegiatan Kelima yaitu: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 13,090,009,000,- dan realisasi sebesar Rp. 6,573,481,670,- dengan capaian 50,22%.
- 8) Sasaran Kegiatan Ketiga yaitu: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 271,937,500,- dan realisasi sebesar Rp. 135,841,500,-, dengan capaian 49,95%.
- 9) Sasaran Kegiatan Kesebelas yaitu: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel dengan pagu sebesar Rp. 342,078,000,- dan realisasi sebesar Rp. 166,908,000,- dengan capaian 48,79%.



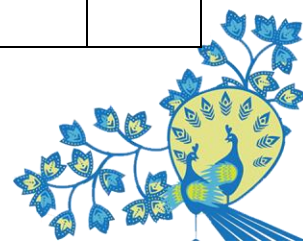
- 10) Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1,455,307,000,- dan realisasi sebesar Rp. 707,030,197,- dengan capaian 48,58%.
- 11) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1,822,530,000,- dan realisasi sebesar Rp. 85,684,148,-, dengan capaian 4,7%.

Sedangkan jika dilihat penyerapan anggaran berdasarkan *perspective balance score card* maka secara berturut-turut dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

- 1) *Learning and Growth Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42,205,668,000,- dan realisasi sebesar Rp. 34,078,677,492,- dengan capaian 80,74%.
- 2) *Internal Process Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19,581,200,500,- dan realisasi sebesar Rp. 10,286,327,579,- dengan capaian 52,53%.
- 3) *Stakeholders Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2,129,352,500,- dan realisasi sebesar Rp. 256,406,648,- dengan capaian 12,04%.

**TABEL 3.70
REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,822,530,000	85,684,148	4.70	2,129,352,500	256,406,648	12.04
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	34,885,000	34,881,000	99.99			
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	271,937,500	135,841,500	49.95			
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja	4,040,979,500	2,199,248,502	54.42	19,581,200,500	10,286,327,579	52.53



Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
		BBPOM di Bandung						
	5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	13,090,009,000	6,573,481,670	50.22			
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	994,905,000	806,567,210	81.07			
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,455,307,000	707,030,197	48.58			
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	4,795,360,000	3,723,610,727	77.65	42,205,668,000	34,078,677,492	80.74
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	27,186,518,000	20,504,558,316	75.42			
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	9,881,712,000	9,683,600,449	98.00			
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	342,078,000	166,908,000	48.79			
NILAI PENCAPAIAN ANGGARAN			63,916,221,000	44,621,411,719	69.81	63,916,221,000	44,621,411,719	69.81

Catatan : Realisasi Anggaran Berdasarkan SAKTI.

Pada triwulan III, RPD yang tercantum dalam Halaman III DIPA BBPOM di Bandung sebesar Rp. 40.291.778.979,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.295.581.767,- (OMSPAN) maka deviasi sebesar -0,01 dengan kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan tabel berikut :

**TABEL 3.71
HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD**



TRIWULAN III TAHUN 2022

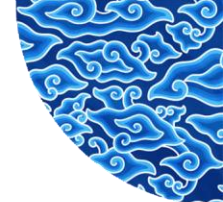
BULAN	% RPD Halaman III DIPA	% Realisasi	Deviasi	Kategori
JANUARI	1.60	1.60	-0.08	BAIK
FEBRUARI	5.95	5.95	-0.02	BAIK
MARET	11.04	11.04	-0.01	BAIK
APRIL	18.72	18.72	-0.01	BAIK
MEI	24.28	24.28	-0.01	BAIK
JUNI	38.98	38.98	-0.02	BAIK
JULI	46.52	46.52	-0.01	BAIK
AGUSTUS	56.49	56.50	-0.01	BAIK
SEPTEMBER	63.04	63.04	-0.01	BAIK

Berdasarkan Surat Edaran Plt. Sekretaris Utama Nomor : HK.02.02.2.21.07.22.24 tentang Target Penyerapan Anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa target penyerapan anggaran per triwulan dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja, dengan ketentuan:

- a. Belanja Pegawai sebesar minimal:
 - 1) 20% pada triwulan I;
 - 2) 50% pada triwulan II;
 - 3) 75% pada triwulan III; dan
 - 4) 95% pada triwulan IV.
- b. Belanja Barang sebesar minimal:
 - 1) 15% pada triwulan I;
 - 2) 50% pada triwulan II;
 - 3) 70% pada triwulan III; dan
 - 4) 90% pada triwulan IV.
- c. Belanja Modal sebesar minimal:
 - 1) 10% pada triwulan I;
 - 2) 40% pada triwulan II;
 - 3) 70% pada triwulan III; dan
 - 4) 90% pada triwulan IV.

TABEL 3.72
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN





TRIWULAN III TAHUN 2022

Akun Belanja	Target Realisasi Anggaran TW III	Realisasi Anggaran Triwulan III	Capaian
51	75%	73.04%	97.39%
52	70%	50,03%	71.47%
53	70%	89,68	128.11%

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:



Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien

Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

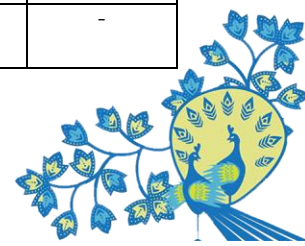
Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.73
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama	Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI	
	Capaian (%)	Capaian (%)				
a	B	c	d=b/c	e=d-1	f	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.45	0.65	138.29	137.29	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	107.03	4.64	23.07	22.07	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.09	0.65	139.26	138.26	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	114.26	4.64	24.63	23.63	75 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	115.59	74.16	1.56	0.56	92 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	99.99	-	-	-



Indikator Kinerja Utama	Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI	
	Capaian (%)	Capaian (%)				
a	B	c	d=b/c	e=d-1	f	
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	37.74	-	-	-
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	73.58	-	-	-
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	101.92	100.00	1.02	0.02	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	48.01	28.52	1.68	0.68	90 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	46.65	22.36	2.09	1.09	86 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	84.26	65.74	1.28	0.28	95 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90.14	65.46	1.38	0.38	95 %
14	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	108.77	68.47	1.59	0.59	92 %
15	Indeks Pelayanan Publik	104.94	100.00	1.05	0.05	100 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	128.43	30.11	4.27	3.27	75 %
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	99.68	47.18	2.11	1.11	88%
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	162.07	71.55	2.27	1.27	84 %
19	Jumlah desa pangan aman	72.02	59.96	1.20	0.20	100%
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	62.27	55.62	1.12	0.12	100 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	103.56	80.37	1.29	0.29	95 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95.52	83.84	1.14	0.14	100 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	128.55	48.58	2.65	1.65	78 %
24	Indeks RB UPT	-	83.61	-	-	-
25	Nilai AKIP UPT	-	0.00	-	-	-
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	75.42	-	-	-



Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		B	c	d=b/c	e=d-1	f
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	99.55	-	-	-
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	128.00	64.04	2.00	1.00	88 %
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	104.13	48.79	2.13	1.13	86 %
TOTAL		99.43	69.81	1.42	0.42	92 %

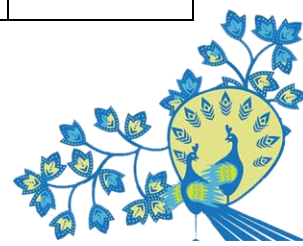
Catatan : Realisasi Anggaran Berdasarkan SAKTI

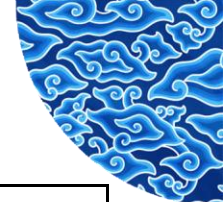
Pada triwulan III tahun 2022, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator secara kumulatif masuk ke dalam kategori **Efisien dengan TE 0,42 dengan Capaian TE 92%**.

Sedangkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada triwulan III tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.74
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT
TRIWULAN III TAHUN 2022**

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume Capaian (%)	Anggaran Capaian (%)	IE	TE	KATEGORI
a	b	c	d	e=c/d	f=e-1	g
1	3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	71.43	43.72	1.63	0.63	90 %
2	3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	61.83	49.62	1.25	0.25	100%
3	3165.BDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	81.33	38.45	2.12	1.12	86 %
4	3165.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	75.00	53.80	1.39	0.39	95 %
5	3165.BMB.001 - Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	70.37	37.74	1.86	0.86	88 %
6	3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	95.00	72.61	1.31	0.31	95 %
7	3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	100.00	88.51	1.13	0.13	100 %
8	3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	100.00	70.57	1.42	0.42	92 %
9	3165.EBA.962 - Layanan Umum	75.00	58.85	1.27	0.27	95 %
10	3165.PDD.001 - Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	49.71	49.71	1.00	0.00	100 %





No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume Capaian (%)	Anggaran Capaian (%)	IE	TE	KATEGORI
a	b	c	d	e=c/d	f=e-1	g
11	3165.QCD.U02 -Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	90.00	50.95	1.77	0.77	90 %
12	3165.QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	71.31	71.55	1.00	0.00	75 %
13	3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	61.22	59.33	1.03	0.03	100 %
14	3165.QDB.003 -Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	56.04	55.58	1.01	0.01	100 %
15	3165.QDC.001 - KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	60.97	39.85	1.53	0.53	92 %
16	3165.QIA.001 -Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	82.45	21.46	3.84	2.84	75 %
17	3165.QIA.005 -Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	88.45	32.63	2.71	1.71	78 %
18	3165.QIA.008 - Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100.00	74.16	1.35	0.35	95 %
19	3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	77.75	60.59	1.28	0.28	95 %
20	3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	88.52	54.07	1.64	0.64	90 %
21	3165.RAB.001- Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	97.06	97.48	1.00	0.00	75 %
22	6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	75.00	72.57	1.03	0.03	100 %
TOTAL		78.57	63.08	1.25	0.25	95 %

Catatan : Realisasi Anggaran Berdasarkan Laporan Realisasi Kinerja Capaian Output

Pada triwulan III tahun 2022, BBPOM di Bandung melaksanakan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) dengan nilai TE 0,25 dengan capaian TE sebesar 95%. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (TE=2.84), nilai TE terendah adalah Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (TE=-0,00), Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (TE=-0,00), dan Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (TE=-0,00). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada triwulan III terlaksana secara efisien (TE=0,25,) dengan capaian TE 95%.

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.



LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG



**TRIWULAN III
TAHUN 2022**



BAB 4 PENUTUP



4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN



4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan III Tahun 2022 mengukur pencapaian kinerja triwulan III tahun 2022 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 merupakan tahun ketiga Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan III tahun 2022, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan, Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan indikator) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: terdapat tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria memenuhi ekspektasi, tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, dan dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, serta tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada triwulan III tahun 2022 adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 103.69% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi (Efektif), ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun, sehingga belum dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketiga sebesar 101,92% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi (Efektif), ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 87.31% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif), ini menunjukkan kegagalan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima sebesar 99.01% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif), ini menunjukkan kegagalan



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan.

- ☰ Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 99.54% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif), ini menunjukkan kegagalan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.
- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 128.55% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini belum dapat menunjukkan kegagalan maupun keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan dan kesembilan belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun sehingga belum dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal serta mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal.
 - ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 128,00% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini belum dapat menunjukkan kegagalan maupun keberhasilan Balai Besar POM di Bandung menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
 - ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesebelas sebesar 104,13% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi (Efektif), ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung mengelola keuangan secara akuntabel.
3. Pada triwulan III tahun 2022, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator secara kumulatif masuk ke dalam kategori **Efisien dengan TE 0,42 dengan Capaian TE 92%**.
 4. Pada triwulan III tahun 2022, BBPOM di Bandung melaksanakan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) dengan nilai TE 0,25 dengan capaian TE sebesar 95%. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (TE=2.84), nilai TE terendah adalah Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (TE=-0,00), Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (TE=-0,00), dan Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (TE=-0,00). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada triwulan III terlaksana secara efisien (TE=0,25,) dengan capaian TE 95%.



4.2 SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi new normal serta sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran kegiatan pada triwulan III tahun 2022 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada periode selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Menjalin kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan menggunakan teknologi dan melakukan inovasi berbasis teknologi.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.





BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG

TRIWULAN III TAHUN 2022

LAMPIRAN

1. **REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020-2024**
2. **RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2022**
3. **PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2022**
4. **RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2022**
5. **PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN II TAHUN 2022**
6. **TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN II TAHUN 2022**
7. **TINGKAT EFISIENSI RINCIAN OUTPUT BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN II TAHUN 2022**



**LAMPIRAN 1
REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020-2024**

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97	97,5	98	98,5
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	82	84	86
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	95	95,5	96	94
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70	72	74	76
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat						70	72	74	76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	71	74	77	80
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	91.1	92.3	93.4	94.6
8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	77.83	80.22	82.62	85.01
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92	89,50	90,50	91,00	92,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	96	97	98	99
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85	64	71	78	85
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	88	91	94	97
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	57	61	66	70
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	74	76	78	80



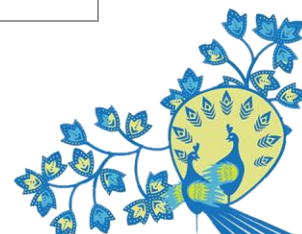
**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar						-	77	79	81
SK5. Meningkatkan efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	92	93.8	95.7	97.6
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	42	76	112	150
19. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	19	28	37	47
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	8	13	18	23
SK6. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	100	100	100	100
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	100	100	100	100
SK7. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	65	67	69	71
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal									
24. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	82.8	83.8	84.8	85.8
25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	83	85.5	88	90.5
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	79	80	81	82
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	79	84	89	94
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2.25	2.5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95.1	95.3	95.6	95.9
30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	-	-	-



**LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5%
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5%
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97%
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71%
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91%
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61%
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76%
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,45
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	77%
		17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		19. Jumlah desa pangan aman	28
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
		21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		23. Presentase keberhasilan penindakan	67%



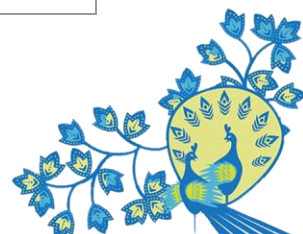
**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	kejahatan di bidang Obat dan Makanan	
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	83.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.5
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84%
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.3



**LAMPIRAN 3
PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5%
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5%
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97%
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71%
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91%
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61%
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76%
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,45
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	77%
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		19. Jumlah desa pangan aman	28
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67%
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	83.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.5
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84%
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.3



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

**LAMPIRAN 4
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	727.971.420, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	436.247.500, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	375.015.580, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	234.902.500, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	80.526.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												74	45.712.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92.3	204.200.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												80.22	30.720.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90.50	25.202.500, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	267.880.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	390.262.000, 00



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	988.636.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	745.414.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	1.236.470.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.45	25.202.500, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3.33	6.67	30	30	36.67	36.67	36.67	36.67	63.33	70	93.33	77	624.875.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	8.549.580.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	20	20	20	20	23	38	44	70	82	76	977.871.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman		20	25	55	65	65	75	75	85	95	100	28	1.190.726.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	618.228.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	204.009.000, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	6	16	28	32	36	41	46	51	58	61	64	67	1.455.307.000, 00
23.	Indeks RB UPT												83.8	4.322.083.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												85.5	340.780.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												80	25.028.978.000, 00



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											84		9.624.790.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	398.285.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	7.9	15.8	23.7	31.6	39.5	47.4	55.3	63.2	71.1	79	86.9	95.3	315.274.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		20	20	25	40	40	60	70	90	90	90	13	359.627.000, 00
Total													59.824.775.000, 00	



LAMPIRAN 5
PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2022	Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Terhadap Target Tahun 2022		
				TW III Tahun 2022						
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
Stakeholder Perspective										
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.50	97.50	1225	1389	88.19	90.45	90.45
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00	82.00	452	515	87.77	107.03	107.03
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50	95.50	428	492	86.99	91.09	91.09
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00	72.00	116	141	82.27	114.26	114.26
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00	72.00	129	155	83.23	115.59	115.59
NPS SK 1								103.69	103.69	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	74.00	-	-	-	-	-	-
NPS SK 2								-	-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	-	-	-	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80.22	-	-	-	-	-	-
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.50	90.50	-	-	92.24	101.92	101.92
NPS SK 3								101.92	101.92	
Capaian Perspective stakeholder								103	103	
Internal Process Perspective										
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	10	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97.00	97.00	-	-	46.57	48.01	48.01



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2022	Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Terhadap Target Tahun 2022		
				TW III Tahun 2022						
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00	71.00	-	-	33.12	46.65	46.65	
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00	91.00	1177	1535	76.68	84.26	84.26	
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00	61.00	171	311	54.98	90.14	90.14	
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00	76.00	1116	1350	82.67	108.77	108.77	
	15	Indeks Pelayanan Publik	4.45	4.45	-	-	4.67	104.94	104.94	
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00	63.33	-	-	81.33	128.43	81.33	
NPS SK 4							87.31	87.31		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.80	-	-	93.50	99.68	99.68
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76.00	Progress 44.00	-	-	Progress 71.31	162.07	71.31
		19	Jumlah desa pangan aman	28.00	Progress 85.00	-	-	Progress 61.22	72.02	61.22
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13.00	Progress 90.00	-	-	Progress 56.04	62.27	56.04
NPS SK 5							99.01	72.06		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	70.00	-	-	72.50	103.56	72.50
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	70.00	-	-	66.86	95.52	66.86
NPS SK 6							99.54	69.68		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67.00	58.00	-	-	74.56	128.55	111.29
NPS SK 7							128.55	111.29		
Capaian Internal Process Perspective							104	85		
Learning & Growth Perspective										
8	Terwujudnya tatakelola	24	Indeks RB UPT	83.80	-	-	-	-	-	



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2022	Target TW III	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III	Capaian Terhadap Target Tahun 2022	
				TW III Tahun 2022					
				Pembilang	Penyebut	Realisasi			
pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	85.50	-	-	-	-	-	
NPS SK 8							-	-	
9 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80.00	-	-	-	-	-	
NPS SK 9							-	-	
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00	-	-	-	-	-	
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	-	-	2.88	128.00	128.00
NPS SK 10							128.00	128.00	
11 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.30	71.10	-	-	74.03	104.13	77.69
NPS SK 11							104.13	77.69	
Capaian Learning & Growth Perspective							116	103	
NPS TOTAL							108	97	



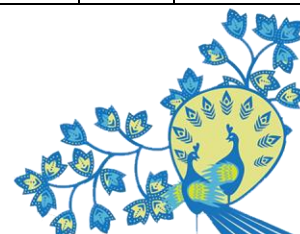
**LAMPIRAN 6
TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

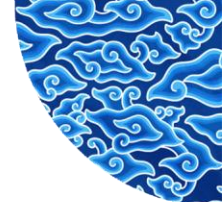
Indikator Kinerja Utama		Volume				Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	KATEGORI
		Target 2022	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian (%)	Pagu	Realisasi TW III	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.50	97.50	88.19	90.45	727,971,420	4,761,597	0.65	138.29	137.29	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00	82.00	87.77	107.03	425,550,450	19,744,079	4.64	23.07	22.07	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50	95.50	86.99	91.09	375,015,580	2,452,944	0.65	139.26	138.26	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00	72.00	82.27	114.26	229,142,550	10,631,428	4.64	24.63	23.63	75 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00	72.00	83.23	115.59	64,850,000	48,094,100	74.16	1.56	0.56	92 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74.00	-	-	-	34,885,000	34,881,000	99.99	-	-	-
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	-	-	-	204,200,000	77,064,000	37.74	-	-	-
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80.22	-	-	-	33,920,000	24,960,000	73.58	-	-	-
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90.50	90.50	92.24	101.92	33,817,500	33,817,500	100.00	1.02	0.02	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97.00	97.00	46.57	48.01	152,581,000	43,510,300	28.52	1.68	0.68	90 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00	71.00	33.12	46.65	469,146,000	104,908,150	22.36	2.09	1.09	86 %



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022**

Indikator Kinerja Utama	Volume				Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	KATEGORI	
	Target 2022	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian (%)	Pagu	Realisasi TW III	Capaian (%)				
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00	91.00	76.68	84.26	835,976,000	549,592,969	65.74	1.28	0.28	95 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00	61.00	54.98	90.14	773,995,000	506,648,884	65.46	1.38	0.38	95 %
14	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	76.00	76.00	82.67	108.77	1,110,889,000	760,659,986	68.47	1.59	0.59	92 %
15	Indeks Pelayanan Publik	4.45	4.45	4.67	104.94	33,817,500	33,817,500	100.00	1.05	0.05	100 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00	63.33	81.33	128.43	664,575,000	200,110,713	30.11	4.27	3.27	75 %
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.80	93.50	99.68	10,671,345,000	5,034,885,153	47.18	2.11	1.11	88%
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76.00	44.00	71.31	162.07	896,331,000	641,285,381	71.55	2.27	1.27	84 %
19	Jumlah desa pangan aman	28.00	85.00	61.22	72.02	1,165,106,000	698,603,656	59.96	1.20	0.20	100%
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13.00	90.00	56.04	62.27	357,227,000	198,707,480	55.62	1.12	0.12	100 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	70.00	72.50	103.56	794,000,000	638,123,794	80.37	1.29	0.29	95 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	70.00	66.86	95.52	200,905,000	168,443,416	83.84	1.14	0.14	100 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67.00	58.00	74.56	128.55	1,455,307,000	707,030,197	48.58	2.65	1.65	78 %
24	Indeks RB UPT	83.80	-	-	-	4,453,453,000	3,723,610,727	83.61	-	-	-
25	Nilai AKIP UPT	85.50	-	-	-	341,907,000	0	0.00	-	-	-
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80.00	-	-	-	27,186,518,000	20,504,558,316	75.42	-	-	-
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00	-	-	-	9,447,975,000	9,405,836,414	99.55	-	-	-
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.88	128.00	433,737,000	277,764,035	64.04	2.00	1.00	88 %
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.30	71.10	74.03	104.13	342,078,000	166,908,000	48.79	2.13	1.13	86 %



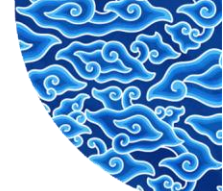


**LAMPIRAN 7
TINGKAT EFISIENSI RINCIAN OUTPUT
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

No	Program /	Volume				Anggaran			IE	TE	KATEGORI
	Kegiatan /	Satuan	Target 2022	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
	RO										
1	3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Laporan	14	10	71.43	475,684,000	207,947,076	43.72	1.63	0.63	90 %
2	3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Keputusan	1,910	1181	61.83	1,075,521,000	533,658,880	49.62	1.25	0.25	100%
3	3165.BDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	UMKM	38	81.33%	81.33	384,350,000	147,770,713	38.45	2.12	1.12	86 %
4	3165.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Laporan	1	75.00%	75.00	1,303,891,000	701,452,748	53.80	1.39	0.39	95 %
5	3165.BMB.001 - Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Layanan	54	38	70.37	204,200,000	77,064,000	37.74	1.86	0.86	88 %
6	3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Paket	1	95.00%	95.00	730,799,000	530,650,000	72.61	1.31	0.31	95 %
7	3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Unit	1	1	100.00	186,031,000	164,648,000	88.51	1.13	0.13	100 %
8	3165.CAN.001 - Perangkat pengolahan data dan komunikasi	Unit	1	1	100.00	1,423,560,000	1,004,560,000	70.57	1.42	0.42	92 %
9	3165.EBA.962 - Layanan Umum	Layanan	1	75.00%	75.00	1,829,851,000	1,076,909,570	58.85	1.27	0.27	95 %
10	3165.PDD.001 - Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Laboratorium	1	49.71%	49.71	3,000,000,000	1,491,218,312	49.71	1.00	0.00	100 %
11	3165.QCD.U02 -Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	Perkara	10	9	90.00	979,623,000	499,083,121	50.95	1.77	0.77	90 %
12	3165.QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	76	71.31%	71.31	896,331,000	641,285,381	71.55	1.00	0.00	75 %
13	3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	Desa	28	61.22%	61.22	1,165,106,000	691,215,616	59.33	1.03	0.03	100 %
14	3165.QDB.003 -Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Pasar	13	56.04%	56.04	357,227,000	198,547,440	55.58	1.01	0.01	100 %
15	3165.QDC.001 - KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Orang	24,300	14,815	60.97	10,783,170,000	4,297,617,238	39.85	1.53	0.53	92 %
16	3165.QIA.001 -Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sampel	1,003	827	82.45	855,598,000	183,618,245	21.46	3.84	2.84	75 %
17	3165.QIA.005 -Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	Sampel	2,659	2,352	88.45	1,857,335,000	606,039,786	32.63	2.71	1.71	78 %
18	3165.QIA.008 - Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	Sampel	155	155	100.00	64,850,000	48,094,100	74.16	1.35	0.35	95 %
19	3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sarana	400	311	77.75	924,886,000	560,403,184	60.59	1.28	0.28	95 %



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN II TAHUN 2022**



No	Program/ Kegiatan/	Volume				Anggaran			IE	TE	KATEGORI
	RO	Satuan	Target 2022	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%			
	20	3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sarana	1,525	1,350	88.52	1,740,052,000	940,834,136			
21	3165.RAB.001- Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Laboratorium	1	97.06%	97.06	5,114,995,000	4,985,896,970	97.48	1.00	0.00	75 %
22	6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	75.00%	75.00	28,563,161,000	20,728,520,787	72.57	1.03	0.03	100 %





WBK BBPOM BANDUNG
JUARA!
GOES TO **WBBM**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

